

PRABOWO GIBRAN MENANG SATU PUTARAN



Rp75.000,-

**KHOFIFAH
LAWAN
KOTAK
KOSONG**

**BANSOS
JOKOWI
UNTUNGAN
PRABOWO -
GIBRAN**

**SUMSEL RAIH
PERINGKAT 1
TERBAIK IGA
REGIONAL
SUMATERA**

**TANGGUNG
JAWAB DAERAH
AMANKAN
ANGGARAN
PILKADA**

**PERJALANAN
MULUS BOBBY
NASUTION
MAJU PILGUB
SUMUT 2024**

**ADA SUMSER
ILEGAL
UNTUK
KAMPANYE**

info indonesia

inovasi untuk negeri



IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000



*Kami Hadir
Memberikan
info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN
PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET
SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH
DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON
UNTUK PARA PELANGGAN**



Alamat REDAKSI/IKLAN/pemasaran: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750

• TELP 021-791 96781 • FAX 021-791 96786

TABLOID REFERENSI PEMILU 2024



TERBIT
TIAP
HARI
SENIN



DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Beberapa survei menyimpulkan elektabilitas para kandidat belum sampai pada kemungkinan salah satu pasangan Capres-Cawapres sanggup memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Namun, dinamika elektabilitas sejauh ini memunculkan kemungkinan bahkan dorongan agar Pilpres dapat berlangsung satu putaran.



22

INFO SUMSEL

Provinsi Sumatera Selatan menerima penghargaan terbaik dari Innovative Government Award (IGA) tahun 2023 dalam kategori Skor Tertinggi Regional I. Provinsi Sumsel juga meraih nilai tertinggi Pulau Sumatera. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengaku sangat bangga.



32

INFO DPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajak seluruh masyarakat mengedepankan asas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau Luber Jurdil serta melaksanakan dengan riang gembira dan cerdas.



38

INFO PEMILU

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan pemilihan umum merupakan ajang memilih pemimpin secara bersama, bukan untuk mengeliminasi musuh.



66

INFO NASIONAL

Kampanye politik memang kompleks. Yang positif dan negatif dapat muncul silih berganti, bahkan bersamaan. Begitulah pengalaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo.



72

INFO EKONOMI

Pemerintah bakal menambah utang sebanyak Rp600 triliun pada 2024. Penambahan utang dilakukan mengingat target defisit tahun depan di Indonesia meningkat sebesar 2,29 persen dibandingkan dengan target defisit 2023 sebesar 2,27 persen.



87

INFO KHUSUS

Hajatan politik terkait Pemilu 2024 tidak boleh mengganggu agenda pembangunan Indonesia.



3 DARI REDAKSI

20 OPINI

36 INFO MPR

77 INFO ISTANA

82 INFO CALEG

86 KAJI

46

INFO PILKADA

Khofifah Indar Parawansa terancam melawan kotak kosong di Pilgub Jatim 2024. Pasalnya, belum ada partai yang memunculkan satu nama pun soal sosok rival Khofifah. Apalagi, belum ada seseorang yang bisa menandingi elektabilitas Khofifah di Jatim.

DERING

Akhir 2023 menjelang 2024. Setiap kali Desember tiba, kesadaran seperti itu lazim hadir di tengah kita. Seperti dering peringatan, alarm, tentang banyak hal.

Tapi, dering itu selalu saja terkait dengan perjalanan waktu. Perjalanan waktu dengan dua sisi tak terpisahkan: siklus berulang dan linear yang berlanjut menuju batas akhir.

Maka Desember akhir dan jelang tahun baru merupakan salah satu momentum tepat melihat masa lalu dan memproyeksi masa mendatang. Sebagaimana kita mengenal ungkapan pengalaman adalah guru terbaik, perjalanan waktu di masa lalu idealnya menyediakan bekal untuk merancang masa depan tanpa mengulang kekeliruan di masa lalu.

Namun, sebagaimana waktu yang berjalan linear, selalu ada perbedaan antara masa lalu, kini, dan mendatang. Paling tidak, kita sudah dapat merasakan bentuk nyata dari pentahapan peradaban modern yang ditandai oleh tahapan-tahapan masyarakat industri: Revolusi industri yang berada pada tahap ke-empat, yang menurut Klaus Schwab, perintis World Economic Forum, ditandai oleh perpaduan teknologi yang mengaburkan batas antara dunia fisik, digital, dan biologis.

Revolusi Industri IV, menurut Schwab, karena itu, menimbulkan disrupsi, gangguan terhadap hampir semua industri di setiap negara. Luas dan mendalamnya perubahan-perubahan ini menandai terjadinya transformasi seluruh sistem produksi, manajemen, dan tata kelola.

Kemungkinan miliaran orang terhubung melalui perangkat seluler, dengan kekuatan pemrosesan, kapasitas penyimpanan, dan akses terhadap pengetahuan yang belum pernah ada sebelumnya, tidak terbatas.

Sebagai perbandingan untuk masa lalu, bagaimana kita masing-masing secara perorangan mengalami disrupsi Revolusi Industri IV? Juga dampak terhadap lingkungan terdekat kita, keluarga dan kerabat, selanjutnya masyarakat luas?

Disrupsi itu juga, pada saatnya, kita alami bersama-sama dalam transisi politik berupa suksesi kepemimpinan nasional melalui proses politik Pemilu 2024. Setelah Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden yang terjadwal pada 14 Februari 2024, masih ada masa peralihan hingga pelantikan Presiden terpilih pada Oktober 2024. Tambahan pula, jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diupayakan berlangsung serentak pada September 2024.

Itu baru agenda politik yang terkait dengan tata kelola pemerintahan. Belum lagi agenda bisnis terkait nafkah kita pada 2024. Akhirnya, dering peringatan itu memerlukan perhatian dan tanggapan yang seksama. Bukan asal-asalan atau sembarangan. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

● TELP 021-791 96781
● FAX 021-791 96786

Twitter : @InfoIndonesia

Facebook : infoindonesia.id

Instagram : @infoindonesia.idn

Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal **DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM:** Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Zulfahmi Jamba **PEMIMPIN REDAKSI:** Gunawan Effendi **WAKIL PEMIMPIN**

REDAKSI: Rahmad Romli **REDAKTUR PELAKSANA:** Rusdiyono **REDAKTUR :** Rio Taufiq Adam, Melati Tagore, Irma Yani, Rusdiyono, Nina Erlina, Ega Tri Gustina, Rusdy Setiawan Putra **REPORTER:** Achmad Tirta Wahyuda, Anugrah Dany, Rifky Ilmi, Budi Prasetya, Ahmad Yani, Yuni Watiana, Mario Ananta, Rahmad KR, Iwan Fals, Heni Elsa Wulandari, Dedy Sagita, Nina Iskandar, Jifran, Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto, M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir Boyke Parningotan Hutapea (Bekasi), Dian Taresa (Kalimantan Tengah), Zaki (Kalimantan Timur), Basri (Kalimantan Utara), Lalu Superman Ambakti (Nusa Tenggara Barat), Abu Bakar Usman (Kepulauan Bangka Belitung) **EDITOR & GRAFIS:** Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI :** Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS:** RM Solehin, Zul Jamba **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar **BANK ACCOUNT:** A/N : PT. Wahana Multimedia, BCA : No Rek : 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



DINAMIKA 1 ATAU 2 PUTARAN

Beberapa survei menyimpulkan elektabilitas para kandidat belum sampai pada kemungkinan salah satu pasangan Capres-Cawapres sanggup memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Namun, dinamika elektabilitas sejauh ini memunculkan kemungkinan bahkan dorongan agar Pilpres dapat berlangsung satu putaran.



Pekan pertama kampanye Pilpres 2024 yang mulai berlangsung 28 November 2023 menunjukkan belum ada kandidat Capres yang sanggup meraih elektabilitas melampaui 50 persen. Namun pada akhir Desember 2023, mulai muncul kalkulasi, hitung-hitungan,

Pilpres sekali putaran pada 14 Februari 2024,” ujar Qodari sebagai Ketua Umum Gerakan Satu Putaran (GSP). Menurut dia, GSP optimis target ini realistis dan dapat dicapai.

Sementara survei elektabilitas berikutnya masih berlangsung, tambahan suara 6-7 persen bagi paslon

elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan 42,9 persen. Selanjutnya, paslon Ganjar Prabowo-Mahfud MD meraih elektabilitas 24,9 persen. Peringkat ketiga tentu saja pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dengan elektabilitas 24 persen.



gan, Pilpres dapat berlangsung satu putaran.

Pengamat politik yang juga pernah mengelola lembaga jajak pendapat (pollster) Ahmad Qodari, misalnya, berpandangan paslon Prabowo-Gibran menjadi kandidat dengan dukungan suara tertinggi. Kisarannya mencapai 43-44 persen menurut beberapa lembaga survei pada awal Desember 2023.

“Hanya diperlukan tambahan suara sekitar 6-7 persen agar tercapai kondisi

Prabowo-Gibran untuk menang satu putaran memang berdasarkan jajak pendapat berbagai lembaga survei. Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, misalnya, merilis hasil survei terbaru dengan tajuk ‘Anies atau Ganjar yang tersingkir -Prabowo di ambang kemenangan’.

Dari judulnya saja, hasil survei LSI itu menyiratkan Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran. Survei yang berlangsung pada 20 November-3 Desember 2023 itu menunjukkan,

Pengambilan sampel LSI menggunakan metode Multistage Random Sampling. Responden sebanyak 1.200 responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan responden menggunakan kuesioner. Margin of error kurang lebih 2,9 persen.

“Pada November awal hingga November akhir secara tren itu positif menjadi 40,3 persen dan sekarang naik kembali menjadi 42,9 persen,” ungkap peneliti LSI Denny JA, Ardian Sopa dalam keterangannya di Jakarta

pada Senin, 11 Desember 2023, sehari sebelum debat Capres pertama.

Dalam hasil survei yang sama, Prabowo-Gibran juga memiliki tren kenaikan suara yang lebih tinggi dibanding pasangan lainnya. Ardian merinci pada September 2023, elektabilitas Prabowo-Gibran berada di angka 39,3



persen. Capaian itu sempat menurun pada Oktober menjadi 36,8 persen, tetapi kembali meningkat di November menjadi 40,3 persen.

Survei LSI Denny JA juga menunjukkan pasangan Ganjar-Mahfud yang mengalami penurunan tren elektabilitas. Ganjar-Mahfud yang berada di angka 36,9 persen pada September turun menjadi 24,9 persen di akhir November. "Jadi angkanya ini untuk pak Ganjar trennya negatif," sambung Ardian.

la juga mengungkapkan, pasangan Anies-Muhaimin (Amin) menunjukkan kenaikan elektabilitas dari 15 persen pada September menjadi 17,2 persen pada Oktober 2023. Tren peningkatan itu, kata dia, masih terus berlanjut pada awal November menjadi 20,3 persen dan akhir November menjadi 24 persen. "Jadi dilihat dari data, Prabowo-Gibran dan Anies-Muhaimin terus menaik dan Ganjar-Mahfud terus menurun," ungkap Ardian.

Hasil survei lainnya, Litbang Kompas menunjukkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo

Menurut survei Litbang Kompas, elektabilitas tertinggi yang diraih Prabowo-Gibran diikuti oleh pasangan Anies-Muhaimin 16,7 persen, dan Ganjar Mahfud 15,3 persen. Namun, pemilih yang belum menentukan pilihannya masih cukup besar hingga mencapai 28,7 persen.

Dari jumlah itu, sebanyak 43,6 persen merupakan pemilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 lalu. Lalu ada 13,5 persen dari pemilih yang belum menentukan pilihan saat ini adalah pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Sisanya, yakni



Subianto-Gibran Rakabuming Raka berada pada posisi teratas dengan elektabilitas 39,3 persen. Survei berlangsung pada 29 November hingga 4 Desember 2023 terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak. Metode penelitian yaitu dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Sementara tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error penelitian $\pm 2,65$ persen.

Survei Litbang Kompas dilakukan sepanjang 29 November hingga 4 Desember 2023. Melibatkan 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen. Margin of error kurang lebih 2,65 persen.

42,9 persen mengaku belum punya hak pilih saat Pemilu 2019 lalu.

Hasil survei Litbang Kompas juga merekam soliditas pemilih PDIP di Pemilu 2019 yang menurun. Pada Agustus lalu, survei Litbang Kompas menyatakan ada 60,6 persen pemilih PDIP yang mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Namun di survei terbaru pada Desember, pemilih PDIP yang mendukung Ganjar turun drastis menjadi 41,9 persen. Litbang Kompas menyimpulkan bahwa pemilih PDIP yang mendukung Ganjar menurun karena putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto. Dengan demikian, pemilih PDIP yang mulanya mendukung Ganjar kini ada yang mendukung Prabowo-Gibran dan ada

pula yang masih bimbang menentukan pilihan.

Litbang Kompas juga mencatat ada kenaikan persentase pemilih PDIP pendukung Ganjar yang kini mendukung Prabowo. Dari 22,1 persen menjadi 35,1 persen di survei terbaru.

Toh survei Litbang Kompas yang berlangsung menyimpulkan elektabilitas pasangan calon peserta Pilpres2024 yang paling tinggi saat ini adalah Prabowo-Gibran dengan 39,3 persen. Diikuti Anies Baswedan-Muhaimin 16,7 persen dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 15,3 persen.

Sebelumnya, Indikator Politik Indo-

pada awal Desember 2024.

Survei nasional Indikator Politik Indonesia menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang yang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Selanjutnya Indikator menerapkan oversample di 15 provinsi yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua, sehingga total sampel mencapai 5.380

bran unggul satu putaran," kata Peneliti Utama Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Sabtu, 9 Desember 2023.

Toh Burhan mengemukakan, survei yang berlangsung pada 23 November hingga 1 Desember 2023 menunjukkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran masih memiliki elektabilitas tertinggi. "Jadi meski belum dapat dipastikan bahwa Prabowo-Gibran menang satu putaran, kalau terjadi putaran kedua, hampir bisa dipastikan Prabowo-Gibran lolos ke putaran kedua," ujarnya.

Apapun, Pilpres satu atau dua putaran masih bergantung dinamika



nesia juga merilis hasil survei terbaru. Ada kesamaan dengan Litbang Kompas mengenai penurunan pemilih Jokowi di 2019 yang mendukung Ganjar. Survei Indikator menyatakan pemilih Jokowi-Ma'ruf di 2019 non-PDIP yang mendukung Ganjar turun dari 35 persen di bulan Agustus, menjadi 19,1 persen di awal Desember.

Sementara itu, pemilih Jokowi-Ma'ruf di 2019 non-PDIP yang mendukung Prabowo-Gibran mengalami peningkatan pesat. Dari 33,2 persen di bulan Agustus menjadi 53,6 persen

responden. Toleransi kesalahan atau margin of error survei tercatat sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Peneliti Utama Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengemukakan, hingga awal Desember 2023, belum ada kemungkinan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran. "Suara Prabowo-Gibran belum mencapai 50 persen plus. Jadi (pemilih) undecided tinggal 5,8 persen kalau dibagi secara proporsional, itu suara undecided tidak lantas membuat Prabowo-Gi-

elektabilitas para kandidat Cawapres hingga akhir masa kampanye awal Februari 2024. Satu faktor lagi yang tak kalah menentukan adalah kinerja mesin politik yaitu partai-partai politik pengusung masing-masing kandidat.

Kampanye Pilpres 2024 berlangsung hingga awal Februari 2024. Masing-masing kandidat memiliki kesempatan untuk meningkatkan elektabilitas dan menggerakkan mesin politiknya. Hasilnya akan terlihat setelah 14 Februari 2024, hari H pemungutan suara. ●

KE JEPANG DI MASA KAMPANYE

Kebetulan atau sengaja, hubungan bisnis Indonesia-Jepang tampak menguat di awal masa kampanye Pemilu dan Pilpres 2024. Setidaknya, penguatan tadi tampak dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Negeri Sakura itu di pertengahan Desember 2023.

Di Jepang, Presiden Jokowi menemui Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida pada Sabtu, 16 Desember 2023. Pertemuan bilateral itu membahas tiga proyek prioritas di bidang transisi energi dalam kerangka Asia Zero Emission Community (AZEC). Kali ini pejabat pemerintah tertinggi yang mendampingi Presiden adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Tercakup dalam pembahasan di Kantor PM Jepang itu antara lain pembangunan Pembangkit Listrik Geothermal di Muara Laboh, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Legok Nangka, dan pengelolaan lahan gambut untuk komoditas pangan di Kalimantan Tengah. Ketiga proyek ini tentu saja terkait dengan transisi energi untuk mengurangi emisi karbon.

Lebih dari sekadar pembicaraan, pertemuan Presiden Jokowi dan PM Kishida berlanjut dengan kesepakatan pemerintah bersama sektor swasta kedua negara untuk berkomitmen melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dalam hal ini Menko Airlangga Hartarto dan Menteri METI (Ministry of Economy, Trade, and Industry) Jepang Saito Ken menyaksikan penandatanganan beberapa dokumen perjanjian tersebut. Perjanjian ini bagian tak terpisahkan dari implementasi dari AZEC.

Acara penandatanganan berlangsung di Kantor METI, Tokyo, Jepang, pada Senin, 18 Desember 2023.

Komitmen kesepakatan dalam acara itu antara lain terdiri dari Power Purchase Agreement (PPA) (perjanjian jual beli Listrik) untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muaralaboh. PPA PLTP Muaralaboh mengatur kontrak PLN dengan PT Supreme Energy Muaralaboh untuk melakukan pembelian tenaga listrik dari PLTP dan harga patokan pembelian tenaga listrik oleh PLN dari PLTP tersebut.

Selanjutnya, Memorandum of Un-

tang implementasi kerja sama Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Legok Nangka. Untuk perjanjian yang terkait kerja sama PLTSa Legok Nangka ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT PLN, dan Sumitomo Corporation akan bekerja sama dalam penyelesaian isu-isu terkait pembangunan PLTSa Legok Nangka, yaitu peningkatan kapasitas dan edukasi publik terkait manajemen sampah dalam menjaga volume dan kualitas sampah yang akan digunakan pada PLTSa Legok Nangka.

Turut hadir mendampingi Menko



derstanding (MoU) tentang Perlakuan Kredit Karbon untuk Proyek Energi atas Sampah (PLTSa) Legok Nangka antara PT PLN dengan Konsorsium Sumitomo Corporation - PT Energia Prima Nusantara Hitachi Zosen. MoU ini mengatur pembagian kredit karbon yang dihasilkan oleh proyek antara Indonesia dan Jepang dan diadopsi sebagai proyek Japan Fund for the Joint Crediting Mechanism (JF-JCM) oleh ADB (Bank Pembangunan Asia).

Kemudian berlangsung pula penandatanganan Preliminary Understanding (kesepahaman awal) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT PLN, dan Sumitomo Corporation ten-

Airlangga pada penandatanganan tersebut antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dan Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. Pada kesempatan tersebut, Menko Airlangga mengemukakan bahwa pelaksanaan proyek Waste-To-Energy di Legok Nangka, Jawa Barat, didasarkan pada pertimbangan bahwa PLTSa merupakan solusi yang efektif dalam mengolah sampah dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. PLTSa akan dapat menyelesaikan masalah sampah di perkotaan dengan mengolah limbah dan memanfaatkannya sebagai sumber daya energi terbarukan. ●



MELIHAT DINAMIKA MESIN POLITIK

Masa kampanye baru memasuki tahap awal. Konsolidasi partai koalisi pendukung kandidat Capres-Cawapres akan ikut menentukan hasil akhir Pemilu serentak 2024.

Selain mengupayakan pasangan Capres-Cawapres yang diusungnya, masing-masing partai politik memiliki kepentingan meraih sebanyak mungkin kursi parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat) DPR. Dalam hal ini, dinamika elektabilitas partai melekat dalam hitung-hitungan.

Di masa awal kampanye akhir November 2023 hingga akhir Desember 2024, layak belaka melihat elektabilitas masing-masing partai politik. Jajak pendapat oleh lembaga survei tetap penting dari sisi validitas (kesahihan) dan keahliannya (reliabilitas) sesuai dengan rekam jejak empat Pemilu dan Pilpres sebelumnya.

Pada sisi lain, kampanye melalui media sosial tak kalah intens karena dapat berlangsung 24 jam dalam sehari. Alhasil dinamika jajak pendapat dibandingkan dengan efektivitas kampanye melalui media sosial baru akan terlihat

setelah pemungutan suara menunjukkan hasilnya.

Nah, di awal masa kampanye, beberapa jajak pendapat sudah menunjukkan dinamika elektabilitas partai sebagai mesin politik untuk menghasilkan suara dukungan. Yang mencolok, misalnya, simpulan LSI Denny JA yang menyebutkan elektabilitas Partai Gerindra sudah melampaui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai peraih kursi parlemen terbanyak dalam Pemilu 2014 dan 2019.

Dalam presentasinya, LSI Denny JA mengemukakan elektabilitas Gerindra mencapai 19,5 persen sedangkan PDIP 19,3 persen. Pada posisi ketiga ada Partai Golkar dengan elektabilitas 11,6 persen. Survei ini menggunakan metodologi multistage random sampling dengan margin of error $\pm 2,9$ persen. Responden berjumlah 1.200 orang dan periode pengumpulan data 20 November-3 Desember.

ber 2023.

Direktur Citra Publik Indonesia-LSI Denny JA, Hanggoro Doso Pamungkas menjelaskan, ada beberapa faktor yang memengaruhi kenaikan elektabilitas dari Gerindra. "Kalau kita lihat ada dua faktor penting yang pertama terjadi pergeseran tingkat kepuasan (kinerja) Jokowi bergeser ke Gerindra," ujar Hanggoro Doso Pamungkas dalam konferensi pers bertajuk 'Akhir Dominasi PDIP di 2024' di Jakarta, Selasa, 19 Desember 2023.

Menurut dia, pemilih yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi makin membesar pilihannya ke Partai Gerindra. Pada survei kali ini jumlahnya mencapai 20 persen. "Kalau sebelumnya pada Mei, Juni yang lalu hanya sembilan persen sekarang meningkat pemilihnya yang puas kepada kinerja Jokowi memilih Gerindra di atas 20 persen dan ini memengaruhi," terangnya.

Kemudian, elektabilitas personal dari Prabowo juga memengaruhi. "Secara personal elektabilitas Prabowo juga mencapai angka 41,1 persen. Dia sebagai Ketua Umum Gerindra juga memengaruhi perolehan partai Gerindra," tuturnya.

Survei kali ini, kata Hanggoro, menunjukkan adanya tren kenaikan Partai Gerindra yang sudah melampaui PDIP sejak 2014 lalu. Dia menjelaskan, data kali ini tidak muncul secara tiba-tiba.

Ada fluktuasi elektabilitas yang terpotret sejak Januari hingga November 2023 hingga akhirnya pada survei terakhir kali ini tercatat temuan baru tersebut. Dalam pemaparan Hanggoro menerangkan penurunan suara PDIP kali ini terjadi karena blunder serangan PDIP ke Jokowi, penolakan Piala Dunia U-20, dan penyebutan presiden sebagai petugas partai.

Dia mengungkapkan, berdasarkan penelusuran hasil pemilihan legislatif (Pileg) sejak 2014, perolehan elektabilitas Partai Gerindra kali ini sudah melampaui perolehan suara PDIP pada Pileg 2019 dengan angka 19,3 persen. Pada Pileg 2014, Partai Gerindra terpaut 7,14 persen dari PDIP dengan perolehan suara 11,81 persen berbanding 18,95 persen. Pada Pileg 2019, perolehan suara Partai Gerindra ada di angka 12,57 persen, dan PDIP ada di angka 19,33 persen.

"Kemudian pada survei kali ini ternyata

ta suaranya (PDIP) masih sama dengan perolehan Pileg 2019 lalu, yakni 19,3 persen. Namun demikian berdasarkan survei kali ini, perolehan suara (PDIP) tahun 2019 telah dilampaui oleh Gerindra sebesar 19,5 persen," kata dia.

Sebagai perbandingan, hasil jajak pendapat Litbang Kompas per Desember 2023 menunjukkan elektabilitas Partai Gerindra berada di urutan pertama. Parpol yang dibentuk Prabowo Subianto itu meraih elektabilitas sebesar

Soekarnoputri itu mempunyai tingkat elektoral sebesar 24,4 persen. Kemudian, urutan ketiga diisi Partai Golkar yang memperoleh elektabilitas 8 persen. Angka itu meningkat sebesar 0,8 persen ketimbang 4 bulan lalu di mana partai beringin mempunyai elektabilitas 7,2 persen.

Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa 7,4 persen, Partai Nasdem (4,9 persen), dan Partai Keadilan Sejahtera (4,5 persen). Lalu, ada Partai Demokrat



21,9 persen atau meningkat tiga persen dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023.

Berdasarkan survei yang sama Agustus 2023, elektabilitas Gerindra saat itu ada di angka 18,9 persen. Elektabilitas Gerindra pada Desember 2023 naik lagi melampaui PDIP. Partai berlogo banteng moncong putih itu kini berada di urutan kedua dengan elektabilitas 18,3 persen.

Angka itu merosot sebanyak 6,1 persen jika dibandingkan Agustus lalu. Kala itu, parpol yang dipimpin Megawati

(4,5 persen), Partai Amanat Nasional (4,2 persen), Partai Solidaritas Indonesia (2,6 persen), Partai Persatuan Pembangunan (2,4 persen) dan partai lainnya 4 persen.

Hasil jejak pendapat Litbang Kompas memperlihatkan PULA Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan enam partai lain elektabilitasnya di bawah 2,5 persen. Keenamnya adalah Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Garda Republik Indonesia (Garuda). Tiga Parpol ini pernah ikut Pemilihan Umum (pemi-



lu).

Sementara, tiga parpol lain adalah parpol yang baru pertama kali ikut pemilu. Ketiganya adalah Partai Buruh, Partai Ummat, dan Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora).

“Dinamika perubahan elektabilitas masih terbuka untuk partai-partai di papan menengah dan bawah,” tulis Peneliti Litbang Kompas Yohanes Mega Hendarto, Selasa, 12 Desember 2023

Yohanes berpandangan, semua partai politik memerlukan upaya ekstra untuk mengangkat elektabilitas mereka. Ia menyebutkan, kerja keras ini diperlukan lantaran durasi kampanye untuk meningkatkan elektabilitas Parpol tinggal sekitar dua bulan lagi.

“Partai papan bawah yang sebagian nonparlemen dan masih baru, dihadapkan tantangan mendongkrak popularitas di mata pemilih yang rata-rata masih berada di angka 30-an persen,” kata Yohanes.

“Hasil itu terbelang minim dibandingkan rerata parpol menengah dengan 65 hingga 75-an persen, sedangkan parpol papan atas memiliki angka kepopuleran 75 hingga 90-an persen,” ungkapnya.

Sedangkan berdasarkan hasil survei Poltracking, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi partai politik (parpol) dengan elektabilitas tertinggi jika pemilihan legislatif (pileg) berlangsung pada Desember 2023. Partai berlambang banteng moncong putih tersebut mencatatkan elektabilitas sebesar 22,2 persen.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyusul di urutan kedua lantaran meraih suara dari 18,3 persen responden. Setelahnya ada Partai Golongan Karya (Golkar) yang meraih elektabilitas sebesar 9,8 persen.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencatatkan elektabilitas sebesar 9,4 persen. Kemudian, dukungan yang diberikan kepada Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Partai Demokrat masing-masing sebesar 8,5 persen dan 5,8 persen.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada di urutan ketujuh dengan elektabilitas sebesar 5,1 persen. Selanjutnya ada 4,5 persen responden yang mendukung Partai Amanat Nasional (PAN) jika pileg dilakukan saat ini.

Lebih lanjut, 10 partai lainnya masih meraih elektabilitas di bawah 4 persen. Persentase itu masih di bawah ambang batas parlemen yang ditetapkan untuk Pemilu 2024.

Poltracking melakukan survei dengan multistage random sampling melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden di seluruh Indonesia pada 29 November-5 Desember 2023. Survei ini dilakukan dengan tingkat toleransi kesalahan (margin of error) sebesar $\pm 2,9$ persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei yang lebih baru oleh lembaga Indometer menunjukkan elektabilitas Partai Gerindra naik tipis menjadi 18,5 persen. Sedangkan PDIP merosot menjadi 16,6 persen.

"Gerindra menggeser PDIP yang selama ini selalu menempati peringkat pertama, seperti tercatat dalam survei pada Oktober 2023. Elektabilitas PDIP melorot sejak heboh Piala Dunia U20 pada April lalu dan sulit untuk bangkit sepenuhnya, malah cenderung stagnan," kata Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB dalam keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 16 Desember 2023.

PDIP sekarang ditempel oleh Golkar yang selama ini berada pada peringkat ketiga dan pelan-pelan mulai naik elektabilitasnya. Berdasarkan hasil survei tersebut, Golkar kini menembus 10,8 persen.

"Partai utama pengusung Prabowo-Gibran (Gerindra) paling berhasil mendapatkan berkah elektoral dan menguat signifikan," tandas Leonard.

Selama ini Gerindra selalu menjadi runner up dengan jarak elektabilitas yang terpaut jauh dari PDIP. "Tarik-menarik antara PDIP dan Gerindra soal kemungkinan bersatu dalam Pilpres menghasilkan perpecahan, masing-masing lalu mengusung capres sendiri," lanjut Leonard.

Sementara Gerindra mengungguli PDIP, partai lain pengusung Prabowo-Gibran seperti Golkar juga mulai menikmati kenaikan elektabilitas. "Jika PDIP tidak berhati-hati, bukan hanya dikalahkan Gerindra tetapi juga bersaing dengan Golkar di tiga besar," jelas Leonard.

Pada urutan berikutnya ada PKB (7,5 persen), Demokrat (6,8 persen), PSI (6,5 persen), dan PKS (4,1 persen). Di bawah ambang batas parlemen ada PAN (3,2 persen), Nasdem (2,5 persen), PPP (2,0

persen), Perindo (1,5 persen), dan Gelora (1,4 persen).

"Kenaikan juga dialami oleh PAN yang masuk Koalisi Indonesia Maju (KIM), sedangkan PPP di kubu Ganjar-Mahfud menurun elektabilitasnya," papar Leonard. Berikutnya di papan bawah ada PBB (0,8 persen), Ummat (0,5 persen), dan Hanura (0,4 persen).

Selanjutnya Garuda (0,2 persen), PKN (0,1 persen), dan Buruh (0,0 persen), dan sisanya menyatakan tidak tahu/tidak jawab sebanyak 16,6 persen. "Tersisa waktu dua bulan menuju pencoblosan bagi partai-partai untuk menjalankan strategi kampanye," pungkas Leonard.

Survei Indometer berlangsung pada 1-7 Desember 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia, yang dipilih secara acak bertingkat survei (multistage random sampling). Margin of error survei sebesar $\pm 2,98$ persen dan pada tingkat kepercayaan

Senin, 11 Desember 2023.

Nah, jika indikasi penurunan perolehan suara itu memicu reaksi merata di semua partai politik untuk menggerakkan mesin politiknya masing-masing, dinamikanya akan terasa di lapangan. Dinamika lapangan udara (jalur media sosial) salah satunya.

Misalnya, sentimen warga media sosial (netizen) terhadap debat perdana yang berlangsung pada Rabu, 12 Desember 2012. Temuan analisis cepat perangkat Drone Emprit menunjukkan Ganjar Pranowo menjadi kandidat Pilpres 2024 yang paling kecil sentimen negatifnya dibandingkan dengan kedua pesaingnya dalam platform media sosial X (twitter).

Dilihat dari analisis sentimen, Ganjar menjadi paling kecil mendapat sentimen negatif yakni dengan angka sebesar 23 persen. Sedangkan capres nomor urut 1 Anies Baswedan mendapat



95 persen.

Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengakui jika elektabilitas PDI Perjuangan (PDIP) sebagai parpol pengusungnya mengalami penurunan beberapa waktu belakangan ini. Hal ini dibuktikan dengan hasil beberapa lembaga survei yang menunjukkan hal serupa.

Oleh sebab itu Ganjar mengaku dirinya dan tim sedang menyusun strategi untuk mengantisipasi anjloknya suara PDIP pada Pemilu 2024. "Iya makanya kemarin juga sudah dikumpulkan, dari kekuatan sebelum survei ini dilaunching," kata Ganjar saat ditemui di FX Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat,

sentimen negatif sebesar 27 persen. Adapun capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mendapat sentimen negatif paling besar yakni sebesar 41 persen.

Untuk sentimen positif, Ganjar dan Anies memiliki angka yang sama. Keduanya mendapatkan angka sebesar 64 persen. Sedangkan, Prabowo hanya memperoleh angka sebesar 48 persen atas sentimen positif.

Apakah big data di media sosial dapat mengimbangi validitas dan reliabilitas jajak pendapat terkait elektabilitas kandidat Capres-Cawapres maupun parpol? Perlu waktu untuk mengujinya. Setidaknya hingga hasil akhir Pemilu dan Pilpres 2024 sudah ditetapkan. •

1-2 PUTARAN KEPENTINGAN

Satu atau dua putaran dalam Pilpres kali ini belum akan terjawab hingga 14 Februari 2024. Toh hasil tak pernah mengkhianati usaha.

Salah satu usaha yang dilakukan tentu saja kampanye, upaya untuk mempengaruhi keputusan para pemilih. Keberhasilan mempengaruhi para pemilih itulah yang menentukan.

Pengamat Politik yang juga Ketua Umum Gerakan Satu Putaran (GSP) Muhammad Qodari, misalnya, mendukung ide Pilpres 2024 satu putaran saja. GSP sendiri terdiri dari pendukung Jokowi yang aktif menyebarkan gagasan satu putaran ini di seluruh Indonesia.

Qodari menjelaskan tiga argumen yang mendasari gerakan ini. Menurut dia, keputusan adanya GSP ini demi efisiensi waktu, efektivitas biaya, dan potensi keamanan politik.

"Pertama, hemat waktu. Pilpres sekali putaran hemat waktu karena presiden dan wakil presiden terpilih sudah diketahui pada Februari 2024 dan tidak perlu menunggu sampai dengan Juni 2024," kata Qodari dalam keterangannya,

Senin, 18 Desember 2023.

"Dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden baru, maka para pengambil keputusan dan pelaku ekonomi sudah memiliki kepastian politik dari Februari 2024. Semua rencana kegiatan dan investasi ekonomi misalnya dapat segera diputuskan dan dilaksanakan," dia menambahkan.

Kedua, ia menyebut pilpres sekali putaran dapat menghemat biaya anggaran negara. Sebab, jika putaran kedua diselenggarakan, diperlukan anggaran tambahan sekitar Rp17 triliun.

"Dengan menyelesaikan pemilihan dalam sekali putaran, anggaran ini dapat dikembalikan ke kas negara, dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, atau dialokasikan untuk program pemerintah lainnya seperti subsidi pupuk, subsidi rumah, subsidi transisi energi hijau, dan bantuan pangan dan tunai yang bersifat ad hoc, atau dialokasikan untuk APBN tahun berikutnya," kata dia.



Ketiga, Qodari menilai pilpres sekali putaran akan lebih damai dibandingkan dua putaran. Sebab, kata dia potensi polarisasi ekstrem seperti di Pilpres 2014, 2019 dan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dapat dihindari.

"Pilpres sekali putaran lebih damai karena polarisasi ekstrem seperti Pilpres 2014 dan 2019 serta Pilkada Jakarta 2017 berpotensi lahir kembali pada putaran kedua di saat paslon yang bertarung tinggal 2. Polarisasi ekstrem pada saat ini belum terlalu muncul karena paslon masih ada 3," kata Qodari.

"Namun kondisi akan berubah cepat pada putaran kedua karena akan tercipta kondisi head to head, zero sum game di antara dua kandidat tersisa. Isu-isu primordial seperti ras dan agama akan muncul dan menimbulkan ketegangan yang bahkan mungkin lebih buruk dibanding pilpres 2014 dan 2019," Qodari menambahkan.

Qodari menyebut paslon Prabowo-Gibran menjadi kandidat dengan dukungan suara tertinggi, mencapai 45 persen menurut beberapa lembaga survei pada awal Desember 2023. Hanya diperlukan tambahan suara sekitar 6-7 persen agar tercapai kondisi pilpres sekali putaran pada 14 Februari 2024. Dengan dukungan para pendukung Jokowi di seluruh

Indonesia, GSP optimis target ini realistis dan dapat dicapai.

Toh Sandiaga Salahuddin Uno, politisi yang pernah bersanding sebagai duet Anies memenangi Pilkada DKI Jakarta 2018 memprediksi Pilpres 2024 akan berlangsung dua putaran. "Survei yang kami miliki memang tidak di-publish, tapi sudah disampaikan data TPN menunjukkan bahwa persaingan antara dua kandidat teratas ini, perlu kerja keras untuk bisa memastikan keunggulan kita," ujar Sandi yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Berbicara di Kantor DPP PPP, Minggu, 12 November 2023, Sandi mengemukakan, dengan situasi sekitar 20 persen yang belum menentukan pilihan, secara realistis Pilpres 2024 sangat terbuka akan berlangsung dua putaran.

Ia mengemukakan setiap peserta Pilpres memiliki survei internalnya masing-masing. Survei itu, katanya, tidak akan disebarluaskan. "Ya kalau survei internal itu saya yakin, ini semua kontestan punya survei yang tidak akan pernah mereka publish dan itu adalah gambaran yang real," ungkap Sandi yang masih menduduki jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Lebih dari itu, Sandi juga melihat dua putaran Pilpres akan berdampak positif bagi sektor yang menjadi ranah kementeriannya: Parekraf. Terlebih lagi, sektor parekraf sedang mengalami pertumbuhan pesat pasca wabah Covid-19 mulai mereda pada 2021.

"Kenaikan jumlah wisatawan mancanegara pada 2022 mencapai 5,89 juta kunjungan atau naik 278 persen dari 2021, dan pada 2023 akan bisa naik hingga double digit mencapai 11-11,5 juta," kata Sandi.

Bank Indonesia juga, kata Sandi, mencatat devisa dari pariwisata jasa perjalanan sebesar USD 6,72 miliar pada 2022. Jumlah wisman terbesar berasal dari Malaysia, Australia, Singapura, China dan Timor Leste. "Capaian wisatawan nusantara sebesar 433 juta perjalanan dan meningkat 12,57 persen dari 2022. Subsektor mode busana (fashion) masih menjadi kontributor utama ekspor produk ekraf yang disusul kuliner, dan kriya," kata dia lagi.

Toh perhelatan politik Pilpres, Pemilu, dan Pilkada yang semuanya berlangsung pada 2024 sempat memunculkan kekhawatiran akan lesunya kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) yang men-



jadi bagian tak terpisahkan dari sektor pariwisata. Yang dapat menjadi kendala di tahun politik antara lain adalah perizinan, anggaran pengadaan acara yang berkurang, dan kalangan usaha yang cenderung menahan diri pada tahun politik.

Sedangkan Sandi mengemukakan, para pelaku industri MICE tidak perlu khawatir, lantaran kondisi yang terjadi sudah menjadi bagian dari proses demokrasi yang perlu dihadapi. "Justru dengan adanya dua putaran lebih banyak kegiatan, dan tentunya kegiatan politik itu semuanya diadakan di industri MICE, baik di hotel, gedung pertemuan, dan lain sebagainya," ujar Sandi, di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.

Sementara untuk di Indonesia, secara spesifik Sandi menyebut bahwa nantinya pake wisata demokrasi akan ditawarkan untuk kalangan wartawan dunia dari berbagai negara, serta peneliti. "Kita sudah dapat permintaan dari beberapa wartawan juga dari beberapa peneliti ingin datang ke Indonesia untuk mengamati proses demokrasi kita. Ini bagian dari wisata demokrasi. Kami berharap 500-1.000 lebih jumlah orang yang akan datang ke Indonesia untuk memantau demokrasi kita," ujarnya.

Lebih rinci, Sandi memastikan paket wisata demokrasi ini akan semakin mungkin dimanfaatkan untuk memperkenalkan sejumlah destinasi terutama yang berada di desa-desa

dasarkan tren di 2023 dan tren di 2024 peluangnya ada. Apa saja? Yang pasti nanti ada pemilu, pesta demokrasi di Februari mendatang," kata dia dalam acara Tiketcom National Webinar, Rabu, 13 Desember 2023.

"Biasanya sih, proyeksinya selalu pada saat-saat tahun pemilu kontribusi signifikan ada pada sektor pariwisata. Karena ada banyak kampanye dan perpindahan orang dan lain-lain," dia menambahkan.

Ia melihat terjadi peningkatan permintaan yang signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. "Dan ini tercermin dalam pemesanan di Tiketcom pada 2023 dan ditambah periode Nataru tahun ini. Ini sangat menarik nanti akan ada reportnya juga, trennya seperti apa," kata Gaery.

Lonjakan minat wisata serta pemulihan industri, kata dia, bergerak sangat pesat terutama di sepanjang 2023. "Jadi setelah pandemi recovery menunjukkan potensi yang besar masih ada banget di tahun 2024 di industri pariwisata ini," ungkapnya.

Dari sisi fiskal (anggaran), alokasi untuk Pemilu 2024 mencapai Rp71,3 triliun, terbagi ke dalam tiga tahun anggaran. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Bagian Bendahara Umum Negara (Polhukam dan BA BUN) Dwi Pudjiastuti Handayani menjelaskan, alokasi tersebut naik sekitar 57,3 persen dibanding anggaran Pemilu 2019 yakni sebesar Rp45,3 triliun.

"Meskipun UU yang digunakan sama yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat peraturan terkait yang mengalami perubahan, misalnya adanya perubahan berupa kenaikan honorarium Badan Adhoc. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengalami kenaikan honorarium terbesar hingga 104 persen," jelas Dwi Pudjiastuti.

Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmawarta menegaskan bahwa alokasi anggaran Pemilu adalah investasi dari tatanan kehidupan berpolitik dan demokrasi di Indonesia. Menurut Isa, keberhasilan Pemilu 2024 mendatang akan menghasilkan suksesi kepemimpinan nasional dan daerah yang legitimate. Dan stabilitas politik ini tentu



Tambahan pula, Sandi mengemukakan rangkaian pemilihan demokratis pada 2024 akan membuka peluang wisata demokrasi. Wisata demokrasi atau wisata pemilu merupakan paket khusus yang menggabungkan tamasya tradisional dan akses ke kampanye politik. Dalam paket tersebut, para wisatawan diajak untuk mengunjungi kampanye politik di setiap daerah dan berinteraksi dengan politisi lokal.

Contoh tingginya peminat konsep wisata demokrasi sendiri dapat dilihat dari keberhasilan yang terjadi di India pada 2012. Kala itu, paket wisata yang berlangsung dalam kurun waktu satu minggu berhasil menggaet 3.500 peminat.

wisata, sehingga para wartawan atau peneliti mancanegara selain memantau demokrasi yang berjalan juga dapat mengenal destinasi dan desa wisata di Indonesia lebih dalam.

Senada dengan itu, Co-Founder & Chief Marketing Officer Tiketcom, Gaery Undarsa mengemukakan pemilu serentak akan menyumbang pergerakan besar pula untuk sektor perjalanan. Menurut dia, musim kampanye hingga pencoblosan pada 14 Februari 2024 akan banyak sekali pergerakan menggunakan pesawat juga moda transportasi lainnya.

Tak hanya itu, partisipan hingga simpatisan juga membutuhkan akomodasi juga kuliner dalam prosesnya. "Jadi ber-

menjadi garansi bagi pembangunan nasional di berbagai sektor.

"Penyelenggaraan Pemilu sendiri menggeliatkan semua sektor kehidupan masyarakat. Tidak hanya sosial dan politik, juga sektor ekonomi," tutur Isa.

Sektor produksi dan distribusi kian bergairah karena adanya kebutuhan pengadaan logistik, serta barang dan jasa. Daya beli masyarakat juga naik seiring dengan adanya belanja dan konsumsi dari tingkat pusat sampai dengan Badan Adhoc yang menerima honor Pemilu. Selain itu, kegiatan kampanye dari para peserta Pemilu juga turut memutar roda ekonomi masyarakat.

Katakanlah misalnya anggaran penyelenggaraan pemilu bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 27,39 triliun dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 11,6 triliun. Anggaran belanja ini akan tersalurkan ke sektor-sektor ekonomi semisal percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen dan tekstil.

Usaha percetakan, periklanan, dan media akan meningkat lantaran pada masa kampanye para calon akan banyak menggelontorkan uang di media cetak, elektronik, media luar ruang, daring, pamflet, baliho, dan lain-lain. Ini untuk meningkatkan popularitasnya di masyarakat.

Sektor transportasi dan logistik juga diperkirakan mengalami lonjakan karena saat kampanye akan banyak mobilisasi massa sehingga akan ada belanja transportasi dan logistik. Pada saat yang sama, permintaan makanan dan minuman juga akan meningkat seiring dengan massa tersebut membutuhkan konsumsi. Begitu juga dengan sektor garmen akan memperoleh permintaan untuk membuat kaus atau busana bergambar logo partai maupun para calon tersebut.

Sedangkan Juru Bicara Tim

Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Hasan Nasbi, mengemukakan, semua paslon capres-cawapres memungkinkan untuk menang satu putaran di Pilpres 2024. Namun diantara capres lain, Prabowo-Gibran dinilai memiliki peluang yang lebih besar.

"Di antaranya semua kandidat secara bersamaan punya ide yang sama, mau satu putaran dan mereka yang menang. Tidak apa, itu wajar. Kita juga ingin satu putaran. Bedanya kita tidak apa mereka satu putaran, mereka yang masalah kalau kita narasikan satu putaran, dibilangnya curang lah. Hatinya beda, kotor berarti," kata Hasan dalam keterangannya, di acara Nongki Repnas bertajuk 'Menakar Pilpres Satu Putaran: Sisi Ekonomi Politik dan Efisiensi Anggaran', Senin, 18 Desember 2023.

Hasan mengatakan, berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei terkait elektabilitas masing-masing paslon, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-

Mahfud MD menunjukkan rata-rata di angka 20 persen. Sementara itu, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 35-46 persen.

Dengan jumlah ini, Hasan menilai calon yang paling memungkinkan menang satu putaran adalah pasangan Prabowo-Gibran. "Kalau kita bicara chance menurut saya 85-90 persen peluang satu putaran untuk Prabowo-Gibran. Apakah pasangan Anies bisa satu putaran? Bisa, tapi lebih kecil peluangnya karena angkanya masih kecil. Apakah Mas Ganjar bisa? Tentu bisa, tapi peluang lebih kecil karena angkanya masih kecil. Yang sama-sama besar peluangnya adalah Prabowo-Gibran satu putaran. Pasangan Anies dan Mas Ganjar bisa kalah satu putaran," ujarnya.

Sedangkan Panel Ahli dari Katadata Insight Center Mulya Amri yang turut hadir dalam acara mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang ia lakukan, sejauh ini pemilih PDIP dapat beralih kepada capres nomor urut 2 Prabowo-Gibran. "Dan ternyata di situ jawabannya 58 persen iya. Jadi masih ada kemungkinan dari pihak Prabowo-Gibran terus menarik simpati dari pemilih PDIP," ujar Mulya.

Jadi, sambungnya, masih ada ruang Prabowo-Gibran punya banyak peluang. "Bahkan saya bilang untuk mengambil kantong-kantong tadi. Jadi ada kemungkinannya untuk naik ke atas, ada.

Sama seperti paslon-paslon lain ada kemungkinan naik ke atas, tapi kalau kita lihat secara statistik paling memungkinkan ya paslon Prabowo-Gibran," ungkap Mulya.

Alhasil, soal Pilpres 2024 itu akan berlangsung satu atau dua putaran, tergantung pula pada usaha para pasangan kandidat. Kita akan lihat hasilnya setelah Hari H pemungutan suara 14 Februari 2024. ●



REPUBLIK KORUPSI

Oleh: Suwidi Tono

Ketua Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi 2019-2022
Koordinator Forum Menjadi Indonesia

Tanggal 9 Desember 2023 tepat dua dekade deklarasi Konvensi Antikorupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC). Merayakan momen bersejarah itu, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2023 mengusung tema "Dunia Bersatu Melawan Korupsi" (Uniting the World Against Corruption).

Indonesia turut meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003) pada 18 April 2006. Konsekuensinya, Indonesia wajib menyesuaikan peraturan dan UU-nya berdasarkan kesepakatan bersama dan berlaku universal.

Namun, sampai sekarang, kita masih menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Nomor 20 Tahun 2001 (perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999) untuk menjerat koruptor. UU Tipikor itu juga banyak merujuk pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) lama karena penerapan KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) akan berlaku tahun 2026.

Lambannya penyesuaian UU dan peraturan nasional sesuai UNCAC membuktikan ketidakseriusan negara (legislatif dan eksekutif) dalam mereformasi payung hukum pemberantasan korupsi. Desakan dan kritik atas hal ini pernah menguat ketika DPR justru memprioritaskan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 dan mengesahkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketimbang memperbarui UU Tipikor.

Dari 11 kejahatan korupsi rumusan UNCAC, terdapat lima jenis yang bersifat mandatory offences (wajib dan mengikat negara peserta), yakni bribery of national public officials (penyuapan terhadap pejabat-pejabat publik nasional); bribery of foreign public officials and officials of public international organizations (penyuapan pejabat-pejabat publik asing dan organisasi internasional).

Selain itu, embezzlement, misappropriation other diversion of property by a public officials (penggelapan, penyelewengan, pengalihan kekayaan oleh pejabat publik); laundering of proceeds of crime (pencucian hasil kejahatan); dan obstruction of justice (perbuatan menghalang-halangi proses peradilan).

Sementara itu, enam perbuatan korupsi yang bersifat non-mandatory offences atau belum menjadi kesepakatan negara peserta UNCAC adalah trading influence (memperdagangkan pengaruh); abuse of function (penyalahgunaan wewenang); illicit enrichment (memperkaya secara tidak sah); bribery in the private sector (penyuapan di sektor swasta); embezzlement of property in the private sector (penggelapan kekayaan di sektor swasta); dan concealment (penyembunyian).

Sejak 2015, Indonesia mengalami kemunduran implemen-

tasi UNCAC. Ada tiga penyebab sebuah negara tidak mematuhi perjanjian internasional kendati sudah meratifikasinya, yakni ambiguity, limitation on capacity, dan temporal dimension (Abram Chayes & Antonia Handler Chayes, 1995: The New Sovereignty Compliance with International Regulatory Agreements).

Dari tiga indikator ketidakpatuhan itu, dua indikator paling mencolok, yaitu ambiguitas dalam beberapa jenis kejahatan korupsi yang belum dikriminalisasi oleh hukum Indonesia dan kapasitas pembuat regulasi yang belum mengharmonisasikan UNCAC ke dalam hukum nasional sehingga penegakan hukum tidak maksimal.

Kesenjangan payung hukum nasional-internasional menyulitkan penindakan dan kerja sama internasional untuk menghukum pelaku korupsi yang tegas dinyatakan UNCAC sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime).

Agenda perubahan dan penyempurnaan UU Tipikor agar segera mengacu pada UNCAC belum jadi kebutuhan mendasak meski korupsi berkembang merajalela. Kelambanan itu membuat tidak terpenuhinya tujuan dan hakikat pembentukan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan (Gustav Radburch, 1946).

Korupsi Politik

Setelah 25 tahun reformasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi meluncur ke titik nadir. Sederet petunjuk dan fakta menguatkan hal ini. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2022 skornya merosot dan terburuk dalam sejarah.

Penyumbang penurunan drastis IPK (dari skor 38 tahun 2021 menjadi 34 tahun 2022) mencakup International Country Risk Guide (turun dari skor 48 ke 35), World Competitiveness (dari skor 44 ke 39), dan Asia Risk Guide (dari skor 32 ke 29). Ketiga variabel itu menggambarkan kenaikan risiko politik, finansial, dan ekonomi di Indonesia.

Kredibilitas dan integritas KPK yang sebelumnya menjadi tumpuan pemberantasan korupsi dan selalu mendapatkan kepercayaan publik tertinggi perlahan memudar akibat proses penjarangan calon komisioner yang bermasalah sedari awal, serta merebaknya konflik kepentingan dan krisis etika yang melanda KPK.

Sepanjang periode 2004-2023, lebih dari 530 politikus (kepala daerah dan anggota legislatif) terjerat korupsi. Sejak 2004 sampai November 2023 tercatat 1.479 kasus korupsi yang telah ditangani KPK.

Modus penyuapan mendominasi (65,34 persen), disusul korupsi pengadaan barang dan jasa 22,36 persen, pencucian uang 3,99 persen, penyalahgunaan anggaran 3,85 persen, pemerasan 1,89 persen, perizinan 1,9 persen, dan perintangan penyidikan 0,88 persen.

Empat menteri di era Presiden Megawati Soekarnoputri, lima menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan enam menteri era Presiden Joko Widodo tersangkut korupsi.

Di luar eksekutif dan legislatif, sejumlah pejabat tinggi negara di beberapa institusi (Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Bank Indonesia) juga terseret kasus korupsi.

Semakin rentannya institusi negara terjangkit praktik korupsi antara lain karena pemilihan personelnya dijamin lewat proses dan mekanisme politik, mengesampingkan prinsip dan rekam jejak integritas.

Korupsi juga semakin merasuk ke pelosok daerah. Jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melakukan kejahatan korupsi dana desa selama 2012-2021 tercatat 686 orang dari 601 desa. Hal ini terasa menyedihkan mengingat tujuan alokasi dana desa (total Rp470 triliun sepanjang 2015-2022) adalah untuk meng-

tasi kemiskinan. Kendati belum ada studi komprehensif, gejala kolusi dan nepotisme yang menyertai perilaku korup tampak nyata pada sebagian besar kasus penangkapan pejabat daerah. Pola perekrutan pejabat eselon—sekali pun telah menggunakan sistem lelang—hasil akhirnya sering menafikan prinsip meritokrasi dan sebaliknya lebih mengutamakan faktor kekerabatan, kedekatan, kepentingan.

Singkatnya, KKN tumbuh subur akibat pemilu biaya tinggi dan sarat transaksi. Semua uraian ini membawa kita pada kesimpulan bahwa korupsi politik semakin mewarnai peta bumi kejahatan kemanusiaan di republik ini.

Krisis "Nation"

Kita mengalami krisis politikus cum negarawan dan intelektual par-excellence yang mencukupi untuk mengoreksi sengkabut bernegara dan berdemokrasi agar tegak lurus dengan modus vivendi (kesepakatan luhur) pendiri bangsa sebagaimana terkandung dalam Preambul UUD 1945.

Muara krisis ini bersauh, membentuk endapan katastrofik mengkhawatirkan, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, menjauhnya cita-cita keadilan dan kesejahteraan, dan semakin mengguritanya KKN.

Kita kehilangan kesadaran berbangsa (nation), sibuk dan fokus pada urusan negara (state). Urusan nation berangkat dan bersumber dari budaya dan peradaban, sedangkan state berangkat dari politik dan kekuasaan. Keduanya selama ini tak seiring-sejalan, sehingga demokrasi berbasis kedaulatan

rakyat dan penghormatan atas hukum (nomokrasi) kehilangan fondasinya.

Konsepsi demokrasi sebagai pertautan eklektik nation-state tak mengejawantah dalam gegap gempita kontestasi politik. Perebutan kekuasaan (power game)—termasuk dengan mengoyak persatuan—lebih kentara ketimbang politik yang mengabdikan kepentingan publik.

Kelalaian memupuk dan merawat nation itu juga menimbulkan perselingkuhan dan aneka praktik yang memungguangi adab dalam berbangsa dan bernegara.

Pada tataran legislasi, misalnya, Mahkamah Konstitusi menerima 1.720 pengajuan uji formil, materiil, dan gabungan keduanya selama 2003-2023. Banyaknya pengajuan judicial review itu mencerminkan proses pembuatan dan pengesahan produk hukum mengabaikan asas transparansi dan akuntabilitas.

Contoh jelas cacat pembuatan produk hukum yang menuai

protes keras dan meluas adalah revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja. Kedua UU itu ditengarai mengingkari aspirasi pengampu kepentingan, dibuat secara "tertutup" dan dalam tempo sangat singkat.

Dalam hubungan ini, kewenangan membuat, membahas, dan menentukan lahirnya UU yang sepenuhnya tergantung eksekutif dan legislatif

membuka peluang malapraktik berupa kompromi, transaksi, dan bahkan kebuntuan.

Sistem bikameral dan proses deliberasi publik terukur dapat mengurangi atau menutup celah pembuatan produk hukum bermasalah. Faktanya, walau DPD terbentuk tahun 2004, eksistensi dan wewenangnya sama sekali tak signifikan dalam proses legislasi. Implementasi UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga belum mengutamakan kanal aspirasi kepentingan publik sebagai konsiderans penting.

Waktu seperempat abad menghadirkan refleksi, mengapa amanat utama reformasi—pemberantasan KKN—yang diperjuangkan semua komponen bangsa dengan pengorbanan besar itu malahan berbuah sebaliknya, sehingga acapkali memunculkan tagar #ReformasiDikorupsi# dalam banyak demo dan aksi mahasiswa serta masyarakat.

Apa yang dapat diharapkan dari republik dengan kondisi dan praktik korupsi yang kian menggerus martabat bangsa? Jawabannya bergantung pada kesungguhan dan kemauan kita mengoreksi sistem dan praktik politik, serta tatanan bernegara yang jauh melenceng dari cita-cita luhur pendiri republik. •





RAIH PERINGKAT 1 TERBAIK IGA REGIONAL SUMATERA

Provinsi Sumatera Selatan menerima penghargaan terbaik dari Innovative Government Award (IGA) tahun 2023 dalam kategori Skor Tertinggi Regional I. Provinsi Sumatera Selatan juga meraih nilai tertinggi Pulau Sumatera. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengaku sangat bangga atas pencapaian Provinsi Sumatera Selatan.

Bahkan Provinsi Sumatera Selatan meraih dua kategori yang berbeda, yaitu kategori Provinsi Terinovatif dan kategori skor tertinggi Regional I.

"Sumatera Selatan mendapat penghargaan IGA yang terinovatif nomor satu untuk kategori provinsi. Jadi mendapat penghargaan IGA terbaik untuk kategori provinsi," ucap Fatoni usai menerima penghargaan tersebut di Gedung H, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta,

Sebelumnya Provinsi Sumatera Selatan telah meraih penghargaan IGA tiga tahun berturut-turut pada kategori Provinsi Terinovatif, yaitu pada tahun 2021, 2022 dan 2023. Tercatat pada tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan 214 inovasi baru dan diantaranya menjadi program unggulan.

"Ada sejumlah inovasi yang digital dan non digital. Salah satu unggulannya adalah Sumsel Tanggap dari Di-

nas Kesehatan, kemudian Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dan lain-lain," kata Fatoni.

Fatoni mengatakan Provinsi Sumatera Selatan terus melakukan pembinaan, sosialisasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan unit kerja terkait termasuk Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan inovasi. Setelah inovasi dilakukan, mendorong para OPD untuk terus mengupdate dan mengupgrade inovasi tersebut.

"Jadi tidak berhenti sampai inovasi saja tapi itu juga perlu dimaintain tiap tahun agar bisa ikut lomba-lomba lagi dan inovasi itu tidak berhenti. Tujuannya adalah untuk menciptakan agar Sumsel itu menjadi budaya, sistem iklimnya itu inovatif," jelas Agus Fatoni.

"Inovasi tak akan berhenti karena inovasi ini merupakan solusi untuk menyelesaikan persoalan dan mengembangkan pelayanan," lanjutnya.

Sumsel Tanggap dan GSMP

Provinsi Sumatera Selatan terus menerus membuat inovasi unggulan guna memajukan kesejahteraan masyarakat. Tercatat pada tahun 2023 Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan 214 inovasi baru dan diantaranya menjadi program unggulan.

Program unggulan tersebut di antaranya Sumsel Tanggap dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Kedua program itu membantu Pemprov Sumsel meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) Tahun 2023 yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Fatoni menjelaskan program Sumsel Tanggap merupakan inovasi bidang pelayanan kesehatan dalam penanggulangan gawat darurat medis. Aplikasi ini, lanjutnya, juga terintegrasi dengan Polda Sumsel dan cukup menghubunginya di nomor 119.

Sementara Gerakan Sumsel Mandiri Pangan merupakan inovasi bidang pangan yang bertujuan menekan angka kemiskinan dan tengkes juga menjaga inflasi.

Menurut Agus Fatoni, tujuan program ini dapat memberi manfaat luas dan menjadi contoh bagi daerah lainnya.

Gerakan Sumsel Mandiri Pangan merupakan gerakan yang mengajak masyarakat menjadi petani pemula dengan menanam sejumlah komoditas pangan di pekarangan rumah. Sejumlah bantuan pun diberikan, seperti bibit dan sarana tanam.

Sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah, program ini sudah tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 22 Tahun 2022.

Lampaui Angka Nasional

Keberhasilan Sumsel dalam inovasi pangan bisa dilihat dari Badan Pangan Nasional (BPN) yang merilis data skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional yang dikonsumsi masyarakat Sumatera Selatan mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2023 skor PPH penduduk Sumsel mencapai angka 94,2 persen atau lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 94,1 persen.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel Ruzuan Efendi mengatakan sejak tahun 2022 Provinsi Sumsel telah menduduki peringkat keempat juga di atas rata-rata nasional. Sebagaimana diketahui, skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan.

"Jika skor PPH semakin mendek-

untuk mensosialisasikan pentingnya penerapan gizi pangan. Terlebih peningkatan ini juga sebagai indikator untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan relevansi penurunan angka stunting.

"Masyarakat Sumsel tidak hanya mengonsumsi karbohidratnya saja, namun ada buah-buahan, sayuran, protein, nabati, dan juga hewani," ucap Ruzuan.

Menurutnya, capaian skor PPH konsumsi masyarakat ini juga merupakan



ti 100, maka konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi seimbang. Alhamdulillah sekarang bisa bertahan, ini kan PPH ini keberagaman konsumsi pangan, bahwa kita sudah mendekati ideal untuk konsumsi pangan," jelas Ruzuan.

Ruzuan mengungkapkan, Pemprov Sumsel melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terus berupaya

akumulasi dari berbagai upaya dalam meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

"PPH konsumsi ini berarti kita juga sudah memenuhi urutan gizi, dari setiap tahun bergerak. Karena itu kita mengajak masyarakat untuk menjaga pola konsumsi karbohidrat, protein dan sebagainya secara berimbang," kata Ruzuan. •rhd/***

SIAGA HADAPI BENCANA ALAM AKHIR TAHUN

Perubahan suhu dan musim membuat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan selalu menjaga kesiapsiagaan. Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni bahkan mengimbau seluruh warga untuk mewaspadaai bencana tanah longsor dan banjir.

Untuk mewaspadaai hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan rutin menggelar apel Kesiapsiagaan Personel dan Peralatan Penanggulangan Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera Selatan. Apel ini rutin dilakukan Pemprov Sumsel guna mengantisipasi adanya bencana alam tersebut.

Fatoni mengatakan apel kesiapsiagaan penanggulangan bencana perlu dilakukan untuk mengetahui kesiapan personel dan peralatan sebagai bagian dari upaya pencegahan dalam menghadapi bencana.

"Dengan kesiapan ini diharapkan dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dari ancaman bencana, walaupun kita juga berharap bencana itu tidak terjadi," kata Fatoni.

Sebagaimana diketahui, Provinsi Sumatera Selatan baru saja berhasil melewati situasi cukup berat karena diterpa

kabut asap yang ditimbulkan oleh Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kondisi tersebut sudah teratasi menyusul beralihnya cuaca dari musim kemarau ke musim hujan.

"Namun dibalik curah hujan yang tinggi terdapat ancaman baru yakni bencana banjir bandang dan tanah longsor yang kapan saja datang mengancam beberapa wilayah di Provinsi Sumsel," ucap Fatoni.

Fatoni tak hentinya mengingatkan seluruh personel satgas penanggulangan bencana untuk tetap waspada serta memberikan edukasi dan peringatan dini kepada masyarakat di daerahnya masing-masing.

"Kondisi ekologi seperti degradasi alam, perilaku manusia ini dapat kita perbaiki, namun ini tidak bisa kita kerjakan secara sendiri sendiri kita perlu bersama secara komprehensif untuk mengatasinya," kata Fatoni.

Fatoni menekankan agar mitigasi ter-

us dilakukan untuk mengurangi resiko jika terjadi bencana banjir dan tanah longsor.

Dia menyebut, berdasarkan data kejadian bencana yang terjadi di Provinsi Sumsel pada Tahun 2022 sebanyak 147 kali kejadian. Sedangkan hingga November 2023 tercatat sebanyak 69 kali kejadian bencana.

"Mudah-mudahan dengan kesiapsiagaan kita, bencana ini tidak bertambah lagi, walaupun terjadi kita berharap tidak menimbulkan sampai menimbulkan kerusakan sarana prasarana dan korban jiwa," tandasnya.

Selain menyiapkan personel dan peralatan, edukasi kepada personel gabungan yang terdiri dari Badan SAR Nasional (BASARNAS), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI/Polri dan berbagai stakeholder terkait mengenai mobilisasi menuju ke lokasi bencana atau daerah rawan juga dilakukan.



Hal ini guna mempermudah proses evakuasi untuk meminimalisir dampak bencana berupa kerusakan sarana prasarana maupun korban jiwa.

Luncurkan Aplikasi Songket

Selain siaga banjir dan tanah longsor, Pemprov Sumsel juga tetap waspada terjadinya kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Sebagai bentuk kewaspadaan itu Pemprov Sumsel

memanfaatkan teknologi digital dengan meluncurkan aplikasi yang disebut Sistem Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Terpadu Provinsi Sumatera Selatan atau Songket.

Penjabat Gubernur Sumsel, Agus Fathoni, menjelaskan aplikasi Songket ini digagas bersama Polda Sumsel, World Resources Institute (WRI) Indonesia, dan Forum DAS Sumsel. Dimana aplikasi ini merupakan sistem informasi berbasis WebGIS untuk deteksi dini Karhutla.

"Melalui Songket Sumsel, maka pengambilan keputusan dalam pencegahan dan pemadaman serta penegakan hukum karhutla di Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih efektif dan efisien karena lebih mudah, lebih murah, dan lebih cepat," katanya.

Dalam aplikasi Songket, terdapat berbagai informasi yang terupdate. Mulai dari informasi titik panas terbaru, informasi prakiraan cuaca serta arah dan kecepatan angin terkini mulai dari analisis titik panas, analisis jarak lurus terdekat (Euclidean Distance) dan titik panas.

Kemudian lokasi posko pengendalian dan sumber air. Aplikasi Songket juga berisi analisis akses jalan serta rute terdekat (routing analysis), dan waktu tempuh terhadap titik panas serta analisis data spasial yang bersumber dari eksternal data seperti GPS.

Aplikasi Songket diluncurkan pada Mei 2021 oleh Gubernur Sumsel Herman Deru, dan dilanjutkan oleh Agus Fathoni karena terbukti bermanfaat dan mempermudah penanganan ataupun pencegahan karhutla.

Saat peluncuran, dua tahun silam, Herman Deru menjelaskan nama aplikasi Songket dipilih sesuai wastra karya kearifan lokal Sumsel. Melalui aplika-

si ini, masyarakat bisa menjadi pelapor yang langsung dapat diterima oleh petugas yang ada di command center lengkap dengan titik koordinat dan titik akses menuju lokasi.

Pada berbagai kesempatan, Pem-

Karhutla di polres-polres di Kecamatan untuk patroli guna mencegah terjadinya kebakaran hutan maupun lahan," ujar Kapolda Sumsel, Irjen Pol. Eko Indra Heri.

Eko Indra berharap aplikasi Songket



prov Sumsel menggandeng aparat keamanan untuk mensosialisasikan Songket kepada masyarakat. Misalnya seperti dinukil dari Tribrata News, Kepolisian Daerah Sumsel menyebutkan bahwa implementasi Songket dibandingkan dengan tim Drone Squad Karhutla.

"Kita membentuk tim Drone Squad

menjadi tren bagi daerah lain, terutama daerah yang rawan terjadi karhutla.

"Aplikasi ini baru satu-satunya di Indonesia. Bahkan ketika ada report dari masyarakat di lapangan, operator langsung mengetahui jarak dan rute terdekat untuk akses ini, berikut lokasi sumber air dan posko terdekat," kata dia. •

FOKUS DALAM PENANGANAN PROGRAM PRIORITAS

Ada misi penting yang diemban Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni selama bertugas. Misi penting berupa program prioritas itu akan bisa terlaksana bila semua elemen mulai dari pemerintah, masyarakat, Forkopimda serta komunitas bersama-sama melaksanakannya.

Program prioritas tersebut di antaranya penanganan stunting, inflasi, kemiskinan ekstrem dan menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 mendatang. Untuk Pj Agus Fatoni

mengingatn para Camat, lurah dan kepala desa (Kades) se-Sumsel tetap fokus dalam penanganan program prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel.

"Penanganan Karhutla di Sumsel mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Bahkan Sumsel berkesempatan memberikan persentase keberhasilan penanganan Karhutla di tingkat internasional yang dilaksanakan di Dubai baru-baru ini," kata Fatoni.

"Kita juga bersyukur kita telah mampu melewati masa-masa sulit. Namun di hadapan kita masih ada pekerjaan rumah (PR) juga tanggung jawab bersama. Ada

Kades sangat penting karena mengetahui persis warganya yang stunting. Sehingga penanganannya juga tepat," imbuhnya.

Fatoni berharap seluruh stakeholder terus bergerak melakukan upaya konkret dan terukur. Dia meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hingga kelurahan serta dunia usaha agar menjadi orang tua asuh bagi penderita stunting dan kemiskinan ekstrem sehingga penanganannya dapat tepat sasaran.

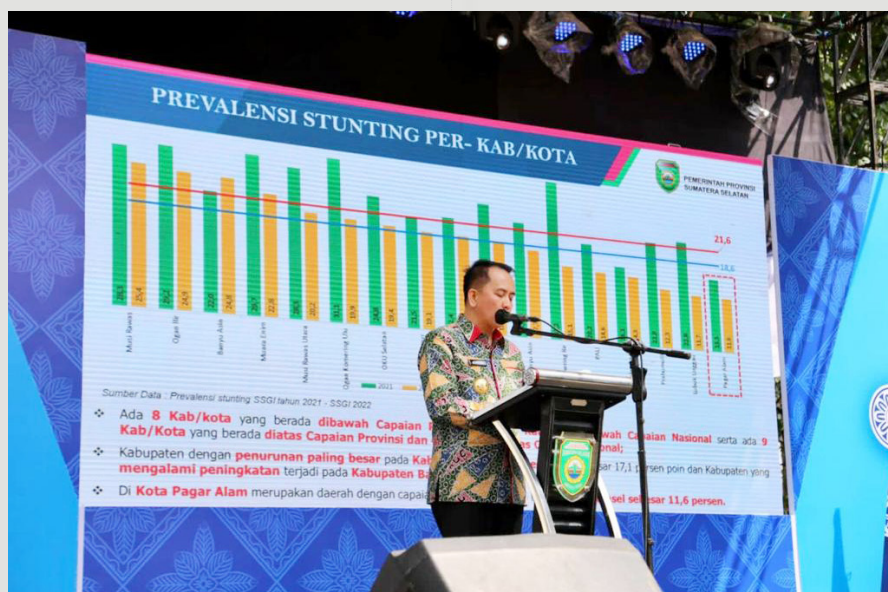
"Lurah dan Kades mengetahui persis masyarakatnya dan kita akan menjadi mereka yang stunting dan miskin ekstrem ini menjadi anak asuh," terangnya.

Selain itu, terkait dengan Pemilu dan Pilkada, Fatoni memberikan atensi khusus kepada jajaran Pemerintahan hingga tingkat RT/RW untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Dia meminta agar tetap menjaga kondusifitas wilayah masing-masing daerah sehingga Sumsel zero konflik tetap terjaga.

"Kita harus tetap jaga Sumsel yang zero konflik. Kita harus terjaga Sumsel dengan damai, kita sudah banyak capaian prestasi dan cukup baik, kemajuan daerah sudah cukup baik. Namun masih perlu kita tingkatkan, kita terus jaga nama baik Sumsel yang kondusif ini, kita pelihara dan jaga agar Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan aman, nyaman dan sukses," tandasnya.

Targetkan Sumsel Zero Stunting

Sebagai bentuk komitmennya terhadap program prioritas ini, Agus Fatoni menargetkan wilayah Sumatera Selatan menjadi zero stunting. Untuk mencapai target itu dia mengajak seluruh stakeholder untuk bahu-membahu melaku-



"Camat, Lurah dan Kades merupakan garda terdepan pemerintahan karena sehari-hari bertemu dengan masyarakat dalam hal penanganan penanganan stunting, penanganan inflasi, kemiskinan ekstrem dan menyukseskan Pemilu 2024," ucap Fatoni dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Camat, Lurah dan Kades se-Sumsel di Palembang.

Fatoni menilai sejauh ini program prioritas telah berjalan dengan baik di Sumsel utamanya penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

inflasi yang harus kita tangani bersama, masyarakat komponen dan seluruh lapisan masyarakat bergerak untuk menangani inflasi," sambungnya.

Selain itu, pada saat kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Sumsel bulan Oktober 2023 lalu Pemerintah Provinsi Sumsel mendapat apresiasi atas penanganan inflasi. Sehingga dia mengajak para Camat, Lurah dan Kades untuk lebih fokus lagi agar inflasi tetap terjaga.

"Selain itu penanganan stunting kita terus bergerak, peran Camat, Lurah dan

kan penanganan stunting secara masif guna mencapai target tersebut.

"Saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bank Sumsel Babel (BSB) atas program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung jawab Sosial dalam penanganan stunting. Kita harapkan zero stunting bisa dicapai bersama," kata Fatoni saat kegiatan Launching Program Pencegahan Stunting BSB dan Peresmian Kawasan Taman Apung di Kota Pagar Alam.

Fatoni mengatakan penanganan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan kerjasama seluruh pihak.

"Target Bapak Presiden Joko Widodo di tahun 2024 untuk stunting ini turun menjadi 14 persen. Mudah-mudahan bisa kita capai dan di Sumsel hasilnya lebih rendah dari angka nasional," ucap Fatoni.

"Target nasionalnya sudah tercapai, tetapi kita harapkan target Sumsel zero stunting juga bisa dicapai. Saat ini Sumsel berangsur-angsur mendekati target nasional bebas stunting," sambungnya.

Fatoni menilai permasalahan stunting bukan hanya masalah pertumbuhan anak balita akibat kurangnya asupan gizi. Namun, jika dalam panjang nantinya akan berdampak pada menurunnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mendatang jika tak segera diatasi.

"Bonus demografi di depan mata kita, justru akan menjadi penghambat pembangunan apabila tidak memiliki generasi cerdas yang mampu menjawab tantangan persaingan SDM baik di tingkat lokal, nasional dan global. Artinya masalah stunting adalah masalah yang sangat penting, masalah besar, masalah bersama, masalah yang menentukan keberlanjutan bangsa dan manusia," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, Kota Pagar Alam menjadi wilayah di Provinsi Sumsel yang memiliki prevalensi stunting terendah atau sebesar 11,6 persen. Menuutnya, Kota Pagar Alam memiliki capaian positif terkait dengan penurunan stunting, hal tersebut tidak terlepas dari karakteristik wilayah ini yang mempunyai Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, memiliki ketersediaan sumber pangan yang berlimpah dan destinasi

wisata yang indah.

"Kami apresiasi Kota Pagar Alam yang telah melakukan penanganan stunting, kemiskinan ekstrim dan inflasi. Ini harus kita pertahankan dan perlu kita tingkatkan," tutupnya.

Dalam kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Walikota Pagar Alam Lusapta Yudha Kurnia mengatakan pembangunan Kota Pagar Alam sangat berkoncentrasi pada penanganan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, inflasi dan peningkatan perekonomian.

dukungan BSB serta Pemprov Sumsel yang telah menyalurkan berbagai bantuan dari tahun 2018 sampai 2023," katanya.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama BSB Achmad Syamsudin mengatakan kegiatan ini dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera serta menindaklanjuti program percepatan penurunan stunting. Dia menyebut persentase realisasi penyaluran CSR ke Kota Pagar Alam sebesar 97,11% dari total anggaran Rp 546.412.810,-.



"Capaian tersebut tidak terlepas dari dorongan Pemprov Sumsel serta instansi lainnya seperti BSB dengan menyalurkan CSR-nya, bahkan kedepan dirinya juga akan berfokus pada peningkatan perekonomian.

"Kami ucapkan terima kasih atas

"Bank Sumsel Babel memberikan CSR kepada Pemerintah Kota Pagar Alam berupa pemberian makanan tambahan kepada Ibu hamil, Ibu nifas, Baduta/Balita risiko stunting kepada 99 orang yang dilakukan selama lima bulan ke depan," pungkasnya.●



SEPAKAT WUJUDKAN PEMILU DAMAI

Provinsi Sumatera Selatan dikenal sebagai daerah yang aman dari konflik. Untuk menjaga status zero conflict itu, Penjabat (Pj) Gubernur Agus Fatoni menandatangani Deklarasi Damai Pemilu Tahun 2024 di Sumatera Selatan.

Penandatanganan deklarasi tersebut juga ditandatangani seluruh perwakilan partai politik (Parpol) dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Deklarasi Damai Pemilu Tahun 2024 di Sumsel juga ditandai dengan pembacaan kesepakatan oleh Ketua Tim Pelaksana Kampanye pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden Nomor Urut 01, 02 dan 03 serta para Ketua DPD/DPW Parpol yang disaksikan oleh Pj Gubernur dan Forkopimda.

Melalui kegiatan ini, Agus Fatoni optimis penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Tahun 2024 dapat berjalan dengan aman, nyaman, damai dan sukses.

Sehingga dia kembali mengingatkan pentingnya komitmen seluruh pihak dalam menciptakan pemilu damai di wilayah Sumsel.

"Melalui kegiatan 'Deklarasi Damai Pemilihan Umum Tahun 2024' merupakan wujud, tekad dan juga cita-cita kita bersama agar pemilu 2024 dilaksanakan dengan aman, nyaman, damai dan sukses," ucap Agus Fatoni.

Pj Gubernur Sumsel juga mengaku bersyukur hingga saat ini wilayah Sumatera Selatan tetap kondusif, aman dan damai juga masyarakatnya penuh kehangatan.

Sehingga dia berharap nantinya agar seluruh masyarakat dapat berkontribusi mewujudkan Pemilu damai.

"Pemilu damai merupakan harapan kita, semua itu dapat terwujud kalau kita memiliki persepsi yang sama. Dengan menjauhi praktik atau kegiatan yang menjurus menghasut fitnah serta tindakan ujaran kebencian," kata Fatoni.

Untuk dapat mewujudkan Pemilu Damai tersebut dia mengajak jajaran TNI, Polri, ASN dan seluruh masyarakat Sumsel untuk menahan diri dalam bermedia sosial sehingga tidak akan termakan hoax, ujaran kebencian dan provokasi.

"Khusus ASN tetap punya hak untuk memilih, tetapi tidak boleh terlibat politik praktis," tegasnya.

Tandatangani NPHD Serentak

Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel mewujudkan Pemilu Damai juga ditandai dengan penandata-

nganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) secara serentak pada tanggal 9 November 2023 lalu. Bahkan Provinsi Sumsel menjadi yang pertama se-Indonesia.

"Saya yakin dengan kekompakan dan tekad kuat, harapan masyarakat dapat diwujudkan bersama. Semoga Allah SWT Tuhan Maha Kuasa meridhoi mewujudkan pemilu damai di Sumsel," harapnya.

Provinsi Sumatera Selatan beserta 17 kabupaten/kota se-Sumsel menjadi wilayah yang pertama kali menandatangani naskah NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 di Indonesia. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Pj Gubernur Agus Fatoni dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel tahun 2024.

"Sudah di tandatangani NPHD Provinsi dan kabupaten/kota se-Sumsel terkait dana Pilkada. Saya ucapkan terimakasih kepada Bupati dan Walikota yang telah berkomitmen penuh sehingga anggaran pilkada 40 persen tahun 2023 telah disediakan," ucap Fatoni.

Fatoni menjelaskan, anggaran dana Pilkada tahun 2024 ini terdiri dari bermacam-macam. Anggaran ini berasal dari APBD murni dan APBD Perubahan bahkan ada juga sebagian yang tidak dianggarkan dari kedua cara tersebut.

"Untuk yang tidak dianggarkan kedua-duanya itu kita lakukan pergeseran anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT)," jelas Fatoni.

Selanjutnya, terkait penggunaan BTT mulanya banyak Bupati/Walikota yang masih ragu. Namun, dengan beberapa pemahaman yang diberikannya saat menjadi Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri perlahan para kepala daerah menjadi yakin dan tidak ragu dalam menganggarkan dana untuk Pilkada.

"Awalnya banyak bertanya karena tahapan Pilkada belum dilakukan, sebagian kepala daerah bertanya dana ini digunakan untuk apa dan jika tidak habis sampai 2024 bagaimana. Bagaimana nanti jika tidak terpakai? Banyak yang bertanya seperti itu dan setelah kita jelaskan Alhamdulillah semua paham. Sekarang NPHD semuanya bisa dilaksanakan," ujar Fatoni.

Fatoni menyebut penandatanganan NPHD ini menjadi bentuk cinta para

kepala daerah, KPU dan Bawaslu kepada bangsa dan negara. Penandatanganan ini juga menjadi bukti komitmen mereka dalam mendukung terlaksananya Pilkada Serentak 2024 mendatang di Sumsel.

di Sumsel anggaran yang disediakan sekitar Rp234M dan dibagi dua porsi, yaitu yang pertama 40% tahun 2023 atau sekitar Rp 93 miliar dan nanti di tahun 2024 senilai Rp 140 miliar.

"Untuk total pemilihan Gubernur, Bu-



Dalam kesempatan itu, Fatoni berpesan kepada semua kepala daerah tetap menjaga status Sumsel sebagai daerah yang zero conflict.

Dia berharap jalannya Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berlangsung sukses agar bangsa dan daerah menjadi jauh lebih baik lagi.

"Namanya pesta demokrasi ini harus dilakukan dengan gembira jangan menjadi beban. Harus dilaksanakan sepenuh hati dan sebisa mungkin kita jaga dan pertahankan lingkungan agar tidak terjadi perpecahan," kata Fatoni.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyampaikan rasa terima kasih kepada Pj Gubernur Sumsel, pimpinan DPRD.

Dari hasil pembicaraan politik hingga teknis administrasi dengan DPRD sudah menyepakati untuk pemilihan Gubernur

pati, Walikota se Sumsel berdasarkan kontribusi APBD provinsi dan kab/kota totalnya sekitar Rp1 triliun lebih sekian miliar. Kami atas atas nama KPU mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pemerintah provinsi Sumsel, pemerintah kab/kota se Sumsel dalam menyelenggarakan pilkada serentak 2024," jelasnya.

Adapun rincian anggaran dana Pilkada Serentak 2024 di Sumsel berdasarkan data dari Kesbangpol Provinsi yakni:

1. Kumulatif KPU se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.416.918.651.985,- dan Tahun 2024 sebesar Rp.637.059.959.605.
2. Kumulatif Bawaslu se-Sumatera Selatan Tahun 2023 sebesar Rp.137.700.016.432,- dan tahun 2024 sebesar Rp.215.277.551.648. ●

SIAP JAGA NETRALITAS DI TAHUN POLITIK

Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat rentan terlibat dalam politik sehingga banyak yang meragukan netralitasnya. Melihat hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan bertekad untuk bersikap netral di Pemilu 2024 sebagai bentuk tanggung jawab mereka menjadi pegawai pemerintah.

Untuk memastikan hal tersebut Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Ir. SA Supriono mengingatkan jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dilindungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk tetap menjaga netralitas menjelang tahun politik 2024.

"Di tahun 2024 akan ada dengan tiga pemilu yaitu legislatif, presiden dan kepala daerah. Kita harus bersikap netral meskipun kita juga tetap menjalankan tugas sebagai warga negara Indonesia."

nesia untuk memilih," tutur Sekda Supriono.

Dikatakannya, ASN atau pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sumsel harus mampu menempatkan diri pada posisi yang sesuai dengan postur yang telah diuraikan di dalam regulasi.

"Jika kita diatur untuk netral, maka wajib bersikap netral," tambahnya.

Selain itu Supriono juga menyinggung realisasi anggaran dan program prioritas menjelang akhir tahun 2023.

"Beberapa hal yang terkait program prioritas seperti Stunting, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi," tambah Sekda Supriono.

Seluruh OPD dimintanya segera dapat melaksanakan tugas akhirnya, terkait dengan capaian target sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan dilengkapi dengan laporan keuangannya yang harus diselesaikan tepat waktu.

"Saya harap ini dapat diselesaikan segera, karena laporan seluruh OPD akan dikompilasi menjadi satu dalam laporan keuangan Provinsi Sumsel, maka diharapkan bapak/ibu sekalian harus menyadari hal tersebut agar dapat menyelesaikan pekerjaan secepatnya," ucap Sekda.

Terkait dengan kedisiplinan ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam bekerja, Sekda Supriono menyampaikan bahwa di tahun anggaran 2024 akan diterapkan absensi secara elektronik dengan menggunakan hand-



phone dan dilakukan absensi dengan lokasi masing-masing.

"Tidak ada yang tidak absen termasuk yang sedang berdinamis. Kinerja akan dinilai secara otomatis, bapak/ibu tidak perlu membuat laporan kinerja tahunan seperti terdahulu. Semuanya akan terinstal dengan otomatis. Kami berharap tahun depan tidak ada lagi yang tidak melaksanakan tugas," tambahnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Sekda Supriono meminta agar seluruh ASN dan PPPK dapat beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan zaman.

"Berubahlah dengan suasana yang baru karena kita didorong untuk bisa mengikuti perubahan zaman yang begitu cepat. Maka kita harus mengupdate diri kita untuk bisa bersaing dengan negara lain. Untuk itu kami minta semua ini dijalankan dengan baik," tandasnya.

Fokus Pada Program Prioritas

Selain bersikap netral Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni meminta kepada kepala desa (Kades), lurah, camat Se-Sumsel menyamakan persepsi dan menguatkan sinergitas antar pemerintahan untuk menyukseskan program prioritas, yaitu penanganan inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem dan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.

"Camat, Lurah dan Kades merupakan garda terdepan yang mengerti kondisi masyarakat, karena sehari-hari dengan masyarakat," ucap Fatoni

Menurutnya, keberhasilan yang telah berjalan saat ini berkat kerjasama seluruh stakeholder dalam mengendalikan karhutla juga mengedukasi masyarakat atas dampak karhutla.

"Kita juga bersyukur kita telah mampu melewati masa-masa sulit, namun di hadapan kita masih ada Pekerjaan Rumah (PR) juga tanggung jawab bersama. Ada inflasi yang harus kita tangani bersama, masyarakat komponen dan seluruh lapisan masyarakat bergerak untuk menangani inflasi," harapnya.

Tak hanya itu, apresiasi juga diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo

saat kunjungan kerja ke Sumsel pada bulan Oktober lalu. Presiden Jokowi mengapresiasi penanganan inflasi di Provinsi Sumsel. Oleh karena itu, Fatoni mengajak para Camat, Lurah dan Kades untuk fokus dalam penanganan inflasi di wilayahnya masing-masing.

"Selain itu penanganan stunting kita terus bergerak, peran Camat, Lurah dan Kades sangat penting karena

Sementara itu, terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Fatoni memberikan atensi khusus kepada jajaran Pemerintahan hingga tingkat RT/RW untuk menyukseskan pesta demokrasi. Salah satunya dengan tetap menjaga kondusifitas wilayah masing-masing daerah sehingga Sumsel zero konflik tetap terjaga.

"Kita harus tetap jaga Sumsel yang



mengetahui persis warganya yang stunting sehingga penanganannya juga tepat," ujarnya.

Fatoni berharap unsur pemerintah terus bergerak melakukan upaya konkret dalam menangani stunting. Salah satunya melalui program menjadi orang tua asuh stunting dan kemiskinan ekstrem sehingga penanganannya dapat tepat sasaran.

zero konflik. Kita harus terjaga Sumsel dengan damai, kita sudah banyak capaian prestasi dan cukup baik, kemajuan daerah sudah cukup baik. Namun masih perlu kita tingkatkan, kita terus jaga nama baik Sumsel yang kondusif ini, kita pelihara dan jaga agar Pemilu dan Pilkada 2024 berjalan aman, nyaman dan sukses," ucap Fatoni. ●



PEMILU RIANG GEMBIRA DAN CERDAS

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajak seluruh masyarakat mengedepankan asas Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau Luber Jurdil serta melaksanakan dengan riang gembira dan cerdas.

"Reses saat ini bersamaan dengan pelaksanaan kampanye Pemilu 2024. Mari kita wujudkan demokrasi yang mencerdaskan kehidupan bangsa, tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Mari kita laksanakan pemilu yang riang gembira dan cerdas," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023.

Tahun 2024 merupakan tahun politik di mana semua partai politik peserta Pemilu, termasuk anggota DPR RI, yang juga merupakan anggota parpol akan memasuki situasi dan kondisi dinamika politik dalam menghadapi pemilu. Berbagai persiapan dan upaya untuk mendapatkan suara rakyat pun akan dilakukan.

"Dalam mengelola dinamika politik tersebut, kita tidak hanya fokus pada mendapatkan kekuasaan semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dalam persatuan dan kesatuan, menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan semakin memajukan peradaban demokrasi di Indonesia," tutur politisi Fraksi PDIP itu.

Puan berharap, walaupun berada dalam tahun politik, anggota DPR dapat mengelola tugas dan fungsi konstitusional agar tetap berjalan dengan baik untuk mewujudkan amanat rakyat, mensejahterakan rakyat, dan menjaga kepentingan bangsa dan negara.

"Menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama untuk mengawal pemilu sesuai amanat konstitusi yaitu bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, ju-

jur dan adil setiap lima tahun sekali," tegasnya.

Anggota Komisi II DPR, Riyanta, menegaskan peserta dan penyelenggara Pemilu harus berkomitmen untuk menghindari politik uang (money politic) dalam melaksanakan Pemilu 2024. Sehingga hal yang dapat menimbulkan persengketaan perlu dihindari agar penyelenggaraan Pemilu 2024 dapat terlaksana secara jujur dan adil.

"Salah satu upaya yang perlu didorong agar sengketa Pemilu itu dihindari, baik peserta maupun penyelenggara pemilu dan semua stakeholder, itu bisa benar-benar melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. Kuncinya harus berkomitmen menghindari money politic. Saya kira jika hal itu dihindari nanti tidak akan ada masalah dengan hasil (Pemilu 2024)," jelas Riyanta.



Riyanta menambahkan penyelenggara Pemilu juga diharapkan tidak terjerumus pula dalam politik praktis. Hal tersebut penting agar stabilitas nasional, politik, dan hukum dapat terjaga secara baik.

"Menurut saya yang paling penting kita bernegara agar bisa hidup dengan tenang tentu stabilitas itu menjadi aspek yang paling utama," ungkapnya.

Untuk itu, Politisi fraksi PDIP itu mendorong agar adanya suatu bentuk pengawasan dalam bentuk internal maupun eksternal agar penyelenggaraan Pemilu 2024 bisa terlaksana menjadi lebih baik lagi. Karena tanpa adanya pengawasan, manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan penyimpangan.

"Khususnya teman-teman LSM, media, bagaimana memberikan suatu pengawasan. Pengawasan ini diberikan dalam rangka ikut juga berpartisipasi membangun bangsa dan negara lebih baik lagi. Tanpa dilakukan pengawasan, saya yakin manusia itu ada kecenderungan menyimpang. Jadi kata kuncinya sebenarnya bagaimana peserta pemilu ini harus benar-benar komitmen," tegasnya.

Dia pun turut mengimbau kepada peserta Pemilu untuk lebih mengedepankan gagasan, ide, visi, dan misi sesuai dengan fungsi sebagai anggota dewan yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

"Sampaikanlah gagasan demi kepentingan pembangunan nasional, misalnya menghilangkan KKN, pungli, sengketa tanah, ini kan masih banyak terjadi di daerah. Tentu yang terpenting bagaimana komitmen antara yang diucap dan yang dilakukan itu bisa sama dan terlaksana," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Saan Mustopa, menekankan, kurang lebih 50 persen kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, diganti dengan pejabat struktural.

Hal ini menjadi perhatian karena dapat berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Apalagi, masa jabatan penjabat kepala daerah kali ini akan jauh lebih panjang ketimbang masa jabatan penjabat kepala daerah pada Pemilu sebelumnya.

Sebab netralitas ASN penting dalam



menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu. "Namun, ketika netralitas ASN terganggu, hal ini akan berdampak terhadap meningkatnya polarisasi politik. Tentunya dapat merusak institusi demokrasi dengan menghambat proses pembuatan kebijakan dan memperkuat posisi pihak yang terlibat dalam polarisasi. Hal tersebut tentu memicu penyalahgunaan sumber daya publik, risiko manipulasi dalam pemilihan umum, pengurangan kepercayaan publik, dan meningkatnya politisasi birokrasi," kata Saan Mustopa saat memimpin pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Untuk mengatasi hal tersebut, Saan meminta pihak terkait melakukan pengawasan di lingkungan ASN yang terpolarisasi. Setiap jenis pelanggaran ada sanksi dan nanti yang memberikan sanksi adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN), tergantung dari berat tidaknya.

"Ada yang hanya peringatan ringan, ada penurunan jabatan, dan ada penundaan kenaikan pangkat," ujar Saan.

Politisi Partai Nasdem menerangkan hal ini sesuai dengan PP 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, di mana dalam Pasal 5 huruf n, disebutkan ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon tertentu. Larangan tersebut tentunya disertai dengan sanksi hukuman disiplin berat sebagaimana ketentuan pada pasal 8 ayat 4 PP 94/2021.

Selain itu, Saan mengatakan pelanggaran netralitas juga dapat merusak citra dan kepercayaan publik terhadap birokrasi pemerintahan. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, lembaga pemerintahan, organisasi masyarakat, media, dan masyarakat, untuk menjaga proses Pemilu 2024 dengan baik.

Anggota Komisi II DPR, Ongku P. Hasibuan, mengimbau kepada para kepala daerah agar mengantisipasi hambatan Pemilu

2024 yang disebabkan peristiwa bencana alam. Sebagaimana diketahui bulan Desember ini di beberapa daerah sudah memasuki musim hujan, bahkan sudah terjadi bencana banjir, longsor, gunung meletus, dan sebagainya.

"Tadi PJ Gubernur juga bercerita di Medan ini sudah memasuki musim hujan, sehingga baru-baru ini terjadi longsor seperti di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Humbang Hasundutan, banjir di Belawan dan bencana alam lainnya, maka kesiapan pemilu juga harus memperhatikan kondisi ancaman bencana alam ini," ungkap Ongku saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Medan, Sumatera Utara, Rabu, 6 Desember 2023.

Politisi Partai Demokrat ini juga mengingatkan agar semua pihak, para pemangku kepentingan bekerja sama menyukseskan pelaksanaan Pemilu

2024 di Sumatera Utara dengan mengantisipasi segala bentuk hambatan dan tantangan, di antaranya bencana alam.

"Jangan sampai orang terhalang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) karena penyelenggara tidak siap mengantisipasi terjadinya kondisi alam saat musim hujan, ini juga menjadi perhatian kita," ujarnya.

Legislatur Dapil Sumatera Utara II ini menilai kualitas Pemilu ini tidak hanya berdasarkan seberapa banyak jumlah masyarakat yang memilih. Dirinya berharap tingkat partisipasi masyarakat terus naik dari tahun 2019 lalu. Bahkan, saat terjadi pandemi Covid-19 tetap mencapai 81 persen secara nasional.

"Tetapi kualitasnya bagaimana, apakah masyarakat itu memilih berdasarkan analisis yang cerdas. Jangan sampai partisipasi itu karena dikerahkan, karena adanya transaksi jual beli suara, adanya kegiatan yang sifatnya moral hazard dalam pemilu kali ini," timpal mantan Bupati Tapanuli Selatan (2005-2010) ini.

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPR, Komarudin Watubun, mengapresiasi persiapan dan kesiapan KPU dan Bawaslu Bali dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu serentak 2024. Menurutnya, Bali menjadi salah satu provinsi dengan koordinasi dan output yang baik dalam proses menghadapi penyelenggaraan kelancaran Pemilu.

Politisi Fraksi PDIP itu turut mengapresiasi langkah yang dilakukan KPU Bali yang mempersiapkan TPS bekerja sama dengan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di mana seluruh petugasnya merupakan perempuan.

Menurutnya, hal ini s e b a g a i



upaya menuju Pemilu yang berintegritas dalam rangka meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu.

"Pemberdayaan perempuan itu penting, meskipun sekarang dari sisi regulasi kita sudah memberi ruang 30 persen untuk perempuan untuk berpartisipasi politik. Jadi, menurut saya, langkah yang dilakukan KPU dan Bawaslu dalam melibatkan perempuan itu bagus, kita tahu juga fenomena di luar sudah banyak aktivitas pemerintahannya yang dipimpin oleh pemimpin perempuan," imbuhnya.

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menilai persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Sumatera Utara juga sudah berjalan dengan baik.

"Overall dari semua yang tadi kita diskusikan semua berjalan cukup baik. Semua tahapan sudah berjalan bagus, pendistribusian logistik pemilu juga masih berlangsung oleh KPU. Saya beberapa waktu lalu juga sudah mengunjungi beberapa gudang logistik pemilu di kabupaten/kota," kata Doli.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Komisi II ingin mengetahui secara detail dan rinci persiapan Pemilu 2024 di Sumatera Utara, baik dari segi tahapan yang dilakukan hingga penyelenggaraan kampanye yang sudah berjalan sembilan hari dan tersisa 66 hari menjelang pencoblosan.

Selain itu, Legislator Dapil Sumatera Utara III ini juga mendorong penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang dibentuk menjadi sebuah kesatuan dari Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam menindak pelanggaran tindak pidana pemilu.

"Dari sisi keamanan, tadi Kapolda Sumatera Utara juga menjelaskan secara rinci, mempersiapkan segala kemungkinan dari mulai upaya pencegahan (preventif) hingga penanganan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara konsep persiapannya saya nilai cukup baik persiapan penyelenggara pemilu di Sumatera Utara ini," terangnya.

Ketua Komisi III DPR, Bambang Wuryanto, mengapresiasi jajaran Polda Jateng yang telah berkomitmen menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal itu dibuktikan, pada saat rapat kerja dengan Komisi III

dengan mengundang seluruh jajaran Kapolres seluruh Jawa Tengah. Bahkan, Kapolda Jateng telah mengeluarkan Buku saku Pedoman Netralitas anggota Polri dalam Pemilu 2024.

Anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto, juga memberikan apresiasi bagi seluruh jajaran di Polda Jawa Timur yang telah bekerja keras dalam menghadirkan rasa aman jelang Pemi-

menjadi tidak rawan ke depannya dalam beberapa bulan ke depan," ujar Wihadi.

Karena itu, ia menilai langkah-langkah yang dilakukan sejauh ini oleh Polda Jatim. Sehingga, Komisi III akan terus mendukung terus Polda Jatim untuk memberikan rasa aman agar Pemilu ini berjalan aman dan tidak ada gangguan dalam masalah Pemilu.



lu 2024. Hal itu ditunjukkan dengan Indeks Potensi Kerawanan Pemilu 2024 yang menurun, mulai dari status Sangat Rawan (81,14) di Januari 2023 menjadi status Rawan (65,16) pada Agustus 2023.

"Artinya sudah ada penurunan potensi kerawanan pemilu yang ada di Jawa Timur. Jadi saya kira dari Agustus hingga sekarang tidak terlalu mengkhawatirkan, karena jika kita bandingkan dengan Pemilu terdahulu justru saat ini lebih kondusif. Jadi saya kira kondisi rawan ini akan berubah

"Saya kira memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Jatim ini merupakan battle field dari semua paslon. Karena di sini selain lokasi dan penduduknya yang padat dan menjadi keragaman dari masyarakat, tentunya dari paslon masing-masing semuanya mempunyai basis di Jawa Timur. Saya kira ini menjadi suatu hal yang lumrah dalam konstelasi Pemilu dan Pilpres ini, karena Jawa Timur adalah daerah yang memang mempunyai pengaruh yang signifikan dalam kemenangan Pemilu," jelasnya. •

PUBLIK JANGAN SAMPAI GOLPUT

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak masyarakat tidak menjadi golongan putih atau golput dalam Pemilu 2024, baik yang tidak menggunakan hak pilihnya maupun sebagai golongan pencari uang tunai yang mengharapkan politik uang atau serangan fajar.

Bamsoet mengatakan, keduanya sama-sama tidak sejalan dengan demokrasi Pancasila yang menekankan nilai dan budaya bangsa, dengan rakyat memiliki kedaulatan dalam arti yang sesungguhnya.

Bamsoet memaparkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di Pemilu 2019, ada sekitar 34,75 juta pemilih atau sekitar 18,02 persen dari total

wa 40 persen responden mengakui menerima uang dari para peserta pemilu, tetapi tidak mempertimbangkan untuk tetap memilih mereka. Sementara, 37 persen lainnya mengaku menerima pemberian uang dan mempertimbangkan si pemberi untuk dipilih.

"Menghadapi Pemilu 2024, Bawaslu telah meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu dan Pemilihan (IKP) tematik mengenai isu politik uang. Di dalam-

nilai-nilai toleransi dan kedamaian seperti yang diajarkan dalam agama. Untuk itu, dia mengajak seluruh elemen bangsa tetap menjaga kerukunan antar umat beragama jelang Pemilu 2024.

"Sangat penting bagi seluruh elemen bangsa untuk terus merawat serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama. Jangan sampai hanya karena pemilu, kita melupakan ajaran agama. Apalagi sampai menggunakan isu-isu agama untuk memecah belah antar anak bangsa," ujar Bamsoet.

Bangsa Indonesia, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu, sedang menghadapi tantangan terbesar dalam mengembangkan demokrasi. Adanya berbagai upaya membenturkan agama dengan negara tidak dapat dibenarkan. Apalagi sampai menganggap sistem demokrasi yang sudah sepakat dianut oleh bangsa Indonesia, tidak sesuai dengan ajaran agama.

Adapun hakikat demokrasi sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama, di antaranya adalah mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, pentingnya kontrol terhadap penguasa, serta memelihara kemashlahatan umat.

Untuk itu, ia menilai demokrasi adalah pilihan yang sepakat dijalankan sehingga wajib dijaga dan dikembangkan.

"Antara agama dengan negara saling melengkapi satu sama lain. Melalui agama, nasionalisme warga negara tidak menjadi kering. Karena negara merupakan tempat agama tumbuh subur menyebarkan perdamaian dan kasih sayang," tegas Bamsoet.

Terpisah, Wakil Ketua MPR, Syarifuddin Hasan, mengajak warga Bogor, Jawa Barat, aktif berpartisipasi dalam Pemilu dengan datang untuk ikut mencoblos ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024.

"Dengan berpartisipasi dalam Pemi-



pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Angka tersebut sudah menurun dari Pemilu 2014 yang mencapai 58,61 juta pemilih atau sekitar 30,22 persen dari total pemilih terdaftar.

"Di Pemilu 2024, mari kita gunakan hak pilih dengan bijak. Jangan menjadi golput, karena satu suara sangat menentukan nasib Indonesia di masa depan," ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR di delapan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Rabu, 13 Desember 2023.

Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, selain soal golput yang tidak menggunakan hak pilih, dia juga mengajak masyarakat jangan sampai terpapar golongan pencari uang tunai.

Pada Pemilu 2019, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam salah satu surveinya menemukan bah-

ya menempatkan politik uang sebagai salah satu dari lima kasus terbesar dalam isu kerawanan Pemilu," jelas Bamsoet.

Bamsoet menerangkan, politik uang sangat berbahaya bukan hanya bagi perkembangan demokrasi, melainkan bagi perkembangan mental, akhlak, dan karakter bangsa. Politik uang juga dapat menjadikan demokrasi Indonesia bukan menjadi demokrasi Pancasila, melainkan menjadi demokrasi NPWP (Nomor Piro Wani Piro).

"Jangan sampai mereka yang terpilih dalam Pemilu bukan karena integritas, kredibilitas, maupun popularitas, melainkan karena 'isi tas'. Peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencegah hal ini," tegasnya.

Bamsoet juga mengimbau masyarakat tidak tenggelam dalam hiruk pikuk Pemilu hingga melupakan

lu, maka kami telah menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara. Setiap warga negara mempunyai tanggung jawab untuk ikut menentukan masa depan bangsa melalui Pemilu,” katanya dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada masyarakat kota Bogor, Kamis, 14 Desember 2023.

Syarief Hasan menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di dua tempat, yaitu di Aula Kebun Jati Kelurahan Bantarjati dan di Aula Pertemuan Kelurahan Katulampa Bogor.

Sosialisasi Empat Pilar MPR itu mayoritas diikuti ratusan ibu-ibu yang memenuhi ruangan pertemuan. Syarief mengingatkan pada 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pesta demokrasi. Oleh karena itu, dia mengingatkan peserta sosialisasi untuk datang ke TPS.

“Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara,” ujarnya.

Hajatan demokrasi itu, menurut dia, menjadi momentum untuk perbaikan kehidupan yang lebih baik ke depan. “Dengan Pemilu ini kita menginginkan kehidupan bangsa dan negara kita lebih baik ke depan,” tuturnya.

Syarief mengungkapkan sedikitnya ada lima hal yang menjadi perhatian untuk perbaikan. Pertama adalah menurunkan angka kemiskinan, menurunkan angka pengangguran (membuka lapangan pekerjaan), meningkatkan kesejahteraan (menaikkan pendapatan), pemerataan pendidikan, perbaikan layanan kesehatan.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini juga menyinggung soal kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sekarang ini. Ibu-ibu rumah tangga paling merasakan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok itu.

“Pangkal persoalannya adalah pendapatan

masyarakat tidak mengalami kenaikan, sehingga tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pendapatan masyarakat harus mengalami kenaikan,” kata anggota dewan dari Daerah Pemilihan Jabar III meliputi kabupaten dan Kota Cianjur serta kota Bogor itu.

Dia meminta agar setiap orang saling mengingatkan, saling menghormati, saling menghargai, dan saling toleran.



“Itulah sebenarnya wawasan kebangsaan kita. Kita harus memperkuat wawasan kebangsaan itu,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, mengatakan, iklim politik menjelang Pemilu 2024 sudah mulai menghangat.

Maka dari itu, dia berharap pernyataan yang dilontarkan para elite politik penuh optimisme, mencerahkan dan menggembarakan. Sehingga, tidak memicu perpeca-

han di masyarakat.

“Memang ini tahun politik. Tapi, tahun politik tidak boleh membuat suasana kebangsaan kita menjadi pengap, sesak, apalagi sempit,” ujarnya.

Muzani melanjutkan, persatuan di atas segala-galanya. Sehingga, jangan sampai politik membuat kehidupan kebangsaan semakin rumit.

“Saya percaya para elite politik kita

memiliki cakrawala dan cara pandang yang begitu luas tentang masa depan bangsa. Memang dalam proses pesta demokrasi waktunya untuk memberi pengaruh besar kepada rakyat untuk menentukan pilihannya. Sehingga, terkadang pandangan-pandangan itu membuat suasana terasa hangat, bahkan panas. Yang penting suasana kebangsaan harus dijaga. Jaga suasana kekeluargaan dan persaudaraan antarsesama anak bangsa. Karena dalam sejarah Bangsa Indonesia, keruwetan, kerumitan, bahkan persengketaan ujungnya kembali kepada persaudaraan,” terangnya.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra itu menambahkan, pemilu tinggal sebentar lagi. Dia berharap siapa pun yang jadi pemenang pemilu, harus merangkul sesama anak bangsa.

“Kalau para pemimpin politik melakukan tindakan-tindakan seperti itu, terutama bagi mereka yang menang, tentu saja akan melegakan kehidupan demokrasi kita. Saya percaya pers dan pemberitaan yang wartawan sajikan, menunjukkan persatuan, dan kesatuan bagi penguatan demokrasi kita,” harapnya. •





PEMILU BUKAN UNTUK ELIMINASI MUSUH

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menegaskan pemilihan umum merupakan ajang memilih pemimpin secara bersama, bukan untuk mengeliminasi musuh.

// ngat betul-betul bahwa pemilu untuk memilih pemimpin bersama bukan untuk mengeliminasi musuh," kata Mahfud di Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat, Senin, 18 Desember 2023.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ke-2 tersebut mengatakan jika hal itu diimplementasikan dengan baik, maka yang menang seyogianya merangkul yang kalah dan sebaliknya.

Dengan demikian, rasa persatuan bangsa dapat terwujud tanpa adanya perpecahan antar anak bangsa meski-

pun berbeda pilihan politik saat pesta demokrasi lima tahunan berlangsung.

Pada kuliah umumnya, Mahfud kembali mengingatkan dan mengajak para mahasiswa di Tanah Air untuk terlibat aktif pada Pemilu 2024. Sebab, hal itu merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab warga negara kepada bangsa.

"Hal itu sebagai bentuk warga negara yang mempunyai tanggungan dalam membangun masa depan bangsa, dan tentunya masa depan saudara sendiri," kata dia mengingatkan.

Oleh karena itu, apabila ada individu

yang beranggapan tidak akan ikut pemilu karena melihat calon presiden dan calon wakil presiden tidak sesuai harapan, maka pemikiran tersebut harus diluruskan.

Dia menyarankan masyarakat untuk tetap memilih calon yang terbaik di antara yang kurang baik atau memilih calon yang tingkat kekurangannya lebih sedikit dibandingkan pasangan calon lain.

"Pemilu itu bukan untuk memilih orang yang hebat atau sempurna melainkan untuk memperkecil peluang orang yang jahat menjadi pemimpin,"



jelas dia.

Pada kesempatan itu, Mahfud juga mengingatkan dampak buruk apabila seseorang tidak ikut berpartisipasi pada Pemilu 2024. Ia menganalogikan 100 orang diundang memilih calon pemimpin, namun yang memberikan suara hanya 35 orang.

Maka suara dari 35 tersebut yang akan menjadi penentu selama lima tahun ke depan. Sementara, 65 individu yang tidak ikut pemilu secara mutlak harus mengikuti kebijakan pemimpin yang lahir dari suara 35 konstituen tadi.

"Orang yang tidak ikut berpartisipasi pada pemilu itu bisa menjadi korban dari keputusan politik, karena memilih yang tidak hadir itu kepemimpinannya diwakili oleh orang yang memilih," jelas dia.

Lalu, pihak-pihak yang tidak ikut memilih maka secara mutlak juga terikat kepada aturan atau keputusan politik yang diambil oleh pihak yang menang dalam pesta demokrasi lima tahunan.

Sebagai contoh, jika pemerintah menaikkan pajak pelayaran, namun kelompok yang tidak ikut memilih tadi menentang dengan dalih tidak ikut berpartisipasi saat pemilu, maka hal itu tidak bisa diterima. Sebab, setiap individu harus mengikuti aturan yang dikeluarkan negara.

"Keputusan yang menang itu mengikat yang kalah," kata dia.

Mahfud juga menjelaskan perbedaan antara politik identitas dengan identitas politik kepada mahasiswa Universitas Bung Hatta.

"Politik identitas itu memang tidak boleh, kalau identitas politik itu boleh," kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan politik identitas merupakan cara berpolitik yang mengutamakan kelompok primordial untuk kemudian menganggap pihak lain sebagai lawan atau musuh.

Sebaliknya, identitas politik diperbolehkan termasuk dalam menentukan calon pemimpin. Sebagai contoh, pemeluk Muslim memilih calon dari barisan Islam dengan harapan aspirasinya ditampung oleh calon tersebut.

"Contoh lain, saya orang Minangkabau, maka saya memilih calon dari etnis Minangkabau, itu dibolehkan. Namun, yang tidak boleh ialah orang

Minangkabau memilih orang Minangkabau dengan tujuan menghabisi etnis lain apabila calon yang diusungnya terpilih. Hal tersebutlah yang disebut dengan politik identitas," ujar Mahfud.

Dia mengatakan identitas politik merupakan sebuah keniscayaan atau tidak bisa dihalangi. Sebab, bagaimanapun seseorang cenderung memilih karena faktor identitasnya.

"Itulah demokrasi. Yang penting adalah kesatuan bangsa," ujarnya mengingatkan.

Tokoh kelahiran Sampang 1957 tersebut mengatakan pemilu memang mempunyai potensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Pada umumnya potensi perpecahan tersebut muncul akibat adanya kelompok

prinsip bertentangan. Sebab, demokrasi memberikan ruang kebebasan, sementara integrasi bersifat mengikat.

Masih dalam teori yang sama, Mahfud mengatakan jika suatu negara tidak mampu menciptakan harmonisasi antara keperluan demokrasi dengan integrasi, maka hal itu dapat berujung pada kehancuran negara itu sendiri.

Mahfud mencontohkan India yang pecah sebelum merdeka. Dahulu, negara yang berada di Asia Selatan itu bernama Hindustan Raya atau Hindia Inggris.

Ketika India akan diberikan kemerdekaan oleh Inggris, Mahatma Gandhi menyuarakan demokrasi dan ingin mendirikan negara Hindustan Raya yang besar menjadi negara



tertentu yang mengedepankan politik identitas, bukan identitas politik.

Oleh sebab itu, Mahfud mengajak semua elemen masyarakat untuk menciptakan rasa kerukunan yang mengedepankan persatuan bangsa.

Mahfud juga mengatakan sebuah negara memerlukan demokrasi dan integrasi. "Sebuah teori menyatakan negara membutuhkan dua hal yang bertentangan, tetapi sebetulnya dibutuhkan, yaitu demokrasi dan integrasi," kata Mahfud.

Dia menjelaskan, di satu sisi, sebuah negara memerlukan demokrasi agar berbagai aspirasi masyarakat dapat tersampaikan atau ditampung. Di sisi lain, integrasi juga diperlukan agar sebuah negara menjadi kokoh.

Pada hal, demokrasi dan integrasi merupakan dua aspek yang secara

demokrasi.

Pada saat itu, Mahatma Gandhi memiliki tujuan untuk menjadikan negara itu hidup berdampingan di tengah keberagaman agama maupun etnis.

Sayangnya, India tidak kuat dan pada tahun 1947 pecah akibat perbedaan pandangan antara umat Islam di bagian selatan India.

"Itu terjadi pada tahun 1947, saat India dan Pakistan sama-sama merdeka," ujar Mahfud.

Berbeda halnya dengan Indonesia yang tidak terpecah, karena sebelum kemerdekaan, anak bangsa telah bersumpah yang dikenal dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928.

"Indonesia merupakan negara demokrasi, dengan aspek integrasi yang tetap berjalan dengan baik," ujar Mahfud.●

6 PROVINSI RAWAN POLITISASI SARA

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis enam provinsi yang berpotensi memiliki kerawanan tinggi politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) di Pemilu 2024.

Anggota Bawaslu, Lolly Su-henty, mengungkapkan, DKI Jakarta menempati urutan pertama sebagai provinsi yang paling rawan terjadi politisasi SARA dengan skor 100. Adapun peringkat kedua diduduki Maluku Utara (77,16). Sementara peringkat ketiga sampai keenam ditempati DI Yogyakarta (14,81), Papua Barat (14,81), Jawa Barat (12,35), dan Kalimantan Barat (7,4).

Namun, saat diranking berdasarkan agregasi kabupaten/kota, Papua Tengah menjadi provinsi paling rawan isu politisasi SARA dengan skor 41,02. Urutan di bawahnya adalah DKI Jakarta (20,82), Banten (11,64), DIY (2,77), Papua Pegunungan (2,74), dan Maluku Utara (2,23).

Lolly mengungkapkan isu SARA yang tergambar dari hasil pemetaan kerawanan yang dilakukan pihaknya adalah kampanye bermuatan SARA di media sosial. Di tingkat provinsi, kampanye bermuatan SARA berdasarkan agama mencapai 86 persen. Ada-

pun penolakan calon peserta pemilu berbasis etnik sebesar 75 persen.

"Kedua isu ini memang sangat mudah diprovokasi karena etnis dan agama merupakan bagian dari identitas kolektif yang mampu menggerakkan suatu kelompok untuk berhadapan dengan kelompok lain," kata Lolly saat membuka Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 Isu Strategis: Politisasi SARA di Yogyakarta, Selasa, 10 Oktober 2023.

"Dalam konteks ini, waspadalah untuk provinsi yang dipetakan peristiwanya banyak terjadi di kabupaten/kota. Lakukan upaya pencegahan terbaik supaya ini tidak terjadi di 2024," ujar Lolly.

Berdasarkan pemetaan yang disusun Puslitbangdiklat Bawaslu tersebut,

Lolly berharap, terhadap enam provinsi berpotensi kerawanan tertinggi soal Isu Politisasi SARA ini memiliki strategi dalam melakukan pencegahannya.

"Lakukan upaya pencegahan dengan melibatkan dengan berbagai pihak, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota. Alasannya, upaya pencegahan yang baik yaitu dengan membangunnya melalui komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang bertujuan mencegah melakukan politisasi SARA," ujarnya.

Selanjutnya, di tingkat kabupaten/kota tercatat 20 daerah yang memiliki kerawanan tinggi diantaranya Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jaya Wijaya, Kabu-

upaten Pandeglang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Administrasi Pulau Seribu, Kota Jakarta Pusat, Kabupaten Sampang, Kabupaten Halima-hera Tengah, Kabupaten Alor, Kabupaten



Malaka, Kabupaten Mappi, Kota Jakarta Barat.

Potensi kabupaten/kota terawan selanjutnya yakni Kabupaten Kepulauan Yapen, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Mimika, Kabupaten Memberamo Tengah, Kabupaten Sleman, Kabupaten Landak, Kabupaten Sarmi, dan Kota Sabulussalam.

"Dari dua puluh kabupaten/kota, sembilan di antaranya ada di Indonesia Timur, maka dibutuhkan upaya perencanaan terbaik," ujarnya.

Tidak hanya itu, Sriandi Bawaslu itu turut memaparkan kekerasan berbasis SARA merupakan muara dari berbagai indikator politisasi SARA, yakni kampanye di media sosial, kampanye tempat umum, dan penolakan calon berbasis SARA.

"Artinya, Penolakan calon berbasis sara kalau terjadi, itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya kekerasan berbasis SARA," ujarnya.

Lolly juga menyebutkan provokasi di media sosial menjadi modus kekerasan berbasis SARA tertinggi baik di provinsi dan kabupaten/kota. Kedua adalah provokasi online, bentrok antar kelompok dan kerusuhan warga.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi melakukan upaya pencegahan politisasi SARA dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti Kemenkominfo, Dewan Pers, platform media sosial untuk pencegahan kampanye dan provokasi SARA di media sosial dan media massa lainnya. Serta Kerja sama dengan para pihak seperti TNI/Polri dan BIN untuk mengidentifikasi gejala dan mencegah berkembangnya politisasi SARA.

Lolly juga menegaskan pelaku provokasi SARA, termasuk lewat media sosial, bisa dilacak dan dijerat dengan hukum. Menurutnya, politisasi SARA merupakan kerawanan yang perlu diwaspadai bersama dalam pemilu nanti. Tidak boleh lagi peristiwa di pemilu-pemilu sebelumnya terulang di 2024.

"Kita harus jaga bersama-sama. Kita tidak ingin (pasca) pemilu kita tercerai berai, timbul permusuhan, residu dari pemilu itu sendiri," ujarnya.

Berdasarkan kajian Bawaslu, politisasi SARA dapat bermuara pada kekerasan berbasis SARA. Media sosial

menjadi modus paling banyak yang digunakan oleh aktor-aktor tertentu untuk melakukan kampanye atau provokasi berbau SARA dalam pemilu.

Karena itu, Lolly mengatakan, Bawaslu bekerja sama dengan sejumlah pihak memitigasi kerawanan tersebut, salah satunya melalui patroli siber. Upaya ini melibatkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta perusahaan penyedia layanan medsos, seperti Meta dan Tiktok.

"Bawaslu punya channel pelaporan cepat. Setelah kami kaji, kalau ada (konten) berpotensi menyebabkan dis-

masih bikin definisi yang kemudian multitafsir sehingga kita sendiri tidak menemukan titik temu," ujarnya.

Menurut Lolly, definisi dan aturan yang jelas serta rigid mengenai politisasi SARA diperlukan untuk menangkal bahaya terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pihaknya mengajak semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama guna melahirkan satu definisi yang dapat diamini oleh seluruh pihak.

Bawaslu juga mengajak berbagai pihak untuk berkolaborasi menyusun bank data kasus-kasus politisasi SARA sebagai kajian ilmiah. Upaya itu diper-



integrasi bangsa, isinya hasutan, kami punya channel khusus, sehingga take down-nya cepat," ujarnya.

Lolly menambahkan, pelaku provokasi pun bisa dilacak di semua platform medsos. Pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, Lolly menambahkan, kunci utama untuk memitigasi kerawanan ini adalah peran masyarakat agar menyebarkan informasi yang benar. Masyarakat juga diminta melaporkan ke Bawaslu jika menemukan pelanggaran terkait politisasi SARA.

Lolly juga meminta adanya upaya bersama untuk memperjelas definisi dan regulasi mengenai SARA. "Karena seringkali kita masih berdebat, kita

lakukan sebagai basis pembuatan kebijakan pencegahan di masa yang akan datang. Hasil pemetaan kerawanan yang dilakukan Bawaslu menyimpulkan kampanye bermuatan SARA di media sosial maupun di tempat umum serta mobilisasi penolakan calon berdasarkan SARA menjadi strategi umum politisasi SARA yang berujung pada kekerasan dan konflik berbasis SARA.

Kekerasan itu, sambungnya, memiliki modus yang beragam, seperti intimidasi, provokasi, bentrokan, dan kerusuhan antarpending. Lolly menyebut, ketika aksi saling provokasi dan intimidasi tidak terkelola dengan baik, dinamika konflik akan berkembang cepat dan menjadi sangat brutal. "Muaranya adalah bentrokan antarkelompok atau kerusuhan antarmassa yang berlarut-larut," pungkasnya. ●

AWASI KAMPANYE DUNIA DIGITAL

Tahapan kampanye Pemilu 2024 terkesan adem ayem bila dibandingkan dengan Pemilu 2019. Namun, pertarungan “berbau persaingan” yang saling menjelekkan ada dalam dunia digital atau media sosial (medsos).

"Saat ini, memasuki tahapan Kampanye dan sudah memasuki dapat capres (calon presiden) pertama, ada yang bilang kesannya adem ayem dibandingkan Pemilu 2019. Tetapi sebenarnya pertarungannya itu di dunia digital. Medsos dengan berbagai fitur video seperti TikTok sangat kuat untuk mempengaruhi," kata Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, saat Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (Soswatif) Tahun 2024 di Kota Depok, Sabtu, 16

etahui apa yang menjadi bagian pelanggaran pemilu.

"Kalau menemukan dugaan pelanggaran bisa melaporkan kepada Bawaslu. Tetapi kita perlu tahu dulu yang melanggarnya apa? Kita tahu bagaimana melaporkannya dan ketiga tahu mekanismenya," jelas mantan Anggota Bawaslu Jawa Barat ini.

Lolly mengingatkan, dunia digital saat ini amat memberikan pengaruh yang besar dalam menyampaikan informasi. Karenanya, dia berharap, masyarakat dapat menyaring informasi yang benar dan bersedia menjadi bagian dari pengawasan partisipatif pemilu.

"Dunia digital sangat kuat pengaruhnya, tetapi saringannya masih kurang. Karena itu, perlu untuk tahu dan tak terpancing meneruskan informasi yang tak benar. Kita perlu 'aware' situasi pelanggaran di sekitar kita," tuturnya.

Dalam melakukan pengawasan partisipatif pemilu, Lolly berharap masyarakat tak sungkan melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. "Kalau ada pelanggaran dunia digital dilaporkan.

mantau pemilu dapat mendaftarkan kepada Bawaslu. Hingga saat ini 90 lembaga pemantau telah diakreditasi Bawaslu. Jumlah tersebut akumulasi dari 42 lembaga pemantau terakreditasi di Bawaslu, 20 di Bawaslu Provinsi, dan 28 di Bawaslu Kabupaten/Kota sejak peluncuran meja layanan pemantau pada 10 Juni 2022.

Lolly menyebut, Bawaslu terus membuka ruang partisipasi bagi lembaga pemantau untuk mendaftar hingga H-7 hari pemungutan suara sesuai Pasal 5 Perbawaslu Nomor 1/2023.

Dalam melakukan pendaftaran pemantau Pemilu, organisasi masyarakat/komunitas wajib melampirkan tujuh kelengkapan administrasi yang terdiri dari profil organisasi/lembaga; memiliki surat keterangan terdaftar dari pemerintah atau pemerintah daerah, atau memiliki pengesahan badan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan; nomor pokok wajib pajak organisasi/lembaga; nama dan jumlah anggota pemantau Pemilu; alokasi anggota pemantau Pemilu yang akan ditempatkan ke daerah; rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau; dan nama, surat keterangan domisili, dan pekerjaan penanggung jawab pemantau Pemilu yang dilampirkan pas foto diri terbaru.

Aturan terbaru di atas memuat kemudahan prosedur untuk menjaring sebanyak mungkin pemantau, yaitu organisasi masyarakat tidak berbadan hukum tetap dapat mendaftar, cukup dengan surat keterangan terdaftar (Pasal 7 huruf b Perbawaslu 1/2023). Hal ini menjadi solusi atas banyaknya dorongan komunitas yang ingin memantau penyelenggaraan Pemilu.

Untuk memudahkan registrasi, kata Lolly, Bawaslu membuka meja layanan pemantau di seluruh daerah. Setelah memenuhi syarat administrasi, maka dalam waktu paling lama 14 hari akreditasi akan diterbitkan Bawaslu.

Selanjutnya, selama melakukan pemantauan, Pemantau berhak untuk mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia;



Desember 2023.

Untuk itu, Lolly meyakinkan, masyarakat perlu memanfaatkan tahapan kampanye ini dalam mencari informasi sebanyak-banyaknya. Selain itu, juga untuk mengedukasi hal-hal yang dirasakan tidak benar.

Dalam mencari informasi tersebut, lanjutnya, masyarakat juga perlu meng-

Bisa ke Bawaslu Kota Depok, melalui aplikasi, atau bisa melaporkan ke medsos@bawaslu.go.id. Perlu kita yakinkan, tidak boleh intervensi saat akan memilih, termasuk melaporkan penyelenggara pemilu apabila tak profesional, tidak berintegritas, dan tebang pilih," sebutnya.

Selain itu, dia mengajak masyarakat atau organisasi yang mau menjadi pe-

mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemilu; memantau proses pemungutan dan penghitungan suara dari luar tempat pemungutan suara; mendapatkan akses informasi yang tersedia dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan Pemilu sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

Namun, Pemantau Pemilu terikat dengan kode etik, diantaranya wajib bersikap independen. Jika melanggar, Bawaslu dapat mencabut akreditasi pemantau Pemilu.

Terakhir, pemantau Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan ke Bawaslu. Hal ini dibutuhkan sebagai data pembandingan ataupun memperkuat proses pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, untuk penguatan pengawasan partisipatif, Bawaslu mengajak sebanyak mungkin lembaga maupun kelompok masyarakat di seluruh daerah untuk segera bergabung menjadi pemantau Pemilu.

Sebelumnya, Bawaslu, KPU, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Dewan Pers membahas finalisasi draft Surat Keputusan Bersama (SKB) pengawasan dan pemantauan kampanye melalui media massa cetak, elektronik dan internet pada pemilu 2024. Keputusan tersebut merupakan rekomendasi Rapat Koordinasi pada Selasa 5 Desember 2023.

"Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam rapat bersama, KPU, KPI, Dewan Pers, lembaga penyiaran dan parpol peserta pemilu via daring, di kantor Bawaslu, Rabu, 13 Desember 2023.

Dia menuturkan rekomendasi ini dilatarbelakangi oleh maraknya iklan peserta pemilu di televisi, se-

hingga memerlukan pengaturan batasan iklan, apakah masuk kategori iklan kampanye atau bukan.

Bagja mengatakan, iklan kampanye pemilu adalah penyampaian pesan kampanye melalui lembaga penyiaran dan perusahaan pers dalam bentuk tulisan, gambar, suara, gabungan antara tulisan dan suara dan atau suara dan gambar, serta bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu.

Sementara, kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta Pemilu dapat dimaknai sebagai Kampanye Pemilu sepanjang memenuhi beberapa unsur, di antara meyakinkan pemilih dan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta Pemilu.

"Kampanye pemilu yang dilakukan melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Lalu dilakukan berdasarkan ketentuan iklan kampanye pemilu yang diatur dalam PKPU 15/2023 tentang Kampanye pemilu," terangnya.

Bagja menambahkan, pasca terbitnya SKB ini, maka akan berimbas terhadap materi iklan kampanye di stasiun tv, radio, media cetak dan internet. Peserta pemilu diminta untuk mengubah materi iklan yang tidak sesuai dengan SKB.

"Untuk iklan yang belum sesuai mohon diturunkan terlebih

dahulu. Sesuaikan dengan SKB ini. Diubah materinya agar tidak memuat unsur kampanye dalam iklan yang ditayangkan," tuturnya.

Terhadap iklan peserta pemilu yang telah ditayangkan di stasiun tv, radio, media cetak dan internet dan mengandung unsur kampanye, Bawaslu mengimbau peserta pemilu untuk melakukan perubahan materi iklan kampanye pemilu tersebut yang mekanisme dan tata cara penayangannya dilakukan secara berimbang.

Adapun pengaturan keberimbangannya sebagai berikut:

1. dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak sepuluh spot, berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap peserta Pemilu di setiap stasiun televisi setiap hari selama tahapan kampanye untuk iklan di televisi.

2. dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak sepuluh spot, berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap peserta Pemilu di setiap stasiun radio setiap hari selama tahapan kampanye untuk iklan di radio.

3. dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak 810 milimeter kolom atau satu halaman untuk setiap peserta Pemilu di setiap media cetak setiap hari selama tahapan kampanye untuk iklan di media cetak.

4. dibatasi maksimum secara kumulatif sebanyak satu banner untuk setiap peserta Pemilu di setiap media dalam jaringan setiap hari selama tahapan kampanye untuk iklan di media dalam jaringan.

Perlu diketahui, pengawasan dan pemantauan terhadap kampanye pemilu melalui media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, mengacu pada Surat Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers Nomor 0221.1/PM.04/K/1/02/2023 Nomor: 12/PR.07-NK/01/2012 Nomor 01/KPI/HK.01.10/02/2023 Nomor 02/DP/MoU/II/2023 tentang Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. •



ASN SUSAH NETRAL

Memastikan aparatur sipil negara (ASN) benar-benar bisa 100 persen netral saat Pemilu 2024 adalah hal yang sangat sulit. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

"Kalaupun kita ini tidak mungkin ya, 100 persen betul-betul netral. Harapan kita ASN itu baru berpihak ketika di dalam bilik suara," kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Senin, 18 Desember 2023.

Pernyataan Muhadjir tersebut menanggapi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang menyebut potensi pelanggaran netralitas ASN diperkirakan bisa mencapai 10 ribu kasus pada Pemilu 2024. Ketua KASN Agus Pramusinto menyebut potensi 10 ribu pelanggaran netralitas ASN tersebut dihitung berdasarkan perbandingan kasus pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020 yang saat itu tercatat menca-

pai 2.034 kasus.

Muhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya. ASN bisa secara sadar maupun tidak, mengekspresikan pilihan politiknya.

"Cuma bagaimana dia harus hati-hati untuk mengekspresikan preferensinya. Jangan sampai kemudian dia buat pelanggaran," katanya.

Ia meminta ASN untuk tidak mengekspresikan pilihan politiknya secara terbuka atau secara sadar, karena akan menyalahi aturan yang berlaku. Bagi Muhadjir, preferensi dan netralitas adalah dua hal yang berbeda.

"Yang penting menurut saya, jangan

saling memanfaatkan momentum-momentum tertentu untuk melakukan pelanggaran secara sadar," kata dia.

Kepala KASN Agus Pramusinto mengaku menerima laporan indikasi pelanggaran netralitas ASN di sejumlah daerah, pada masa kampanye Pemilu 2024. Meskipun belum bisa menyebutkan jumlah laporan yang masuk, Agus memastikan pihaknya melakukan kajian serta menghimpun bukti-bukti terkait indikasi pelanggaran itu.

"Harus ada bukti-bukti dan tentu saja kalau sudah terbukti akan kami beri rekomendasi untuk pemberian sanksi," ujar dia.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



(Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, mengimbau aparatur sipil negara (ASN) untuk tetap menjaga netralitas agar pelayanan publik tidak terhambat atau dapat dijalankan dengan maksimal pada tahun politik.

"Netralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparial. Jika ASN tidak netral, pelayanan publik akan terhambat karena kinerja ASN menjadi tidak profesional," ujar Anas.

Azwar menekankan ketidaknetralan ASN akan sangat merugikan negara, pemerintah, dan masyarakat. ASN yang tidak profesional dalam pemilu akan menyebabkan target-target pemerintah di tingkat lokal maupun nasional tidak tercapai dengan baik.

Kewajiban ASN untuk menjaga netralitas telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Netralitas diartikan sebagai ketidakberpihakan ASN dari segala bentuk pengaruh dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.

"ASN tetap punya hak pilih, namun hanya bisa diberikan di bilik suara, tidak di media atau kanal lain," tegas Anas.

ASN, kata Anas, perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan pemilu, termasuk Pemilihan Kepala Daerah.

Ia mengingatkan dalam gelaran pesta demokrasi itu ada beberapa area yang sering dilanggar, mulai dari ikut serta agenda kampanye, fasilitasi kegiatan kampanye, hingga penggunaan media sosial yang mendukung peserta pemilu.

"ASN agar berhati-hati dalam menggunakan media sosial terutama dalam suasana kampanye pemilu saat ini. Kami imbau agar ASN tidak melakukan kampanye atau sosialisasi di media sosial berupa posting (unggah), komentar, membagikan tautan, atau memberi ikon like (suka)," pesan Anas.

Di sisi lain, pemerintah juga telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah. SKB yang ditandatangani bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara (BKN),

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Bawaslu itu diterbitkan untuk menjamin terjaganya netralitas ASN.

Anas menambahkan SKB itu bertujuan mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas ASN demi terselenggaranya pemilu yang berkualitas. ASN yang melanggar netralitas akan dikenai sanksi.

"Sanksi yang diberikan mulai dari sanksi moral, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat, hingga diberhentikan secara tidak dengan hormat," kata Anas.

dapat menyebabkan ASN terlibat politik praktis," katanya.

ASN dan Tenaga Harian Lepas (THL) tidak diperkenankan terlibat dalam kampanye dan membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Pada masa kampanye saat ini, sanksi ringan sudah ditiadakan karena didapat kepada afiliasi bakal calon. Tetapi kalau sudah menjadi calon legislatif maupun presiden, sanksi yang dijatuhkan mulai dari sedang hingga berat. Adapun sanksi yang diberikan berupa penundaan kenaikan pangkat, penu-



Sementara, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menegaskan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berhati-hati di tahun politik dan tidak terlibat politik praktis yang dapat mengakibatkan terkena sanksi.

"Tingkatan sanksi yang diberikan tidak lagi ringan, namun sanksi sedang hingga berat," kata Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, Otok Kuswandaru, di

Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Senin.

Pada sosialisasi kebijakan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 tersebut, dia menegaskan, sanksi akan dijatuhkan kepada ASN yang terbukti terlibat langsung politik praktis.

"Jadi, ASN agar berhati-hati di tahun politik saat ini, karena banyak hal yang

runan jabatan hingga pemberhentian jika ASN terbukti melanggar.

"Sanksi kedisiplinan itu diberikan sesuai tingkatan pelanggaran," ujarnya.

Karena itu, para ASN harus bersikap netral dengan tidak memberikan dukungan dan melakukan yang dilarang terhadap seseorang, kelompok maupun golongan terkait partai politik.

"ASN harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan sehingga pada proses pelaksanaan pemilu, ASN memiliki integritas dan tak ada yang diproses," katanya.

Pegawai pemerintahan harus bisa melaksanakan fungsi dengan baik sebagai aparatur negara. "Di antaranya menyangkut kebijakan dan pelayanan publik serta ASN sebagai pemersatu bangsa," katanya. ●



KHOFIFAH LAWAN KOTAK KOSONG

Khofifah Indar Parawansa terancam melawan kotak kosong di Pilgub Jatim 2024. Pasalnya, belum ada partai yang memunculkan satu nama pun soal sosok rival Khofifah. Apalagi, belum ada seseorang yang bisa menandingi elektabilitas Khofifah di Jatim.

Selain itu, nama Khofifah juga ramai direkomendasi sejumlah partai besar. Diketahui, Khofifah telah mendapat rekomendasi untuk maju sebagai calon gubernur Jatim dari tiga partai. Ketiga partai itu antara lain PAN, Gerindra, dan Demokrat. Sedangkan, partai-partai lain mulai dari PKB, Golkar, hingga PPP telah melempar sinyal akan mendukung Khofifah.

Khofifah telah menyatakan diri akan maju kembali sebagai calon gubernur Jatim setelah mengantongi banyak dukungan parpol.

"Insya Allah saya akan maju lagi di Pilgub Jatim 2024," ujar Khofifah saat memberi orasi saat peringatan Hari Ibu yang dihadiri 15 ribu kader Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, Kamis, 7 Desember 2023.

Rekomendasi un-

tuk maju sebagai cagub Jatim telah diterima Khofifah dari Partai Amanat Nasional (PAN). Ketum PAN Zulkifli Hasan yang menyerahkan sendiri rekomendasi tersebut pada Khofifah, Senin, 4 Oktober 2023.

"Saya khusus memang hadir di Jawa Timur ini dan acara ini juga saya pesan agar Bu Khofifah hadir, karena saya ingin mengumumkan calon gubernur (Jawa Timur) PAN 2024 mendatang sudah saya bawa rekomendasinya. Sudah saya bawa rekomendasinya yaitu Ibu Khofifah. Saya minta Ibu Khofifah maju ke depan," kata Zulkifli Hasan saat acara konsolidasi dengan Caleg PAN dari Jatim di Hotel Sheraton Surabaya.

Lalu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), beberapa waktu lalu mengatakan akan mengusung Khofifah di Pilgub Jatim 2024. Meski, SBY belum secara resmi memberikan rekomendasi pada Khofifah.

"Demokrat memutuskan akan kembali mengusung Ibu Khofifah sebagai gubernur masa depan," kata SBY usai mengunjungi Makam Bung Karno di Blitar, Jumat, 8 Desember 2023.

Tak hanya itu, sinyal pengusungan Khofifah sebagai Cagub Jatim juga datang dari Partai Golkar. Ketua Golkar Jatim M Sarmuji tetap memfavoritkan Khofifah sebagai Cagub Jatim 2024, meski banyak nama yang mendesaknya maju.

"Sebenarnya sudah banyak DPD kabupaten/kota yang dalam rapimda mengusulkan saya maju sebagai gubernur, tapi saya memfavoritkan Bu Khofifah sebagai calon gubernur," kata Sarmuji, Sabtu, 9 Desember 2023.

"Bu Khofifah itu mentor saya sejak saya SMA. Apalagi selama kepemimpinan beliau Jawa Timur mengalami banyak kemajuan yang berarti. DPP



Golkar juga sudah memberikan mandat ke Bu Khofifah sebagai bakal calon gubernur. Jadi kami tetap memprioritaskan Bu Khofifah sebagai calon gubernur di 2024," tambahnya.

Sementara itu, DPP Partai Gerindra menyerahkan rekomendasi cagub Jatim 2024 kepada Khofifah yang diberi-

tambahnya.

Ini merupakan pertama kalinya Gerindra memberikan rekomendasi kepada Khofifah. Di dua edisi Pilgub Jatim sebelumnya, Gerindra mencalonkan paslon lawan Khofifah. Di 2013, Gerindra mendukung Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Sedangkan

"Ini adalah yang paling penting di depan mata kita. Semua upaya yang kami miliki, kita tuangkan semuanya ke dalam pesta pemilu yang merupakan hajatan besar bangsa Indonesia. Pilpres penting, pileg penting, dan pilkada juga penting. Namun ada skala prioritas dulu. Saat ini Pemu 2024 tinggal



kan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.

"Saya berikan rekomendasi Cagub Jatim 2024 dari Gerindra kepada Khofifah," kata Hashim di Hotel Double Tree Surabaya, Minggu, 10 Desember 2023.

Hashim yakin Khofifah bisa menjadi gubernur Jatim di periode kedua. Apalagi, kinerja Khofifah selama ini sangat baik. "Saya salah satu fans ibu di Gerindra. Insya Allah ibu terpilih dan kita akan melaksanakan program-program amat dahsyat dan menciptakan lapangan kerja luar biasa," kata Hashim.

"Kita perlu kerja sama erat dengan ibu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan ke rakyat. Partai Gerindra tentu akan menyambut baik kesempatan bekerja sama dengan ibu,"

di 2018. Gerindra masuk parpol koalisi pendukung Gus Ipul-Puti Guntur Soekarno

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW Partai NasDem Jatim, Vinsensius Awey, mengatakan Pilgub Jatim masih jauh, meski Khofifah telah mendapat tiga rekomendasi cagub Jatim 2024 dari Gerindra, Demokrat, dan PAN.

"Untuk memilih Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030 itu baru akan dilaksanakan di bulan November 2024. Saat ini baru Desember 2023. Masih ada 1 tahun, jangan kesusu," kata Awey, Jumat, 15 Desember 2023.

Awey menyatakan fokus NasDem saat ini menang Pileg dan Pilpres 2024. Apalagi, Pemilu 2024 kurang dari 60 hari lagi.

2 bulan lagi, jadi kita raih kemenangan 1 per 1 dulu ya," jelasnya.

Mantan Anggota DPRD Kota Surabaya itu menyatakan, NasDem akan terlebih dahulu fokus memenangkan paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024.

"AMIN menang dulu dan tidak kalah penting segala upaya yang kami miliki mengantarkan partai NasDem masuk tiga besar pileg DPR RI untuk periode 2024-2029," terangnya.

Awey menegaskan NasDem memiliki hubungan baik dengan Khofifah Indar Parawansa. Apalagi pada Pilgub Jatim 2018, NasDem salah satu pengusung Khofifah.

"Hubungan selama ini baik saja. NasDem termasuk yang mengusung Khofifah periode 2018-2023 dan bah-

• INFO PILKADA

kan sebelum NasDem secara resmi mengusung pasangan Anies Baswedan dengan Cak Imin, pernah juga NasDem membuka lebar opsi Khofifah sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan,” ungkapnya.

“Kalau ditanya bagaimana hubungan Nasdem dengan Khofifah? Maka silakan ukur sendiri sampai sejauh mana hubungan NasDem dengan Khofifah dengan dua hal yang barusan saya sampaikan di atas,” sambungnya.

Di sisi lain, Khofifah telah memberi sinyal kuat dirinya memining kembali

gucapkan terima kasih pada seluruh jajaran pimpinan Partai Demokrat, terutama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Pak SBY dan Ketua Umum DPP PD Mas AHY, juga sekjen yang sudah memberikan rekomendasi kepada kami,” kata Khofifah di Hotel Westin Surabaya, Selasa (12/12/2023) malam.

Khofifah kemudian melempar sinyal akan bergandengan dengan Emil Dardak di Pilgub Jatim 2024. “Saya dan Mas Emil Insya Allah untuk kembali berjuang di Pilkada 2024,” jelasnya.

la meminta doa restu kepada se-

menyebut, partai-partai lain masih berpikir dua kali untuk melawan Khofifah.

“Jadi posisi Khofifah ini di atas angin, rekom partai sudah dapat tiga yang resmi dan kemungkinan besar akan bertambah. Partai yang belum mengusung calon tentu akan berpikir dua kali untuk melawan Khofifah, karena kontestasi itu perlu popularitas dari calon dan tentunya logistik yang memadai, jika hanya salah satu yang dipunya, sulit untuk mengalahkan Khofifah sampai dengan saat ini,” kata Baihaki, Kamis, 14 Desember 2023.



Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jatim 2024. Hal itu disampaikan Khofifah usai menerima rekomendasi dari Demokrat sebagai cagub Jatim.

Awalnya Khofifah menyampaikan terima kasih kepada jajaran pengurus Demokrat yang memberinya rekomendasi Cagub Jatim 2024. Termasuk kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Saya mewakili Mas Emil juga men-

mua pihak agar pencalonannya nanti bisa berjalan lancar. “Saya mohon doa, restu, dan dukungan masyarakat Jawa Timur bahwa kami, saya dan Mas Emil, Insyaallah akan maju kembali dalam Pilgub periode kedua nanti,” tegasnya.

Khofifah mengaku rekomendasi dari Demokrat merupakan rekomendasi pertama dari partai yang sudah sepasang cagub dan cawagub. “Iya yang pertama (sepasang),” ujarnya.

Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Siraj,

la mengatakan, lawan Khofifah tergantung sikap PKB dan PDIP di Pilgub Jatim 2024. “Kalau PKB dan PDIP mau mengusung Khofifah, mungkin Pilgub Jatim 2024 lawan Khofifah adalah kotak kosong,” kata Baihaki.

Meski belum terlihat jelas lawan Khofifah di Pilgub Jatim, Baihaki menyebut, ada sejumlah nama yang berpotensi akan menjadi lawan Khofifah di Pilgub Jatim 2024. Dengan catatan PKB atau PDIP tidak mengusung Khofifah.

“PKB punya Gus Halim Iskandar, ada

Thoriqul Haq, hingga Baddrut Tamam. Di PDIP ada Tri Rismaharini, ada Achmad Fauzi, hingga Eri Cahyadi. Di luar nama partai, ada Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Namun, tentu kendaraannya (partainya) masih belum ada,” jelasnya.

Baihaki menjelaskan, lawan Khofifah di Pilgub Jatim 2024 masih samar. Sebab, partai politik masih fokus di Pileg 2024 dan Pilpres 2024. Apalagi, acuan kursi untuk mengusung kandidat di Pilgub Jatim berdasar torehan Pileg 2024.

Syarat mengusung calon minimal 20 persen, berarti harus 24 kursi DPRD Jatim. Nah, saat ini masih belum jelas partai mana yang bisa meraih kursi sebanyak itu. Kalau mengacu pada perolehan Pileg 2019, hanya PDIP dan PKB yang bisa mengusung sendiri calon.

“Namun, Pileg 2024 ini saya prediksi banyak kejutan dan dominasi PDIP dan PKB mulai diganggu partai-partai lain,” bebernya.

Baihaki menyatakan, untuk partai-partai yang ingin kadernya bisa berpeluang jadi gubernur Jatim pada 2029, maka harus diturunkan di Pilgub Jatim 2024. Meski harus kalah di 2024, setidaknya mereka punya tabungan elektabilitas untuk 2029. Potensi itu ada di kader-kader PKB dan PDIP.

“Namun, partai-partai besar seperti PDIP dan PKB pasti akan berhitung cermat mengusung calon sendiri di Pilgub 2024 ini. Memang ini waktunya untuk mengeluarkan calon sendiri. Hitungannya jika nantinya kalah calon mereka, minimal mereka punya tabungan elektabilitas untuk calon yang bisa dimajukan kembali di Pilgub Jatim 2029, di mana Khofifah sudah tidak bisa maju ke periode ketiganya alias tidak ada incumbent yang dominan,” jelasnya.

“Melihat arah politik hari ini, baik PKB dan PDIP, belum ada yang terang-terangan menyatakan akan memajukan calon sendiri atau minimal branding dari salah satu figur di antara kedua partai itu. Kita hanya melihat geliat dari Achmad Fauzi PDIP yang mulai ramai di baliho-baliho dan pemberitaan,” tambahnya.

Untuk calon independen, Baihaki menyebut potensi itu ada. Hanya saja, ia menyebut kekuatannya akan sulit menandingi Khofifah. •



MAMAN ABDURRAHMAN HARAPAN BARU KALBAR

Pertarungan sengit dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kalimantan Barat (Kalbar), persaingan merebut kursi Gubernur Kalbar pada 2024 nampaknya akan menjadi semakin menarik dan kompleks.

Keberanian beberapa tokoh politik untuk bersaing di tengah ajang penuh prestise ini turut memeriahkan persaingan. Selain petahana Sutarmidji yang diperkirakan akan kembali mencalonkan diri, muncul pula sejumlah figur lain yang siap memasuki pertarungan politik tersebut.

Salah satu figur yang telah menyatakan kesiapannya untuk bertarung dalam Pilkada Kalbar 2024 adalah Maman Abdurrahman, seorang politisi muda yang telah meraih pengakuan nasional.

Keputusannya ini diumumkan setelah menerima rekomendasi dari rapat pimpinan daerah (Rapimda) Partai Golkar baru-baru ini.

"Saya se-

bagai kader Partai Golkar dan Ketua DPD 1 Partai Golkar Kalbar menyatakan siap. Dan kita akan menindaklanjuti keputusan atau rekomendasi dari Rapimda Partai Golkar Kalbar dan segala sesuatunya nanti kita persiapkan," ungkap Maman, belum lama ini.

Maman menegaskan bahwa pemilihan Gubernur Kalbar menjadi harapan dari Partai Golkar, dan dengan posisinya sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Kalbar, dia berharap dapat memberikan kontribusi signifikan dalam kontestasi Pilgub Kalbar tahun 2024.

"Tentu semakin banyak kandidat, akan semakin baik dan positif. Agar masyarakat Kalbar bisa punya beberapa pilihan dalam memilih calon kepala daerah, ini masih panjang," katanya, menambahkan bahwa proses politik masih dinamis dan bahwa ia menghormati keputusan Rapimda.

Sebagai seorang bakal calon gubernur, Maman juga menyadari pentingnya memenuhi syarat, salah satunya adalah menjadi ketua partai. Oleh karena itu, dia menekankan perlunya sukses dalam pemilu legislatif sebagai langkah awal sebelum f o k u s

pada Pilkada.

Dukungan dari organisasi Perempuan Partai Golkar (KPPG) serta sayap dan ormas partai Golkar lainnya turut menguatkan langkah politik Maman Abdurrahman dalam menjalani arena politik yang penuh tantangan ini.

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) 1 Partai Golkar Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) juga memberikan mandat penuh kepada Maman untuk menentukan Calon Wakil Gubernur yang akan mendampingi.

Maman mengklaim bahwa suara dari berbagai lapisan masyarakat ini memotivasi dirinya untuk memenuhi harapan yang diberikan oleh masyarakat Kalbar.

Dia menambahkan bahwa dukungan yang besar ini bukan hanya dari kader Partai Golkar, melainkan juga dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan kemajuan bagi daerah asalnya.

"Dukungan besar datang bukan hanya dari kader Partai Golkar, melainkan juga dari berbagai elemen masyarakat yang menginginkan kemajuan bagi daerah asalnya," sambung Maman.

Lebih lanjut, Maman mendorong agar Pilkada Provinsi Kalbar 2024 diwarnai oleh perdebatan konstruktif yang membahas kemajuan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dia menekankan bahwa masyarakat Kalbar telah semakin cerdas dan dewasa dalam berdemokrasi serta menentukan pilihan.

"Fokus utama kami adalah meningkatkan perolehan suara dan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalbar. Kemenangan di Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) di Provinsi Kalbar akan sejalan dengan keberhasilan Pilkada mendatang," tegasnya.

Pengamat Politik Kalbar, Ireng Maulana MA menyatakan,

bahwa kehadiran Maman Abdurahman sebagai calon dalam Pilgub Kalbar membawa nuansa baru dalam peta politik daerah tersebut.

Ireng Maulana menekankan bahwa Maman Abdurahman perlu menunjukkan ide dan gagasannya untuk memajukan Kalbar. Hal ini dianggap penting untuk mengatasi persoalan politik identitas yang sering muncul dalam Pilkada Kalbar.

Ireng Maulana menyatakan bahwa tanpa ide yang jelas, kemunculan Maman Abdurahman mungkin akan terasa biasa.

Ireng Maulana menganggap keputusan Partai Golkar Kalbar untuk mengusulkan Maman Abdurahman sebagai calon gubernur sebagai langkah berani dan penting.

"Kemunculan Maman menambah opsi politik baru bagi masyarakat yang mungkin bosan dengan profil kandidat yang sudah dikenal," katanya.

Dalam analisisnya, Ireng Maulana menyebut bahwa kehadiran Maman Abdurahman dapat mengubah dinamika politik di Kalbar dengan membawa narasi dan wacana yang berbeda.

Menurutnya, Maman, yang jauh lebih muda, memiliki potensi untuk membawa gagasan yang lebih segar dan menarik daripada dua kandidat utama yang cenderung berfokus pada isu infrastruktur.

"Partai Golkar Kalbar, yang dulunya memiliki akar kuat di banyak wilayah, kini mengalami kehilangan keterhubungan dengan masyarakat. Oleh karena itu, Maman perlu bekerja keras untuk mendekatkan partainya dengan masyarakat dan membuktikan bahwa Golkar masih relevan dan dapat diandalkan untuk kepentingan publik," bebernya.

Ketua Harian DPD II Partai Golkar Kota Pontianak, Beby Nailufa, menyatakan bahwa keputusan partainya untuk mengusung Maman sebagai Calon Gubernur Kalbar merupakan jawaban atas aspirasi dan harapan masyarakat Kalbar. Beby menekankan bahwa masyarakat menginginkan perubahan dan memerlukan pemimpin yang tidak memihak pada etnis atau agama tertentu.

Beby menambahkan bahwa Ma-

man adalah sosok muda yang dianggap memiliki visi, gagasan, dan ketegasan dalam menjalankan tugasnya.

"Warga Kalbar berharap agar pemimpin muda ini dapat memaksimalkan potensi pembangunan dan mampu mengakomodir kepentingan bersama," tambahnya.

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Kalbar, Haryadi Zuri-ansyah, menegaskan komitmennya untuk mendukung keputusan Rapimda dan Rakerda Partai Golkar Provinsi Kalbar.

Haryadi berjanji untuk memobilisasi semua generasi muda di Provinsi Kalbar guna mendukung Maman sebagai Calon Gubernur.

"Sementara kami fokus pada upaya



pemenangan Partai Golkar di Pileg dan Pilpres 2024, namun, keputusan mengenai Calon Gubernur Kalbar dari Partai Golkar akan kami sosialisasikan bersamaan. Terlebih lagi, mengingat calon yang diusung merupakan sosok pemimpin muda," ujar Haryadi.

Sementara, Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Jumadi mengungkapkan hal ini merupakan keputusan yang biasa, terutama karena Golkar merupakan partai besar. Ia menyatakan bahwa keputusan tersebut tidak terlalu mengejutkan.

Menurut Jumadi, perbedaan antara Pilkada dan pileg cukup signifikan. Baginya, keputusan ini diambil untuk membangun solidaritas menghadapi Pemilu legislatif pada tahun 2024.

"Meskipun kita menyadari bahwa keputusan awal dapat berubah seiring berjalannya waktu karena proses yang

terus berlangsung," tambahnya.

Menurutnya, dinamika politik berperan dalam penentuan figur untuk Pilkada, di mana mesin politik bergerak dalam pileg, sementara Pilkada lebih fokus pada figur tertentu. Keputusan tersebut melibatkan kalkulasi politik, termasuk elektabilitas, popularitas calon, dan pembangunan koalisi.

Jumadi menekankan bahwa meskipun kompleks, jika Golkar telah memutuskan Maman Abdurrahman sebagai calon gubernur, itu adalah keputusan yang sah tanpa masalah.

Menurutnya, keputusan ini juga melibatkan kalkulasi yang dapat berubah seiring waktu, tergantung pada dinamika politik dan hasil survei. Jumadi menyadari bahwa popularitas dan elekta-

bilitas calon dapat memengaruhi hasil akhir Pilkada, dan bahwa pengalaman Pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa memaksakan calon dengan hasil survei rendah bisa sulit.

"Kita menghargai keputusan Golkar sebagai langkah konsolidasi internal yang baik. Namun, dia juga mencatat bahwa hasil akhirnya bisa berbeda, tergantung pada perkembangan dinamika politik," ungkapnya.

Dia menyoroti pentingnya elektabilitas dalam konteks Pilkada, di mana basis pendukung Golkar dianggap sebagai modal, meskipun mengakui adanya volatilitas dalam pergeseran loyalitas dan dinamika koalisi.

"Bahwa segala kemungkinan terbuka, dan hasil akhir Pilkada sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang melibatkan hasil dari Pemilu legislatif," pungkasnya. *IRY●

PERJALANAN MULUS BOBBY NASUTION MAJU PILGUB SUMUT 2024

Wali Kota Medan, Bobby Nasution, sepertinya akan mendapati perjalanan mulus dalam langkahnya naik kelas menjadi Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Hingga saat ini, dua partai politik telah mendukung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan dua partai yang memberikan restu kepada Bobby untuk bersaing dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024.

Partai Golkar bahkan memberikan opsi kepada Bobby, apakah ia akan tetap menjadi Wali Kota Medan untuk dua periode atau mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan bahwa Bobby menerima dua surat tugas, satu sebagai bakal calon Gubernur Sumut dan satu lagi sebagai bakal calon Wali Kota Medan.

"Tadi saya bilang Pak Bobby itu dapat dua surat tugas sebagai bakal calon Gubernur Sumut dan juga sebagai bakal calon wali kota Medan," ujar Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia.

Doli menyatakan bahwa komunikasi antara Partai Golkar dan Bobby sudah terjalin sejak lama, bahkan sejak Pilkada Medan 2020 di mana Golkar pertama kali mendukung Bobby.

Menurut Doli, komunikasi antara Golkar dan Bobby terus berlang-

sung sebelum Bobby dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai kader oleh DPC PDIP Medan. Meskipun terkait keanggotaan partai, Doli menyerahkan keputusan tersebut kepada Bobby.

"Bobby pertama kali yang mengusung Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara. Kami mengundang pertama kali, kami juga menyematkan baju Golkar kepada Pak Bobby. Nah, kita komunikasi selama ini bagus. Walaupun kemarin beliau tercatat sebagai kader PDIP," ucapnya.

Doli menegaskan bahwa Golkar memiliki banyak nama calon yang diusulkan di setiap daerah, dan proses penilaian dan evaluasi terhadap nama-nama tersebut akan dilakukan secara berkala.

"Sekarang inikan masih banyak nama-nama ya, satu daerah itu ada yang tujuh atau delapan (nama), nah nanti kita akan nilai, nama-nama itu akan kita nilai tiap bulan nanti akan kita evaluasi," imbuhnya.

Diketahui, Partai Golkar tidak hanya mengeluarkan surat tugas untuk Bobby Nasution, tapi juga kepada Ketua DPD I Golkar Sumut, Musa Rajekshah alias Ijeck sebagai bakal calon Gubernur Su-

matera Utara dalam Pemilihan Gubernur Sumut 2024. Keputusan akhir dari Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, masih dinanti.

Dukungan Golkar terhadap Ijeck dan Bobby terungkap dalam surat DPP Partai Golkar dengan nomor: Sund- 308 / GOLKAR/XI/2023. Surat tersebut ditandatangani oleh Waketum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris DPP Golkar Lodewijk F Paulus.

Isi surat menunjukkan undangan untuk menghadiri pengarahannya Ketua Umum DPP Partai Golkar kepada Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Partai Golkar, seperti yang tertera dalam surat yang diterbitkan pada Rabu (22/11/2023).

"Undangan menghadiri pengarahannya Ketua Umum DPP Partai GOLKAR kepada Bakal Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Partai GOLKAR," demikian tertulis di dalam surat yang dilihat, Rabu (22/11/2023).

Dalam lampiran surat tersebut, terdapat dua nama yang disebut sebagai calon Gubernur Sumut yang akan diusung oleh Golkar.

Sekretaris Golkar Sumut, Ilham-syah, membenarkan penunjukan kedua nama tersebut, yaitu Bobby dan Ijeck.

"Betul (Golkar usulkan Bobby dan Ijeck jadi Cagub Sumut), di Medan Bobby dapat juga," ujar Ilham-syah.

Pada Rapat Pimpinan Daerah (Rapidma) Golkar Sumut III di Kota Medan, Senin (11/12/2023),

Bobby turut hadir meskipun bukan sebagai kader Golkar. Bobby mengungkapkan bahwa kedatangannya disebabkan oleh undangan



gan untuk menghadiri acara tersebut.

"Ini diundang untuk hadir, ya kita hadir di sini," kata Bobby Nasution usai pembukaan Rapimda III Golkar Sumut, Senin (11/12/2023).

Setelah acara tersebut, Bobby mengakui menerima surat tugas sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara. Selain itu, ia juga mendapatkan mandat untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam Pemilihan Presiden 2024.

"Ya salah satunya kan bukan hanya jadi kepala daerah, tapi di mandat juga ditugaskan untuk memenangkan Prabowo-Gibran," ucapnya.

Airlangga Hartarto enggan memastikan pilihan antara Ijck dan Bobby. Menko Perekonomian tersebut menyatakan bahwa Golkar masih fokus pada Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).

"Jadi kita Pileg Pilpres dulu, Pak Ijck juga akan maju di Pileg," kata Airlangga Hartarto usai Rapimda III Golkar Sumut, Senin (11/12/2023).

PAN juga menyatakan dukungan kepada Bobby untuk menjadi Gubernur Sumut diungkapkan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Zulhas yakin bahwa Bobby akan berhasil terpilih sebagai Gubernur Sumut melalui PAN, sebagaimana disampaikan dalam unggahan di akun Instagram resminya.

Zulhas menyatakan bahwa PAN pertama kali mendukung Bobby untuk maju sebagai Wali Kota Medan, dan hasil kinerjanya di Kota Medan dinilai positif. Setelah melakukan diskusi dengan Bobby, Zulhas menyatakan keyakinannya bahwa Bobby akan terpilih sebagai Gubernur Sumut dari PAN.

"Saya dengan wali kota saudara Bobby dulu kita dukung pertama kali untuk maju Wali Kota ya, sekarang kelihatan hasil kerjanya Kota Medan semakin bagus, semakin maju, pembangunan di sana sini, saya kira Kota Medan lebih cepat maju ya kan," kata Zulhas.

Kemudian Zulhas menyebutkan jika dia telah berdiskusi dengan Bobby. Bobby disebut bakal terpilih sebagai Gubsu dari PAN.

"Nah oleh karena itu tadi kami diskusi insyaallah nanti akan terpilih jadi Gubernur Sumatera Utara dari Partai Am-

nat Nasional," sebutnya.

Saat ditanya apakah Bobby sudah resmi bergabung dengan PAN, Zulhas hanya mengucapkan jika sudah salaman dan Bobby terlihat tersenyum. Saat ditanya kapan kartu tanda anggota (KTA) akan diberikan ke Bobby, Zulhas menuturkan jika keluarga.

"Udah salaman gini. Ya keluarga, jadi gini ya, Pak Jokowi PAN banget, nggak percaya?," ucapnya.

Setelah itu, Bobby menjelaskan jika

"Tentang Bobby sebagai cagub Golkar itu bisa dipahami sebagai strategi Golkar merespon cepat status Bobby di partai sebelumnya. Partai Golkar lebih cepat menangkap peluang ini ketimbang partai lain," ungkap Faisal Riza kepada detikSumut pada Senin (27/11/2023).

Surat tugas ini dianggap sebagai uji kinerja sebelum Pemilihan Presiden dan Golkar ingin melihat sejauh mana peran Bobby dalam memenangkan



PAN adalah keluarga Presiden Jokowi. Sedangkan dirinya adalah keluarga Jokowi, sehingga otomatis menjadi keluarga PAN.

"PAN ini adalah keluarga Pak Jokowi, Pak Jokowi keluarga PAN, kebetulan saya keluarga Pak Jokowi, jadi keluarga PAN juga," jelas Bobby.

Seorang pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU), Faisal Riza, menginterpretasikan surat tugas sebagai respons Golkar terhadap kontroversi keanggotaan Bobby di PDIP. Golkar dianggap lebih cepat mengambil peluang dibandingkan dengan partai lain.

Pilpres.

Riza menilai bahwa pemberian surat tugas yang sama kepada Ijck sebagai bentuk penghargaan atas perannya sebagai Ketua DPD Golkar Sumut dan dukungan solid yang dimilikinya. Oleh karena itu, Golkar akan menilai kinerja keduanya dalam Pileg dan Pilpres untuk menentukan siapa yang akan secara resmi diusung oleh partai.

"Sekali lagi, sejauh mana keseriusan dalam arti rekomendasi final partai dalam pencalonan mereka, bagi keduanya, saya melihat akan sangat tergantung pada capaian kinerja mereka di Pileg dan Pilpres," tutupnya. •IRY

USUNG CALON SENDIRI, PKB SIAPKAN 3 KANDIDAT CAGUB KALTIM 2024

Dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Timur 2024, Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur (Kaltim), Syafruddin, telah mengumumkan partainya berencana mengusung calon sendiri.

Bahkan, Syafruddin sudah menyiapkan tiga nama yang akan diusung menjadi Cagub Kaltim 2024 berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) beberapa waktu lalu.

"Ada tiga nama yang akan kami dukung untuk posisi Cagub, sebagaimana disepakati dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) beberapa waktu lalu, sesuai arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB," katanya.

Ia kemudian mengungkapkan tiga calon yang telah dipersiapkan untuk berkompetisi dalam Pilkada mendatang, yaitu Wali Kota Bontang, Basri Rase, Bupati Paser, Fahmi Fadli, dan legislator Kaltim, Sutomo Jabir.

"Kami berkomitmen untuk mengusung kader internal partai kami dalam Pilkada Kaltim 2024," jelasnya.

Dia juga menambahkan bahwa PKB Kaltim telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam Pilkada Kaltim 2024 tanpa mengikatkan diri pada target tertentu, baik sebagai calon gubernur maupun calon wakil gubernur.

Keputusan akhir akan dipengaruhi oleh perkembangan politik di daerah tersebut.

Syafruddin mengakui bahwa ada dua kepala daerah kader PKB, yaitu

Wali Kota Bontang dan Bupati Paser, yang dinilai memiliki kapabilitas yang cukup untuk menjadikan PKB optimis dalam memenangkan pertarungan Pilkada Kaltim 2024.

"Salah satu dari dua kepala daerah ini (Bontang dan Paser) mungkin akan kita dukung, dan keduanya telah terbukti mampu mengelola wilayahnya masing-masing," tambahnya.

Walikota Bontang Basri Rase telah memberikan isyarat bahwa dia berencana untuk maju kembali dalam Pilkada 2024. Dirinya telah memimpin Bontang selama lebih dari dua tahun bersama dengan wakilnya, Najirah.

Dalam proses kepemimpinannya, Basri Rase mengklaim memiliki modal besar untuk kembali maju, seiring dengan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin kuat sejalan dengan pencapaian visi dan misinya yang telah mencapai 50 persen.

Basri Rase menyatakan bahwa salah satu tolak ukur pencapaiannya dapat dilihat dari janji penanganan banjir, yang menurutnya berjalan sesuai rencana.

Basri Rase juga mengklaim berhasil meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui berbagai program seperti "rantang kasih" dan penyediaan wifi gratis. Hal ini membuatnya yakin bahwa realisasi visi dan misinya pada tahun ini dapat mencapai 70 persen.

"Ini membuat saya optimis untuk maju kembali," ungkapnya.

Basri.

Basri Rase juga menekankan bahwa selama kepemimpinannya, ia telah berhasil memudahkan masuknya investasi ke Kota Bontang, sesuai dengan salah satu visinya yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah investasi di wilayah tersebut.

"Saya tidak merasa terbebani dalam memimpin Bontang, semuanya berjalan dengan lancar. Biarkan masyarakat yang menilai," pungkasnya.

Basri Rase adalah sosok yang sangat terkenal di Kota Bontang saat ini, terutama karena dia menjabat sebagai Wali Kota Bontang untuk periode 2020-2024.

Keberhasilannya dalam Pilkada 2020 lalu, di mana Partai PKB mendukungnya sebagai salah satu calon Wali Kota, telah menjadikan namanya begitu populer di kancah politik lokal.

Ketenarannya di dunia politik tidak datang dengan cepat. Awal karir politiknya dimulai ketika dia terpilih sebagai anggota DPRD pada pemilihan anggota legislatif tahun 2009. Dia kemudian terpilih kembali untuk periode kedua pada pemilihan



anggota legislatif tahun 2014.

Namun, dalam waktu singkat setelah menjabat sebagai anggota legislatif periode kedua, Basri Rase memutuskan untuk mengundurkan diri dan mencalonkan diri sebagai Wakil Wali Kota Bontang melalui jalur independen pada pemilihan wali kota Bontang tahun 2015.

Hasilnya, dia berhasil memenangkan kursi Wakil Wali Kota berpasangan dengan calon Wali Kota saat itu, Bunda Neni.

Setelah lima tahun menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Bontang dalam pemilihan sebelumnya, bersama pasangannya. Kembali, dia meraih keberuntungan dan terpilih sebagai Wali Kota Bontang untuk periode 2020-2024.

Namanya bahkan disebut sebagai salah satu calon potensial dalam Pilgub Kalimantan Timur mendatang di dalam partainya sendiri, karena selain popularitasnya di kalangan anggota partai dan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di Kota Bontang.

Sosok lain adalah Bupati Paser Fahmi Fadli yang baru-baru ini menyita perhatian dengan membagikan mobil dinas Xpander Cross baru kepada seluruh kepala desa di Kabupaten Paser.

Kebijakan ini, yang awalnya dimaksudkan untuk mendukung kinerja pemerintahan desa, kini menjadi pusat perdebatan dengan nuansa politik yang terasa kuat, terutama mengingat tahun ini merupakan tahun politik.

"Pengadaan mobil dinas ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan desa," katanya.

Mereka menegaskan bahwa kebijakan ini tidak bermotif pribadi dan semata-mata bertujuan untuk mendukung operasional pemerintahan di tingkat desa.

Namun, sebagian masyarakat menilai kebijakan tersebut memiliki unsur politis yang cukup kuat, terutama

mengingat konteks tahun politik yang sedang berlangsung. Skeptisisme muncul, dan sejumlah pihak meragukan niat baik di balik pemberian mobil dinas tersebut.

Fahmi Fadli sendiri memulai karirnya sebagai seorang dokter di RSUD Panglima Sebaya Tanah Grogot pada awal tahun 2000-an. Pada tahun 2004, ia mendirikan klinik bernama Azka Medika dan menjabat sebagai direktur hingga tahun 2009.

Setelah itu, pada tahun 2009, Fahmi Fadli memutuskan untuk terjun ke du-

gota DPRD Kaltim, Sutomo Jabir yang berkomitmen terus mengawal pendistribusian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau.

Jabir menegaskan, fokusnya adalah program-program yang pengaruhnya akan dirasakan langsung pada kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur di tiga daerah tersebut.

Sehingga, dia ingin memastikan supaya anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara baik bagi kesejahteraan



nia politik dengan menjadi Anggota DPRD Kabupaten Paser untuk periode 2009-2014.

Meskipun pada periode 2019-2024, Fahmi Fadli kembali terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Paser, jabatannya hanya berlangsung satu tahun.

Pada tahun 2020, ia memutuskan maju sebagai Calon Bupati Paser dan berhasil terpilih, menandai awal kepemimpinannya sebagai Bupati Paser untuk periode 2021-2024.

Perjalanan karir Fahmi

Fadli yang melibatkan lintasan dari profesi medis ke dunia politik turut menambah dimensi kontroversial terkait kebijakannya dalam mendistribusikan mobil dinas kepada kepala desa.

Nama lain yang juga siapkan sebagai Cagub Kaltim 2024 adalah ang-

masyarakat.

"Saya mengawal pengalokasian anggaran pada program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur di tiga daerah tersebut. Misalnya, penguraian banjir di Bontang, apa saja yang bisa dibantu dari Pemprov," kata Jabir.

Politisi PKB itu memberi atensi mengenai program prioritas, termasuk pengembangan sistem drainase, penyediaan air bersih serta pengelolaan limbah.

Jabir juga mencatat, penanggulangan banjir di Kota Bontang yang melibatkan proyek pembangunan bendungan di kawasan Sungai Suka Rahmat yang telah dimulai tahun ini mengalami hambatan dalam perizinan kawasan hutan dan studi kelayakan.

"Banjir di Bontang itu kiriman dari Kutim, itu sebabnya kami sudah beberapa tahun terakhir sebenarnya memperjuangkan izinnya. Bendungan itu nantinya akan menampung air kiriman dan mengatur debit air agar tidak meluap dan membanjiri Bontang," pungkasnya. •IRY





TANGGUNG JAWAB DAERAH AMANKAN ANGGARAN PILKADA

Kementerian Dalam Negeri terus mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penyelesaian itu penting untuk memastikan kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 terpenuhi.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan, UU 10/2016 tentang Pilkada telah jelas mengatur bahwa anggaran Pilkada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu meliputi kebutuhan anggaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah, Linmas, dan aparat keamanan Polri/TNI.

"Kita akan mendorong rekan-rekan kepala daerah untuk melakukan koordinasi dengan KPUD, Bawaslu daerah, TNI dan Polri untuk menghitung kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan, pengawasan, dan pengamanan," kata Tito pada Rapat Koordinasi Persiapan Pendanaan Pilkada dan Penandatanganan NPHD secara virtual, Selasa, 5 Desember 2023.

Mendagri juga menekankan agar anggaran yang telah disepakati bersama melalui NPHD dapat disalurkan sebanyak 40 persen dari APBD 2023 dan 60 persen APBD 2024. Mendagri telah mengingatkan kepala daerah mengenai persentase penyaluran anggaran tersebut sejak 24 Januari 2023 melalui surat edaran. Karena itu, mestinya Pemda telah mem-

persiapkannya.

"Kalau ada yang belum mengajukan KPU (maupun) Bawaslu segera minta untuk mengajukan, jangan sampai mendadak kemudian dibebankan di tahun 2024, padahal uangnya tidak ada," ujarnya.

Dia menjelaskan, Kemendagri telah menyisir kondisi keuangan seluruh daerah dalam mendukung Pilkada 2024. Sebanyak 545 daerah bakal melaksanakan Pilkada, termasuk di antaranya 4 daerah otonom baru (DOB) Papua. Namun, pembiayaan Pilkada di 4 DOB tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan demikian, sebanyak 541 daerah pelaksanaan Pilkadaanya didukung oleh APBD.

Mendagri mengatakan, berdasarkan data per 4 Desember 2023, dari 541 daerah tersebut, sebanyak 480 daerah telah menandatangani

NPHD dengan KPUD. Sementara yang telah menandatangani NPHD dengan Bawaslu

sebanyak 432 daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum semua daerah menyelesaikan NPHD. Karena itu, dirinya meminta daerah yang belum menandatangani NPHD segera menyelesaikannya.

"Ini nanti kita akan lakukan rapat zoom meeting per region, nanti (daerah) bagian tengah dan bagian timur kita akan rapat khusus, khusus hari ini rapatnya memang dengan Aceh, Sumut, Sumbar, dan Jatim," jelasnya.

Sebelumnya, Tito mendorong seluruh pemerintah daerah di Bengkulu segera menandatangani NPHD. Upaya ini perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan anggaran Pilkada Serentak 2024 di daerah tersebut terpenuhi.

Mendagri mengingatkan, penyelesaian penandatanganan NPHD ini juga telah diatur melalui Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.9.1/435/SJ Tahun 2023 tentang Pendanaan Kegiatan Pilkada Tahun 2024 yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah. Dalam SE tersebut menegaskan alokasi anggaran Pilkada 2024 dibebankan pada APBD 2023 dan 2024.

Selain itu, SE tersebut juga menekankan agar Pemda berkoordinasi dengan Bawaslu daerah dan KPUD dalam mengajukan usulan kebutuhan anggaran Pilkada.

"Saya sudah mengeluarkan SE dari 24 Januari 2023, mengingatkan untuk segera

melakukan komunikasi kepada jajaran KPUD (dan) Bawaslu daerah, Polri-TNI daerah masing-



masing untuk menyepakati dan kemudian segera untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD,” kata Mendagri pada Rapat Koordinasi Percepatan Penandatanganan NPHD Kegiatan Pilkada 2024 Provinsi Bengkulu secara virtual, Selasa, 28 November 2023.

Khusus untuk Provinsi Bengkulu, Mendagri menambahkan, sebanyak 3 daerah belum menandatangani NPHD dengan KPUD dan 5 daerah dengan Bawaslu. Dirinya meminta daerah yang belum menyelesaikan NPHD untuk segera berkoordinasi.

“Nah ini saya mohon untuk segera mungkin koordinasi, bagi yang sudah menandatangani NPHD terima kasih banyak dan segera kalau bisa 40 persen (disalurkan),” tegasnya.

Terkait dengan anggaran keamanan, Mendagri juga mengimbau agar Pemda berkoordinasi dengan jajaran keamanan di daerahnya masing-masing. Upaya ini penting dilakukan agar pelaksanaan Pilkada 2024 dapat berjalan baik.

“Tolong koordinasi dengan jajaran Polda dan Kodam, Korem, untuk mengajukan anggaran pengamanan dan setelah itu dievaluasi, duduk bersama, ketemu angka yang sesuai dan setelah itu segera tanda tangani juga NPHD,” tegasnya.

Tito juga meminta pemerintah daerah di Provinsi Riau segera mempercepat realisasi penandatanganan NPHD. Mendagri menyoroti 5 kabupaten di Provinsi Riau yang belum melakukan penandatanganan NPHD baik dengan KPUD maupun Bawaslu daerah. Mereka di antaranya Kabupaten Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Indragiri Hulu, dan Kuantan Singingi.

“Saya minta semua daerah termasuk Riau, ini kami plotot, yang mana yang sudah melaksanakan NPHD, mana yang belum, NPHD-nya yang mana kepada Komisi Pemilihan Umum saja atau Badan Pengawas Pemilu atau sudah menyertakan TNI-Polri,” imbuhnya.

Mendagri menerangkan, berdasarkan data yang dikantonginya sebanyak 8 daerah termasuk provinsi di daerah tersebut telah menyelesaikan penandatanganan NPHD dengan KPUD maupun Bawaslu daerah. “Untuk

daerah yang sudah menandatangani NPHD tolong untuk segera di follow up 40 persen ditransfer kepada penerima hibah, nanti sisanya 60 persen tahun depan, untuk yang belum segera koordinasi KPUD, Bawaslu, dan Polri-TNI,” terangnya.

Mendagri juga mengingatkan daerah yang belum menyelesaikan NPHD agar segera berkoordinasi dengan KPUD, Bawaslu daerah, maupun pihak keamanan. Koordinasi ini dilakukan agar mereka segera mengajukan usulan anggaran kebutuhan Pilkada 2024.

“Kalau seandainya sudah ada besaran disepakati segera ditandatangani NPHD, kalau sudah ditandatangani NPHD-nya, realisasikan yang 40 pers-

2024 maka beban APBD Tahun Anggaran 2024 akan sangat berat, karena itu dicadangkan 40 persennya di tahun 2023,” terang Suhajar.

Suhajar menegaskan, sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berperan penting dalam memastikan ketersediaan anggaran Pilkada 2024 terpenuhi. Hingga saat ini Kemendagri juga terus mendorong pemerintah daerah menyelesaikan penandatanganan NPHD untuk Pilkada.

“Jadi rapat kemarin yang dipimpin oleh Bapak Mendagri bahwa NPHD belum di semua daerah, karena itu Pak Mendagri berpesan untuk memastikan kesediaan anggaran,” ujarnya.



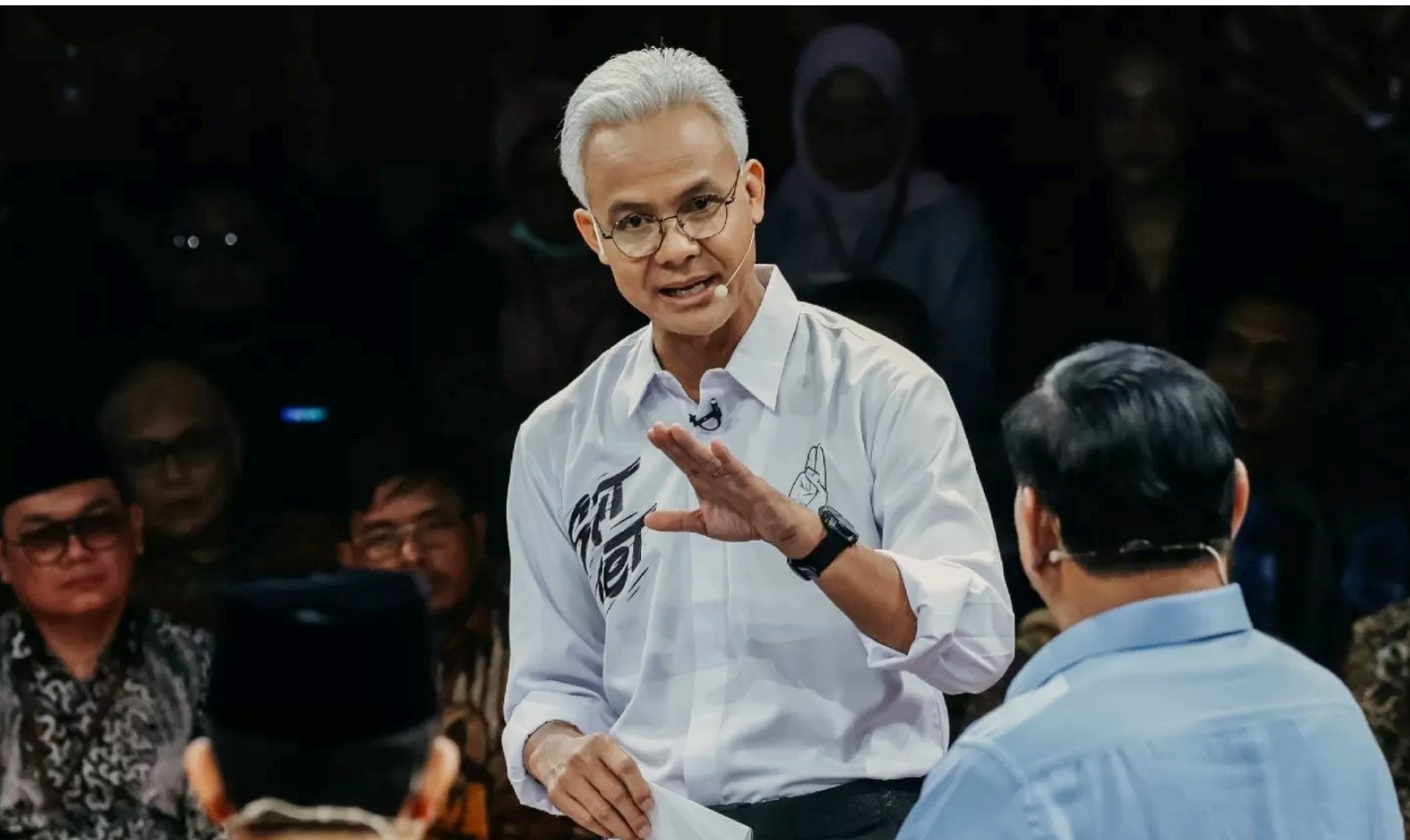
en segera dalam waktu 14 hari setelah ditandatangani,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Kemendagri, Suhajar Diantoro, juga meminta seluruh Sekretaris Daerah mendukung penyediaan anggaran Pilkada Serentak 2024 terpenuhi. Hal itu ditegaskannya pada acara Pengukuhan Pengurus Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Komisariat Wilayah (Kowil) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau Tahun 2023 di Kota Pekanbaru, Riau, Jumat, 24 November 2023.

Dia mengatakan, Mendagri telah mengarahkan agar seluruh daerah mencadangkan anggaran Pilkada 2024 melalui APBD 2023 dan 2024. “Karena jika semua ditumpuk di tahun

Di lain sisi, Suhajar juga menyinggung pentingnya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Dia menegaskan, netralitas ASN merupakan bagian dari budaya demokrasi. Aturan mengenai netralitas tersebut juga sudah dijelaskan diatur, sehingga harus dipatuhi.

Suhajar mengaku mengantongi data mengenai ASN yang tidak netral. Data tersebut menjadi acuan dalam memberikan kebijakan kepada yang bersangkutan, termasuk saat penunjukan pejabat kepala daerah. Bagi ASN yang tidak netral juga berpotensi dilaporkan kepada Bawaslu di daerah maupun pusat untuk ditindaklanjuti. •



ADA SUMBER ILEGAL UNTUK KAMPANYE

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen di semester II 2023. PPATK kini sedang mendalami hal tersebut.

"Kita lihat transaksi terkait dengan pemilu masif sekali laporannya ke PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen. Di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, ini kita dalam," kata Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, usai menghadiri acara 'Diseminasi: Securing Hasil Tindakan Pidana Lintas Batas Negara' di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023.

Menurut Ivan, PPATK menemukan bahwa beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). "Artinya ada ketidaksesuaian. Pembiayaan kampanye dan segala macam itu dari mana kalau RKDK tidak bergerak? Kami melihat ada potensi

seseorang mendapatkan sumber ilegal untuk membantu kampanye," kata Ivan.

Ivan tidak menyebut nama calon legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye, tapi PPATK sudah melaporkan dugaan ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Sudah kami sampaikan beberapa transaksi terkait dengan angka-angka yang jumlahnya luar biasa. Saat ini kami masih menunggu respons dari Bawaslu dan KPU," sambung Ivan.

Tindak pidana yang hasilnya diduga digunakan untuk mendanai pemilu terdiri dari berbagai tindak pidana, salah satunya pertambangan ilegal, den-

gan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah. Ivan mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan pemilu.

"Pada prinsipnya kami ingin kontes-tasi dilakukan melalui adu visi misi, bukan kekuatan ilegal, apalagi yang bersumber dari sumber ilegal," kata Ivan.

Adapun berdasarkan data 2022, sepanjang periode 2016-2021 PPATK telah membuat 297 hasil analisis yang melibatkan 1.315 entitas yang diduga melakukan tindak pidana dengan nilai mencapai Rp38 triliun. PPATK juga membuat 11 hasil pemeriksaan yang melibatkan 24 entitas dengan nilai potensi transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana mencapai Rp221 triliun.

Beberapa waktu lalu, PPATK memang menjanjikan akan terus mengawasi kemungkinan adanya aliran dana haram selama Pemilu 2024. PPATK siap untuk menelisik dana kampanye peserta Pemilu 2024 guna mendeteksi aliran dana hasil kejahatan.

"PPATK ingin pemilu ke depan, ketika memilih kepemimpinan dengan adu gagasan, visi, dan misi. Bukan adu suap menyuap, apalagi (dana kampanye) berasal dari sumber-sumber ilegal," kata Ivan.

Ivan mengatakan, PPATK akan bertukar informasi dengan KPU terkait dana kampanye caleg yang dikelola partai politik dan pasangan capres-cawapres. Pihaknya juga akan melakukan sosialisasi untuk mewujudkan pemilu bersih.

Ivan menambahkan, PPATK juga telah menyampaikan laporan kepada penyidik soal dugaan dana hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp1 triliun mengalir ke partai politik untuk kepentingan kemenangan Pemilu 2024.

"Ya (laporan sudah disampaikan ke penyidik). Kami terus proses. Itu (analisis dana kejahatan lingkungan mengalir ke parpol) sudah selesai dari kami," kata Ivan.

PPATK mengungkap temuan aliran dana ilegal itu pertama kali pada 19 Januari 2023. PPATK menyebut, uang hasil kejahatan lingkungan atau green financial crime (GFC) mengalir ke anggota partai politik untuk membiayai kegiatan kemenangan Pemilu 2024. Jumlah uang hasil kejahatan itu mencapai Rp1 triliun.

PPATK menyebut, uang haram tersebut berasal dari kejahatan pembalakan liar atau illegal logging. Uang tersebut mengalir ke anggota parpol sejak tiga tahun lalu. Pada pertengahan Agustus 2023, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rasio Ridho Sani, menyebut pihaknya tak berwenang menyidik al-

Ivan menambahkan, pihaknya juga telah menghentikan transaksi pada 1.914 rekening keuangan yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan terorisme sepanjang Januari-Oktober 2023. Penghentian transaksi itu diperlukan untuk mengamankan hasil tindak pidana pencucian uang agar tidak disalahgunakan.

"Maka kemudian ada penghentian



iran dana hasil kejahatan lingkungan.

KLHK hanya berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang terkait kejahatan lingkungan. Kendati begitu, Rasio memastikan bakal memeriksa laporan PPATK ihwal uang hasil kejahatan lingkungan mengalir ke parpol. "Kami belum lihat nanti akan kami cek," ujarnya.

transaksi mulai saat teman-teman aparat Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme menganalisis kejahatan pencucian uang, untuk kemudian dianalisis," kata Ivan.

Adapun nilai rekening yang transaksinya dihentikan sepanjang Januari-Oktober 2023 itu mencapai Rp530,23

miliar.

PPATK mengatakan pengamanan dan penyelamatan aset hasil tindak pidana menunjukkan proses yang transparan dan akuntabel dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Tindakan administratif ini dilakukan terhadap transaksi atau rekening yang berdasarkan analisis dan pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK terindikasi dengan aktivitas kejahatan atau pelanggaran," kata Ivan.

PPATK akan melanjutkan penghentian sementara transaksi atau aktivitas rekening yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, narkoba, kejahatan lingkungan, dan investasi lingkungan.

"Optimalisasi kewenangan PPATK ini tidak terbatas pada kejahatan-kejahatan konvensional, tetapi termasuk juga kejahatan yang memanfaatkan IT sebagai enabler termasuk pencegahan money politic yang berpotensi terjadi pada pesta demokrasi tahun 2024 yang saat ini tengah berlangsung," kata Ivan.

Hasil tindak pidana yang ditempatkan atau dipindahkan melalui sektor jasa keuangan terus meningkat.

Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, mengatakan, semua peserta pemilu wajib melaporkan dana kampanye. Selain itu, semua transaksi terkait dana kampanye harus dilakukan lewat RKDK. Karena semua transaksi melalui perbankan, tentu PPATK bisa melakukan analisis.

"PPATK akan mempunyai kontribusi dalam hal pelaporan-pelaporan dana kampanye," kata Hasyim.

KPU mewajibkan para peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Dalam hal ini, KPU merasa perlu bekerja sama dengan PPATK untuk menangani transaksi keuangan dan pelaporan dana kampanye.

"Ada kewajiban bagi para peserta pemilu untuk melaporkan dana kampanye. Untuk itu disiapkan ada rekening khusus dana kampanye. Pasti modelnya bank-able atau transfer-able melalui bank dan ada lembaga yang khusus menangani transaksi keuangan, yaitu PPATK," jelasnya.

Capres nomor urut 03, Ganjar Pranowo, menilai transaksi dalam kampanye Pemilu 2024 harus transparan dan akuntabel. "Semuanya harus transparan, harus legal, akuntabel," kata Ganjar usai melakukan diskusi dengan generasi millennial dan generasi Z di Bekasi,

Jumat, 15 Desember 2023.

Menurutnya, temuan PPATK itu menjadi peringatan semua pihak bahwa setiap

transaksi yang tidak legal akan membahayakan bagi pihak-pihak yang dimaksud.

"Saya kira apa yang disampaikan PPATK memberikan warning kepada semuanya," ucapnya.

Ganjar berharap peserta pemilu 2024 untuk melakukan evaluasi internal serta menindaklanjuti temuan PPATK. "Mudah-mudahan semuanya bisa membenahi kalau ada yang tidak beres," ucapnya.

Kapten Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Muhammad Syaugi, juga meminta agar PPATK segera memproses secara hukum terkait temuannya mengenai dugaan tindak pencucian uang.

"Tentang temuan PPATK Pak Anies dan Pak Muhaimin sangat mendorong urusan hukum agar diselesaikan," kata Syaugi di Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023.

Syaugi mengatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sangat mendukung terkait penegakan hukum, sehingga apa yang ditemukan PPATK harus segera diselesaikan.

Menurut dia, ketika temuan PPATK itu telah memiliki bukti serta fakta hukum, maka harus segera diproses, supaya tidak menjadi bola panas di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

Syaugi memastikan paslon AMIN tidak mempunyai masalah, sehingga sangat mendukung upaya PPATK dalam menegakkan hukum. "Jadi kalau selama itu ada bukti dan faktanya silakan diproses secara hukum tidak ada masalah buat kami," katanya.

Bawaslu menyatakan sudah menerima informasi terkait temuan PPATK tentang transaksi mencurigakan dalam jumlah besar, yang diduga digunakan untuk keperluan kampanye pada Pemilu 2024.

"Betul, Ketua (Bawaslu) sudah menginformasikan hal terk-



sud, masih kami dalam,” kata Anggota Bawaslu, Lolly Suhenti, Kamis, 14 Desember 2023.

Lolly mengatakan, mereka masih menelaah temuan PPATK terkait dugaan transaksi mencurigakan yang mengalir buat kegiatan kampanye Pemilu 2024.

Ketua Divisi Teknis KPU, Idham Holik, mengaku telah menerima laporan dari PPATK terkait temuan transaksi janggal dalam masa kampanye Pemilu 2024. Surat itu telah diterima KPU pada 12 Desember 2023 dalam bentuk hardcopy. Surat itu dikirim oleh Kepala PPATK tentang Kesiapan dalam Menjaga Pemilihan Umum/ Pemilihan Kepala Daerah yang Mendukung Integrasi Bangsa, tertanggal 8 Desember 2023.

“Dalam surat PPATK ke KPU tersebut, PPTAK menjelaskan ada rekening bendahara parpol pada periode April-Oktober 2023 terjadi transaksi uang, baik masuk ataupun keluar, dalam jumlah ratusan miliar rupiah. Transaksi keuangan tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara yang akan merusak demokrasi Indonesia,” kata Idham, Sabtu, 16 Desember 2023.

Namun, Idham menuturkan PPATK tidak merinci sumber dan penerima transaksi keuangan itu. Dia menuturkan data yang diberikan hanya dalam bentuk data global. Oleh sebab itu, Idham menuturkan KPU tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut.

Namun, dalam rapat dengan peserta Pemilu, pihaknya akan mengingatkan kembali tentang batasan dana kampanye.

“KPU akan mengingatkan kembali tentang batasan maksimal sumbangan dana kampanye dan pelanggaran menerima sumbangan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena jika hal tersebut dilanggar oleh peserta pemilu, sudah pasti akan terkena sanksi pidana Pemilu,” jelasnya.



Selain itu, Idham mengatakan PPATK juga melakukan pemantauan atas ratusan SDB (Safe Deposit Box) periode Januari 2022 hingga 30 September 2023 di Bank Swasta maupun BUMN. Sebab, PPATK khawatir adanya penggunaan dana dari SDB untuk dana kampanye yang tidak sesuai aturan.

“Penggunaan uang tunai yang diambil dari SDB tentunya akan menjadi sumber dana kampanye yang tidak sesuai ketentuan apabila KPU tidak melakukan pelarangan,” paparnya.

Terkait data SDB itu, kata Idham, PPATK juga tidak memerinci data-



nya. Namun, dia menyebut KPU akan menggencarkan sosialisasi terkait aturan penggunaan dana kampanye.

“Tentunya KPU ke depan akan mengintensifkan sosialisasi regulasi kampanye dan dana kampanye.

Pelanggaran aturan kampanye dan dana kampanye akan terkena sanksi pidana pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perlu-dem), Khoirunnisa Nur Agustyati, meminta Bawaslu proaktif dalam menindaklanjuti temuan PPATK terkait peningkatan transaksi mencurigakan selama masa kampanye Pemilu 2024.

“Bawaslu sudah diberikan kewen-

gan yang cukup besar,” kata Khoirunnisa.

Menurut dia, salah satu tugas dan fungsi Bawaslu adalah untuk mengawasi dan mencegah terjadinya politik uang. “Bawaslu punya instrumen untuk melakukan pencegahan dan pengawasan pemilu, seharusnya bisa dimaksimalkan,” ujar Ninis.

Dia mengingatkan, penyelenggara pemilu dalam bekerja juga harus tetap independen, tidak berpihak, dan profesional guna mencegah terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2024. Selain itu, peserta pemilu pun diharapkan un-

tuk mematuhi peraturan yang berlaku selama masa kampanye.

“Peserta pemilu dalam berkampanye perlu taat pada regulasi yang berlaku,” ujar Ninis.

Peneliti kepemiluan Titi Anggraini menambahkan, Bawaslu perlu responsif melakukan verifikasi dan validasi sebagai pemeriksaan lebih lanjut atas temuan PPATK tersebut.

“Terkait dengan temuan PPATK, yang dibutuhkan adalah tindak lanjut responsif, terukur, dan akuntabel dari Bawaslu dan aparat penegak hukum,” kata Titi.

Dia menjelaskan, ketentuan pendanaan atas pelaporan dana kampanye yang tidak benar telah diatur dalam Pasal 496 dan Pasal 497 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Undang-Undang Pemilu sudah mengatur jika terbukti tidak dilakukan pelaporan sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, maka hal itu merupakan tindak pidana pemilu,” ujar Titi. •

BANSOS JOKOWI UNTUNGKAN PRABOWO-GIBRAN

Presiden Joko Widodo tengah gencar-gencarnya membagikan bantuan sosial bahan pangan kepada masyarakat saat tahun politik jelang Pemilu 2024. Pemberian bansos itupun dikhawatirkan menjadi alat politik untuk mendukung dan memenangkan capres dan cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Presiden Jokowi sudah menyatakan akan membagikan bansos kepada warga hingga Juni 2024. Bansos itu dapat dibagikan dengan catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun depan mencukupi.

Dia mengungkapkan ini saat mengunjungi Gudang Bulog Gadang, Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 14 Desember 2024. Lawatan presiden ke Malang adalah untuk mengecek ketersediaan beras serta membagikan bansos atau bantuan pangan cadangan beras pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.

"Kita berdoa bersama moga-moga April, Mei, Juni, APBN-nya cukup, kita lanjutkan lagi," kata Jokowi dikutip dari keterangan tertulis Biro Pers dan Media Istana.

Kebijakan bansos CBP ini akan ber-

jalan sampai Maret 2024. Selain membagikan bansos pangan, pemerintah juga akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) El Nino hingga Desember.

Dalam kunjungan tersebut, presiden memastikan, bagi masyarakat yang belum menerima akan segera dikirimkan dalam waktu dekat. "Ada yang sudah ada yang belum karena memang ini masih baru minggu-minggu ini baru proses keluar, tolong dicek ada yang lewat kantor pos ada yang lewat bank," katanya.

Presiden mengungkapkan update data ini menyesuaikan kondisi terkini di lapangan, sehingga keluarga yang berhak bisa mendapatkan bantuan ini secara merata.

"Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat



daya beli masyarakat. Itu dikarenakan sejumlah harga kebutuhan naik, terutama beras yang diakibatkan oleh menyusutnya produksi beras akibat bencana El Nino yang melanda seluruh dunia,” kata Jokowi.

Dia juga menyebut, program ini terus berlanjut dan rutin dilakukan perbaikan data. “Program bantuan ini akan dilanjutkan tahun depan dengan terus dilakukan update data penerima dan untuk tahun depan ada penambahan sekitar 8 persen dari penerima sekarang agar yang terdampak semuanya tidak terlalu dibebani oleh kenaikan harga yang ada,” jelasnya.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menambahkan, untuk penerima bantuan pangan mulai Januari 2024 nanti bertambah menjadi 22 juta keluarga penerima. Sebelumnya jumlah penerima adalah 21,3 juta keluarga penerima.

“Data keluarga penerima bantuan ini kami terima dari Kemenko PMK yang jumlahnya mengalami update data karena menyesuaikan dengan kondisi riil di lapangan,” kata Arief.

Sementara itu, Direktur Human Capi-

tal Perum Bulog, Purnomo Sinar Hadi, menjelaskan, Bulog selaku operator mendukung penuh program pemerintah, seperti bantuan pangan ini, yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dan menyiapkan stok beras yang dibutuhkan sebaik mungkin.

“Kami akan menyesuaikan dengan data penerima yang baru untuk tahun depan sesuai dengan update terbaru dari Kemenko PMK melalui Badan Pangan Nasional. Selanjutnya, juga kami pastikan stok beras yang tersedia di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia dalam jumlah yang sangat aman,” ujar Purnomo.

Adapun stok cadangan beras pemerintah yang dimiliki Bulog saat ini ada sebanyak 1,4 juta ton. Di samping itu, masih ada tambahan stok impor beras sesuai penugasan yang diberikan kepada Bulog guna menambah kekuatan cadangan beras pemerintah.

Untungkan Prabowo-Gibran

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan, bansos yang dibagikan oleh Presiden Jokowi memberikan efek

pada elektabilitas pasangan calon presiden dan wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebab, menurutnya publik sudah tahu Jokowi mendukung Prabowo-Gibran.

Dalam berbagai kesempatan kunjungan kerja ke daerah, Jokowi kerap membagikan bansos atau apa yang disebut pemerintah sebagai bantuan pangan ke keluarga penerima manfaat. Bantuan sejak April 2023 itu akan terus disalurkan kepada keluarga penerima manfaat hingga Maret 2024.

Ujang mengatakan bansos itu penting bagi politikus dan partai politik untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dalam kasus Jokowi, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu mengatakan bansos dipakai untuk meningkatkan kepuasan publik terhadap presiden.

“Publik tahu Jokowi dukung Prabowo-Gibran. Maka bagusya Jokowi, bagusya Prabowo-Gibran. Kan itu pasti akan paralel,” kata Ujang, Selasa, 12 Desember 2023.

Peneliti Senior BRIN, Prof Lili Romli, menyebut bansos pemerintah di tengah



pemilu dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan elektoral. Ketum PAN Zulkifli Hasan, berkampanye dengan narasi agar rakyat memilih Prabowo-Gibran agar Bansos dan BLT dilanjutkan.

Padahal, kampanye seperti bernada ancaman bansos seperti itu tidaklah etis. Alih-alih bagaimana agar rakyat makmur dan sejahtera seharusnya

harusnya berfokus pada upaya mensejahterakan rakyat dengan seperti penciptaan lapangan usaha bagi rakyat, lapangan pekerjaan, peningkatan pendidikan sehingga rakyat bisa keluar dari jerat kemiskinan. "Bukan terus menerus melestarikan bansos," ujarnya.

Menurutnya, kini, program bansos pun melenceng dari tujuan awal. "Seka-



tidak mengandalkan Bansos, kampanye model ini justru ingin melestarikan kemiskinan.

"Ini bisa dikatakan mereka ingin agar rakyat tetap miskin sehingga agar tergantung terus pada bansos. Ini bentuk politik populis yang salah kaprah," tegas Lili, Kamis, 14 Desember 2023.

Menurutnya, kampanye politik se-

rang bansos sudah bersifat politis, sudah ditunggangi politik," tambahnya.

Bansos menjadi instrumen klientelisme untuk meraih suara, kemenangan pemilu dan pilpres. Padahal pendanaan bansos bersumber dari uang rakyat.

"Anggaran negara yang berasal dari pajak, bahkan dapat dari utang luar

negeri, disalahgunakan, dimanipulasi dan dimanfaatkan untuk kemenangan pemilu. Ini sangat disayangkan," ujar Lili.

Lili menekankan pentingnya kesadaran publik untuk melihat bansos secara jernih di tengah masa pemilu. Bansos bukan berasal sosok atau sosok, melainkan negara.

"Semoga rakyat sadar dan mengetahui bahwa bansos bukan kemurahan-tian penguasa, karena yang digunakan bukan uang pribadi tapi uang negara, yang hakekatnya adalah uang rakyat," katanya.

Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadi-ansyah, mengatakan, bansos dipakai



Ini sifatnya memang masih desas-desus bukan hoaks, karena ini baru perkiraan saja. Kenapa demikian? Karena ada perhitungan-perhitungan politik.

untuk meraih kepercayaan publik sejak lama. "Bansos tinggi untuk meraih kepercayaan publik," kata Trubus.

Lebih dari sekadar untuk melanggengkan kekuasaan, bansos harus memberi harapan kepada masyarakat miskin jika disalurkan dengan tepat. "Bahwa bansos juga membawa harapan kepada masyarakat miskin untuk bertahan dalam mengarungi hidupnya," jelas Trubus.

Tapi, jika bansos ini digaungkan terus oleh paslon 02, tidak bisa dipungkiri karena ada anak Presiden Jokowi di situ yang terus mengatakan bahwa dia akan melanjutkan kerja-kerja bapaknya. Kelekatannya antara Jokowi dan Bansos sudah begitu mengakar.

"Jujur saja masyarakat bawah bingung kalau Pak Jokowi tak lagi Presiden, bansos masih mengalir atau tidak?" ungkap Trubus.

Apalagi bagi masyarakat yang tergolong miskin ekstrim, sehingga harapannya bagaimana orang miskin ekstrim mendapatkan dua kali lebih banyak.

Menurut Trubus, capres dan cawapres yang berani menjanjikan bansos diminta untuk mencari dulu akar masalahnya agar tidak menjadi ketergantungan. "Persoalannya apakah bansos itu lama? Kan tidak mendidik kalau terus menerus dipelihara," tegas Trubus.

Founder lembaga survei KedaiKopi, Hendri Satrio, menyebut metode politik sebagian para pelaku politik saat ini terpusat pada pembagian sembako yang dijadikan sebagai alat politik.

"Bahkan saya dengar gelontoran sembako yang sudah disiapkan nanti Januari hingga Juni (2024), itu tidak akan didistribusikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), tapi akan didistribusikan oleh badan pangan," terang Hensat secara virtual dalam diskusi bertajuk 'Evaluasi Akhir Tahun: Bidang Ekonomi, Politik, dan Hukum' yang diadakan Universitas Paramadina, Kamis, 14 Desember 2023.

"Ini sifatnya memang masih desas-desus bukan hoaks, karena ini baru perkiraan saja. Kenapa demikian? Karena ada perhitungan-perhitungan politik," sambungnya.

Perhitungan politik yang dia maksud yaitu adanya ketakutan jika pendistribusian sembako melalui Kemensos, maka akan menentukan paslon Ganjar-Mahfud. Oleh karena itu, badan pangan dipilih sebagai media pembagian sembako yang dianggap penguasa saat ini lebih mewakili.

"Bayangkan distribusi sembako

yang harusnya demi kesejahteraan rakyat, ini dipertimbangkan sebagai alat



politik," ucap dia.

"Kemudian sembako juga jadi menu utama kampanye. Orang-orang yang tidak punya sembako, ini otomatis ingin mundur lebih dahulu sebelum kompetisi dimulai. Dan secara kasat mata sembako ini secara bangga dibagikan," jelas Hensat.

Koordinator Forum Alumni Presiden Mahasiswa Indonesia, Sunandiantoro, menilai cawe-cawe tidak hanya pada urusan hukum semata, namun juga dilakukan oleh Presiden Jokowi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) maupun dalam bentuk sembako di beberapa daerah yang sebelumnya menjadi tempat kampanye dari paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Seperti yang sedang ramai di berbagai media yang mengungkapkan adan-

ya kampanye Ganjar Pranowo yang dibuntuti oleh kunjungan kerja Presiden Jokowi. Jika satu kali mungkin itu kebetulan, tapi jika terjadi beberapa kali tentu bukan hal yang wajar. Sebagaimana kita tahu, politik itu adalah sesuatu yang direncanakan," kata Sunandiantoro.

Seperti saat Ganjar Pranowo melaksanakan kampanye di Papua, beberapa hari setelahnya, pada 22 November 2023, Presiden Jokowi juga datang di Papua dengan dalih meresmikan kampung nelayan serta membagikan bantuan pangan cadangan beras.

Kemudian, ketika Ganjar Pranowo datang ke NTT, beberapa hari setelahnya, Presiden Jokowi juga hadir di NTT dengan dalih yang sama yaitu memberikan bantuan pangan.

"Presiden Jokowi memang sedang gencar-gencarnya keliling ke daerah-daerah dalam rangka membagikan bantuan pemerintah kepada masyarakat. Entah dengan dalih apapun tentu kita harus melihatnya sebagai perbuatan politik Jokowi selaku orang tua dari Gibran Rakabuming Raka yang merupakan calon wakil presiden," kata Sunandiantoro.

"Melihat tingkah Presiden Jokowi yang secara terstruktur, sistematis dan massif tersebut, tentu patut kita menyatakan demokrasi di Indonesia sedang mengalami kemunduran," sambungnya. ●



TIMBAL BALIK JOKOWI-ZULHAS

Kampanye politik memang kompleks. Yang positif dan negatif dapat muncul silih berganti, bahkan bersamaan. Begitulah pengalaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan hubungannya dengan Presiden Joko Widodo.

Politisi berpengalaman biasa menghadapi situasi tumpang-tindih itu. Tak terkecuali pengalaman kampanye Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang juga masih menduduki jabatan Menteri Perdagangan.

Lebih dari sekadar blusukan, ia juga menebar pernyataan-pernyataan politik yang menggugah awareness (kesadaran) politik. Tentu dalam ranah dan konteks partai.

Juga sulit menyangkal pernyataan-pernyataan politik itu sebagai upaya meningkatkan elektabilitas partai politik yang dipimpinnya agar meraih kursi legislatif seoptimal mungkin di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten maupun kota.

Nah, saat berkunjung ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Zulhas (nama ringkas Zulkifli Hasan), juga berkampanye sebagai Ketua Umum PAN. Berbicara di depan ribuan kader PAN di wilayah itu, ia mengklaim bahwa Presiden Jokowi telah bergabung dengan PAN, tidak lagi menjadi anggota partai sebelumnya.

"Sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN. Udah nggak (partai) yang lama, ribut terus," kata Zulhas di acara yang berlangsung pada Sabtu, 9 Desember 2023 itu.

Zulhas menyebut PAN merupakan partai yang selalu membawa aura gembira. "PAN itu nggak ada marah-marah, nggak ada. Yang ada itu gembira. Ada juga partai yang suka marah-marah,



kita nggak. Gembira, hangat, menyapa, mencintai satu dengan yang lain dan membantu yang lain,” katanya.

Pada kesempatan itu Zulhas memuji Jokowi yang berhasil menghadirkan kemajuan yang luar biasa di Labuan Bajo. Jokowi, menurut Zulhas, berhasil mengubah wajah Labuan Bajo dari daerah kumuh menjadi tempat pariwisata yang nyaman dikunjungi. Dia mengungkapkan pesatnya pembangunan di Labuan Bajo mengalahkan daerah lain di Indonesia.

“Dulu saat saya jadi Menteri Kehutanan (2009-2014), Labuan Bajo ini belum banyak orang datang, hotel melati cuma ada satu atau dua. Itu yang di bawah di pasar itu kotor. Kalau Labuan Bajo sekarang maju, siapa kira-kira yang bikin maju, yang membangun siapa? Pak Jokowi. Kalau mau dilanjutkan pembangunannya ya pemerintahnya harus yang lanjutkan (program Jokowi),” ungkapnya.

Saat berbicara di hadapan kader PAN, Zulkifli juga meminta kader partainya untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Dia mengatakan paslon nomor

urut 2 itu akan melanjutkan program Presiden Joko Widodo. Antara lain, bantuan sosial (bansos), bantuan langsung tunai (BLT), dan program pembangunan lainnya.

Selain itu, sambungnya, Prabowo-Gi-



Sekarang Pak Jokowi itu partainya PAN. Udah nggak (partai) yang lama, ribut terus

bran menambahkan program pemberian susu dan makan siang gratis setiap hari kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia. “Anak-anak sekolah nanti kita kasih makan siang gratis. Dikasih minum susu agar gizinya hebat. Jadi BLT lanjut, bansos lanjut, pembangunan lanjut, ditambah makan siang dan minum susu untuk anak-anak kita yang sekolah,” urai Zulhas.

Menanggapi pernyataan Zulhas, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berko-mentar meminta Kartu Anggota Resmi Jokowi jika benar bergabung dengan PAN. “Ya nanti Pak Zul akan menunjukkan KTA-nya,” kata Hasto usai safari politik dengan kader PDIP Kabupaten Serang, Banten, Minggu, 10 Desember 2023.

Sedangkan Presiden Jokowi mengemukakan bahwa PAN merupakan bagian dari Kabinet Indonesia Maju, sehingga PAN sudah dianggap seperti layaknya keluarga. “PAN ini kan masuk koalisi pemerintah jadi PAN itu masuk ke keluarga kita,” kata Jokowi sambil tersenyum di Kali Sentiong, Jakarta Utara, Senin, 10 Desember 2023.

Jokowi memang tidak menjawab gamblang soal apakah dirinya kini atau di masa yang datang akan bergabung dengan PAN. Namun, Jokowi sekali lagi menegaskan bahwa PAN dan pemerintah merupakan satu keluarga. “Kalau kita jadi keluarga PAN ya sama saja kan, PAN masuk keluarga kita, kita masuk keluarga PAN,” ujarnya.

Sepekan kemudian, Zulhas tampak

• INFO NASIONAL

blusukan ke Padang, Sumatera Barat. Ia meresmikan Masjid Al Khair dengan menandatangani prasasti masjid bersama H Muhammad Asli Chaidir selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren dan Masjid Tahfiz Alquran Al Khair.

Sebelum itu da'i kondang Ustadz Abdul Somad (UAS) yang diundang hadir memberikan tausiah juga ikut membubuhkan tanda tangan di prasasti Masjid Al Khair bersama Hj Erliwatty A selaku Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren dan Masjid Tahfiz Alquran Al Khair.

Peresmian didahului dengan salat

membangun pondok pesantren dan tahfiz Alquran di area sekitar Masjid Al Khair.

"Jadi semakin lengkap di sini, masjid ada, pondok pesantren dan tahfiz Alquran juga ada. Sehingga para generasi muda khususnya yang ada di Kota Padang bisa menempuh pendidikan keagamaan di sini. Saya rasa sangat beruntung warga Kota Padang punya wakil rakyat seperti Bapak H. Muhammad Asli Chaidir," imbuhnya.

Pada kesempatan itu Anggota Komisi VIII DPR RI H. Muhammad Asli Chaidir mengatakan pembangunan Masjid Al Khair berlangsung lebih dari tiga tahun

pesaingnya. Namun, yang negatif pun tak terelakkan karena amenyebut partai lain gaduh.

Nah, bahwa Zulhas mengemukakan Presiden Jokowi berada di PAN, mudah dimengerti karena berbagai survei terbaru menjelang masa kampanye Pemilu 2024 menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Jokowi umumnya konsisten tinggi.

Survei Indikator Politik Indonesia



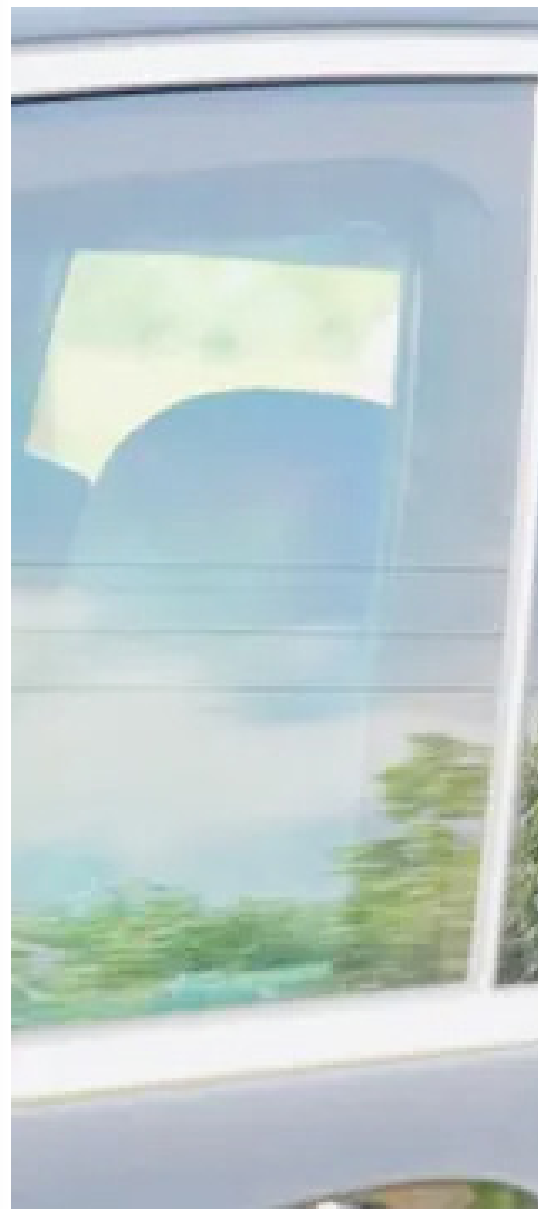
subuh berjamaah yang diimami Wali Kota Padang Hendri Septa. Setelah itu barulah hadirin/jamaah mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh UAS dan juga Ustadz Jel Fathullah.

Mendag RI Zulkifli Hasan menyampaikan selamat dan apresiasi atas diresmikannya Masjid Al Khair. "Masjid Al Khair ini adalah suatu sedekah jariyah bagi bapak H. Muhammad Asli Chaidir bersama keluarga. Karena memberikan manfaat bagi banyak orang, pahalanya tidak akan terputus meski orang yang bersedekah telah meninggal dunia," ungkapnya.

Tak hanya itu, Zulhas juga memuji Anggota DPR RI Fraksi PAN dapil Sumbar I itu karena tak hanya membangun masjid, karena nantinya juga akan

pengerjaan. "Pembangunan masjid ini adalah impian saya untuk mencari amal pahala di tanah kelahiran saya. Semoga warga Kota Padang khususnya yang berada di Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX bisa melaksanakan salat lima waktu di masjid ini. Begitu pula untuk kegiatan keagamaan lainnya. Alhamdulillah kita juga akan membangun pondok pesantren dan tahfiz Alquran nantinya di sini," ungkapnya.

Nah, kampanye Zulhas di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dan Padang, Sumatera Barat itu teridentifikasi jelas sebagai kampanye positif. Positif dalam arti mempengaruhi para pemilih untuk mendukung dan menjatuhkan pilihannya kepada partai atau figur dengan menonjolkan kelebihan dibandingkan dengan partai atau figur



yang berlangsung 23 November–1 Desember, 2023 misalnya, mengungkapkan 76,2 persen responden dalam surveinya mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Penyebab utamanya adalah program bantuan.

Survei nasional ini mencakup 1.200

responden dengan menggunakan metode multistage random sampling. Tingkat toleransi kesalahan atau margin of error-nya plus minus 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Mayoritas warga menjawab cukup atau sangat puas atas kinerja Joko Widodo sebagai presiden. Sangat puas 12,9 persen dan cukup puas 63,3 persen. Kalau kita jumlahkan maka angkanya di 76,2 persen yang cend-

adanya pemberian bantuan kepada rakyat kecil (33,6 persen). "Lalu, alasan membangun infrastruktur jalan, jembatan, bendungan 25,1 persen. Ada lagi alasan lain adalah orangnya merakyat 8,9 persen, kinerjanya sudah bagus tetapi lebih sedikit lagi 8,8 persen, dan alasan-alasan lainnya," katanya.

Saat ini, salah satu program bantuan Pemerintah langsung kepada masyarakat adalah Bantuan Langsung

Rizka melanjutkan 21,9 persen responden survei mengaku tidak puas dengan kinerja Jokowi. Alasan terbanyak responden yang mengaku tidak puas adalah akibat meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok. "Kebutuhan harga pokok meningkat 23,8 persen di antara yang tidak puas menjawab ini. Kemudian, bantuan tidak merata 18,9 persen yang tidak puas menjawab ini. Kemudian kemiskinan



erung puas dengan kinerja Presiden Jokowi," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia Rizka Halida, Sabtu, 9 Desember 2023.

Ia menjelaskan alasan terbanyak responden survei mengaku puas terhadap kinerja Jokowi dikarenakan

Tunai (El Nino) yang dikaitkan dengan kekeringan dan cuaca ekstrem. BLT yang ditargetkan untuk 18,8 juta warga yang termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ini bernilai Rp200 ribu per bulan dirapel dua bulan, yakni November dan Desember.

tidak berkurang 9,5 persen, dan lapangan kerja atau pengangguran 9 persen," ujarnya.

Sedangkan survei Litbang Kompas periode 29 November-4 Desember 2023 menunjukkan 73,5 persen responden menyatakan puas terhadap

kinerja Jokowi. Sebanyak 1.364 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi. Metode penelitian pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian +/- 2,65 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Berdasarkan survei Litbang Kompas pada Desember 2023, sebanyak 73,5 persen responden mengaku puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Sedangkan 26,5 persen responden mengaku tidak puas terhadap

Zulhas pun mengalaminya. Saluran yang dipilih untuk berkampanye negatif terhadap Zulhas adalah media sosial dengan menampilkan rekaman video saat membuka acara Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) di Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa, 19 Desember 2023.

Dalam potongan video itu Zulhas berkelakar terkait bacaan surat Al-Fatihah dibacakan saat salat Magrib dan tahiyat akhir saat membuka acara APPSI. Di hadapan ratusan peserta, Zulhas berkelakar kini ada masyarakat yang

Prabowo Subianto. Lazimnya, jamaah salat magrib akan menyerukan Aamiin setelah bacaan itu. Namun, sisi politiknya, Amin adalah singkatan Anies Baswedan - Abdul Muhaimin Iskandar, pasangan Capres-Cawapres pesaing Prabowo-Gibran.

Tak hanya itu, Zulhas juga mencontohkan kini banyak orang yang ketika gerakan tahiyatul akhir dalam salat menunjukkan dua jari.

"Itu kalau tahiyatul akhir awalnya gini (menunjuk satu jari) sekarang jadi gini (nunjuk dua jari)," kata Zulhas disam-



kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

"73,5 persen responden menyatakan puas dan 26,5 persen responden menyatakan tidak puas," ungkap laporan survei Litbang Kompas, Rabu, 13 Desember 2023.

Nah, sebagai tanggapan dari pesaing, kampanye positif biasanya menghadapi upaya mengurangi sisi positif dengan memunculkan sisi yang dianggap negatif. Karena itulah upaya mengurangi sisi positif untuk mempengaruhi pemilih disebut pula sebagai kampanye negatif.

diam setelah surat Al-Fatihah dibacakan saat salat Magrib — seharusnya langsung membaca Aamiin.

"Saya keliling daerah, Pak Kiai, sini aman, Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada lho yang berubah. Jadi kalau salat magrib baca wa ladh-dhalliin, baca Al-Fatihah, wa ladh-dhalliin, ada yang diem sekarang, Pak. Ada yang diem, loh kok lain?" ujar Zulhas disambut tawa hadirin.

Menurut dia, orang-orang yang terdiam usai bacaan wa ladh-dhalliin itu karena mereka cinta pada capres

but tawa peserta rakernas.

Amin dan salam satu jari (jari telunjuk mengacung) merupakan kekhasan dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, pesaing Prabowo-Gibran yang juga diusung PAN. Sedangkan Prabowo-Gibran terkenal dengan salam dua jari (jari telunjuk dan jari tengah).

Nah, kampanye negatif menggunakan unggahan rekaman video Zulhas di acara APPSI itu melalui saluran media sosial dapat sewaktu-waktu muncul. Bukan hanya terhadap Zulhas, melainkan politisi atau kandidat dalam

pemilihan demokratis di mana-mana.

Secara teoritis, kampanye negatif harus ditanggapi segera, kurang dari 24 jam untuk menjernihkan suasana, klarifikasi. Sekaligus juga untuk meredam dampak buruk kampanye negatif itu sendiri. PAN juga melakukannya melalui Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno.

Menurut Eddy yang disampaikan Zulhas adalah cerita tentang kondisi di masyarakat yang faktual. Salah satu contohnya adalah ketika bacaan sholat diasosiasikan pada pasangan tert-

Cianjur Selatan, Rabu, 20 Desember 2023.

Eddy menegaskan pula bahwa tidak ada niat dari Zulhas untuk menyampaikan humor yang dibuat-buat, apalagi melecehkan agama Islam. "Pak Zulhas hanya menyampaikan cerita yang ia dengar dan temukan di masyarakat. Jadi bukan sesuatu yang mengada-ada apalagi melecehkan. Sama sekali tidak dan karenanya harus diluruskan, karena kami menduga telah dikemas dan diviralkan secara negatif oleh oknum-oknum tertentu" sambungr-

ganggu pesta demokrasi kita," tutup Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini.

Nah, hikmah kampanye positif Zulhas antara lain adalah ketokohan Presiden Jokowi masih memiliki daya pikat dalam menggalang dukungan suara pemilih pada Pemilu 2024. Kemudian, daya pikat itu menjadi pilihan partai-partai politik untuk berkampanye meraih dukungan suara untuk pemilihan legislatif di samping Pilpres. Namun, lazimnya kampanye positif, akan muncul counter atau tanggapan negatif yang



entu.

Hal serupa, kata Eddy, juga pernah disampaikan dalam sebuah video oleh ulama seperti Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad. "Misalnya ketika ada yang melafadzkan Aamiin nanti justru dirujuk atau diasosiasikan dengan salah satu capres. Karena itu akhirnya memilih untuk melafadzkan Aamiin dalam hati. Rupanya gejala unik ini juga disampaikan oleh dua ulama kondang seperti Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Abdul Somad sebelumnya," kata Eddy di sela-sela agenda menyapa warga di

yanya.

Pimpinan Komisi VII DPR ini menyampaikan, pernyataan Zulhas tersebut harus dilihat secara berimbang dan objektif. Terlebih, kata Eddy, sebelumnya dua ulama besar di Indonesia juga menceritakan fenomena yang sama ke publik.

"Tidak tepat kalau pernyataan Pak Zul itu ditarik dalam konteks sebuah penistaan. Mari kita jaga agar suhu politik yang semakin dinamis saat ini tidak diinjeksi oleh hasutan dan hoax dari fihak-fihak yang bermaksud meng-

perlu segera ditanggapi.

Selanjutnya semua pihak yang terlibat kampanye hendaknya menghindari kampanye hitam, upaya mempengaruhi pemilih dengan melibatkan hoaks dan dusta. Yang ini perlu tindakan hukum seadil-adilnya untuk menghindari dampak buruk yang lebih luas seperti konflik horisontal yang bertentangan dengan salah satu tujuan penting Pemilu demokratis untuk mengelola konflik secara beradab dan menghindari kekerasan fisik maupun verbal. ●



PEMERINTAH MAKIN UGAL-UGALAN

Utang Bertambah Rp600 Triliun Tahun Depan

Pemerintah bakal menambah utang sebanyak Rp600 triliun pada 2024. Penambahakan utang dilakukan mengingat target defisit tahun depan di Indonesia meningkat sebesar 2,29 persen dibandingkan dengan target defisit 2023 sebesar 2,27 persen.

Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, menuturkan, pemerintah akan menambah utang baru sebesar Rp 600 triliun pada tahun depan sejalan dengan kenaikan target defisit di level 2,29 persen pada 2024.

"Secara nominal utang kita akan bertambah sekitar Rp600 triliun di tahun depan," kata Deni dalam peluncuran Electronic Indonesia Bond Market Directory di Main Hall BEI, Senin, 18 Desember 2023.

Menurut Deni, dengan adanya peningkatan penarikan utang Indonesia pada 2024, akan berpotensi menam-

bah pembiayaan utang pokok serta bunga yang bakal dialokasikan. Meski begitu, ia menjelaskan, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) dinilai cukup solid.

"Kalau dibandingkan dengan negara peer kita dengan debt to GDP semakin kecil sekarang sekitar 37 persen, kalau awal pandemi 40 persen, ini relatif masih rendah, let's say asean country Malaysia, Filipina, Thailand mencapai 70 persen yang rendah di bawah kita hanya Brunei dan Vietnam," kata dia.

Dia bilang, anggaran kebutuhan pembiayaan utang pada tahun depan menjadi Rp598,2 triliun. Adapun jumlah defisit APBN sekitar 2,29 persen



atau sekitar Rp522 triliun. Angka itu relatif hampir sama dengan tahun ini.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan utang, DJPPR melakukan pembiayaan investasi, pemberian pinjaman, kewajiban pinjaman, pembiayaan lainnya, dan utang jatuh tempo.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang hingga 12 Desember 2023 mencapai Rp345 triliun. Adapun utang Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp298,6 triliun dan pembiayaan pinjaman luar negeri Rp46,6 triliun.

"Pembiayaan sampai dengan 12 Desember 2023 mencapai Rp345 triliun di mana penerbitan surat berharga negara secara neto mencapai Rp298,6 triliun dan pinjaman neto Rp46,4 triliun dibandingkan tahun lalu ini," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Desember, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023.

Sri Mulyani menjelaskan, jika dibandingkan dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (UU APBN) awal pada SBN ditargetkan

sebesar Rp696,3 triliun, yang terealisasi hanya 49,6 persen.

Namun, jika dibandingkan dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, yang merupakan perubahan UU APBN di pertengahan tahun, sehingga target dari Perpres sebesar Rp421,2 triliun, artinya baru 81,9 persen pembi-



Ini sangat penting karena 2023 dengan inflasi tinggi, suku bunga naik setara dengan drastic, kita bisa mengerem pinjaman dan penerbitan surat berharga, makanya tadi yield kita masih cukup baik

ayaan utang yang terealisasi.

"Dibandingkan tahun lalu ini penurunan sangat tajam," terangnya.

Sementara untuk pinjaman utang luar negeri jika dibandingkan dengan UU APBN awal yang ditargetkan Rp16,6 triliun terealisasi sebesar Rp279,2 persen. "Jadi ada kenaikan dari sisi pinjaman, namun dari SBM turun sangat drastis," imbuhnya.

Ia menuturkan pengelolaan pembiayaan yang menurun artinya APBN makin sehat karena defisitnya jauh lebih rendah dibandingkan rancangan awal.

"Dibandingkan dengan tahun lalu, tren dari defisit yang menurun konsolidasi fiskal itu tetap terjaga kredible dan kuat ini karena penerimaan negara kuat belanjanya tetap terjaga dengan baik," jelas dia.

Kemudian pengelolaan pembiayaan mampu menggunakan berbagai sisa anggaran lebih (SAL) besar tahun sebelumnya, sehingga bisa menurunkan pembiayaan melalui surat utang negara.

"Ini sangat penting karena 2023 den-

gan inflasi tinggi, suku bunga naik setara dengan drastis, kita bisa mengerem pinjaman dan penerbitan surat berharga, makanya tadi yield kita masih cukup baik,” papar dia.

Menurut Bendahara Negara itu, hal ini adalah strategi yang sangat tepat dan ampuh dalam menghadapi situasi dunia, di mana suku bunga mengalami kenaikan drastis ekstrem, pemerintah bisa melindungi APBN dan melindungi keseluruhan postur.

Kementerian Keuangan juga mencatat, sampai akhir November 2023, total jumlah utang pemerintah mencapai sebesar Rp8.041,01 triliun, dan menjadi rekor tertinggi dari utang-utang yang ada sebelumnya.

Sebelumnya utang pemerintah juga tercatat mencapai rekor tertinggi setelah tembus Rp 7.950,52 triliun per akhir Oktober 2023. Dikutip dari buku APBN KiTa edisi Desember-

ber 2023, rasio utang tercatat 38,11 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara cermat dan terukur lewat komposisi mata uang, suku bunga, serta jatuh tempo yang optimal,” sebagaimana dikutip dari buku APBN KiTa, Selasa, 19 Desember 2023.

Apabila dilihat dari porsinya, sebesar 88,61 persen atau Rp7.124,98 triliun utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN). Sementara sebesar

11,39 persen atau Rp916,03 triliun berasal dari pinjaman.

Rinciannya, utang SBN terdiri dari SBN domestik sebesar

Rp5.752,25 triliun. Jumlah itu terbagi atas Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.677,88 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp1.074,37 triliun.

Kemudian, ada pula utang dari SBN Valas atau mata uang asing sebesar Rp 1.372,73 triliun. Hal itu terbagi atas SUN sebesar Rp1.033,24 triliun, dan SBN Syariah sebesar Rp339,49 triliun.

Utang dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp29,97 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp886,07 triliun.



Utang digunakan untuk menutup defisit atau menambah anggaran yang dinamakan politik ekspansif dalam ekonomi. Tetapi di Indonesia menjadi politik korupsi karena digunakan secara ugal-ugalan dan dipakai bermacam-macam yang tidak jelas dampaknya pada pertumbuhan ekonomi

Kurang Transparan

Di sisi lain, sejumlah pakar ekonomi menuding bahwa pengelolaan utang negara dalam dasawarsa terakhir dilakukan secara ugal-ugalan. Belum lagi, bagaimana mengenai sistem pelaporan utang tersebut yang kurang transparan kepada rakyat. Celakanya, akibat kebijakan segelintir pejabat, mengakibatkan seluruh rakyat di Indonesia harus menanggung renteng

**Direktur Eksekutif Departemen
Komunikasi Bank Indonesia,
Erwin Haryono**

utang ribuan triliun.

Ekonom sekaligus salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, mengatakan, anggaran APBN dewasa ini telah dikelola secara ugal-ugalan. Padahal, anggaran adalah sesuatu hal yang amat penting dalam mengukur perekonomian nasional, dan cermin dari birokrasi dan politik nasional.

"APBN adalah gambaran dari ekonomi nasional yang sehat atau tidak. Sebagai rencana keuangan, kesehatan APBN juga akan menentukan kesehatan dari ekonomi. Aspek yang rapuh dari APBN salah satunya adalah utang yang menggunung dan terus diwariskan oleh pemerintahan sekarang," ungkap Didik saat diskusi bertajuk Evaluasi Akhir Tahun Bidang Ekonomi, Politik dan Hukum di Jakarta, Kamis, 14 Desember 2023.

Didik mengatakan, dalam evaluasi ekonomi politik APBN menjadi fokus, karena merupakan cermin kebijakan, perilaku politik dan bandit-banditnya. APBN bisa dipakai secara legal tetapi curang untuk alat politik, baik Pilpres, Pileg dan lainnya.

Menurut Didik, Presiden ke depan hendaknya jangan meniru pengelolaan anggaran seperti sekarang. Sejak 2019 utang baru sudah mencapai Rp492,55 triliun melalui penarikan utang dengan pengeluaran obligasi setiap tahun. Beda dengan zaman Presiden SBY di mana penarikan utang/obligasi hanya Rp50 triliun tiap tahun.

"Utang digunakan untuk menutup defisit atau menambah anggaran yang dinamakan politik ekspansif dalam ekonomi. Tetapi di Indonesia menjadi politik korupsi karena digunakan secara ugal-ugalan dan dipakai macam-macam yang tidak jelas dampaknya pada pertumbuhan ekonomi," terangnya.

Didik mencontohkan, saat 2020 di masa Covid-19, dalam satu tahun APBN membuat utang atau menerbitkan obligasi sebesar Rp1.686,22 triliun. Celakanya, justru pada saat Covid-19 tersebutlah politik bandit berjalan. Ternyata tidak semua dana tersebut digunakan untuk anggaran, sebagian digunakan untuk membayai pokok utang.

"Sehingga, sampai kiamat Indonesia akan selalu mengambil utang di atas Rp1.000 triliun setiap tahun, atau bahkan lebih, jika tidak ada perubahan radikal," tegasnya.

Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menyebut, utang pemerintah pada era Presiden Joko Widodo berpotensi meningkat menjadi Rp6.291 triliun pada 2024 atau mencapai 38,98 persen terhadap produk domestik bruto

(PDB). Nilai ini meningkat pesat dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono menjabat pada periode 2004-2014.

Rizky memaparkan dalam akun media sosial X nya, posisi utang pemerintah pada 2014 lalu sebesar Rp2.609 triliun atau sekitar 24,68 persen terhadap rasio PDB.

Sementara pada era Jokowi, posisi utang diperkirakan akan melonjak mencapai Rp8.900 triliun atau bertambah Rp6.291 triliun dan rasio utang bertambah mejadi 14,30 persen pada 2024.

"Diperkirakan, rasio posisi utang pemerintah atas PDB pada 2023 adalah sebesar 310,93 persen dan 2024 sebesar 314,03 persen. Rasionya meningkat 145,76 persen pada era Jokowi. Era sebelumnya menurun," ujar Awalil dikutip, Senin, 11 Desember 2023.

Dengan begitu, Awalil memperkirakan pembayaran pokok utang pemerintah akan mencapai Rp625 triliun dan bunga Rp497 triliun. Jadi, total utang yang harus dibayarkan pemerintah senilai Rp1.122 triliun p a d a



Direktur Surat Utang Negara
DJPPR Kementerian Keuangan,
Deni Ridwan



Ekonom INDEF, Didik J Rachbini

2024.

"Target pendapatan APBN 2024 sebesar Rp2.802 triliun. Rasionya 40 persen. Rasio beban utang atas pendapatan menurun pada era SBY, namun meningkat pesat pada era Jokowi," kata Awalil.

Cadangan Devisa

Bank Indonesia (BI) mencatatkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir November 2023 sebesar USD138,1 miliar. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Oktober 2023 sebesar USD133,1 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono, mengatakan, kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerbitan global bond pemerintah dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.



Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky

"Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,3 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor," ujar Erwin dalam keterangan resminya, Kamis, 7 Desember 2023.

Dengan pembayaran utang tersebut, Bank Indonesia menilai cadangan devisa Indonesia mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan cadangan devisa akan tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga.

"Seiring dengan respons bauran kebijakan yang ditempuh Bank Indonesia

dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Erwin.

Sebagai informasi, cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2023 tercatat USD133,1 miliar, atau menurun USD1,8 miliar dibanding posisi pada akhir September 2023 yang sebesar USD134,9 miliar.

Sementara itu, Direktur Departemen Komunikasi BI, Nita A Muelgini, menjelaskan, penurunan posisi cadangan devisa tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Selain itu, kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkahantisipasi dampak rambatan sehubungan dengan semakin meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global," ujarnya.

Adapun posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor, dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. ●



INVESTOR LOKAL SERBU PROYEK IKN

Presiden Joko Widodo mengaku senang karena investor lokal berbondong-bondong berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Siang hari ini saya sangat senang karena ada investor dari Kalimantan Timur, investor dari Balikpapan, yang ikut berperan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya di acara peletakan batu pertama Nusantara Superblock di IKN, Penajam Paser Utara, Rabu, 20 Desember 2023.

Presiden mengatakan investasi yang diberikan investor lokal itu sangat besar yakni Rp3 triliun dan untuk pembangunan besar.

"Investasinya gede Rp3 triliun. Yang akan dibangun juga bukan barang yang kecil. Lahannya 7,5 hektare, kemudian pusat perbelanjaan 40.000

meter persegi, hotel bintang limanya 215 kamar, hotel bintang empatnya 200 kamar, kemudian masih ditambah apartemen delapan tower, kemudian office building dua tower, dan juga sekolah internasional dan tempat hiburan," papar Jokowi.

Kepala Negara menyatakan sangat mengapresiasi investasi tersebut. Dia berharap dari sisi desain tidak kalah dengan investor-investor yang berasal dari Jakarta. Dia berpesan agar desain pembangunan dari investor lokal dikonsultasikan kepada Kepala Otorita IKN.

"Saya titip saja satu untuk desain, green building. Karena yang ingin kita bangun kawasan di seluruh IKN ini



kawasan hijau, lingkungan hijau, jadi konsepnya berbeda dengan kota-kota yang ada di seluruh dunia. Tapi nanti bisa disampaikan ke Pak (Kepala) Otorita desainnya, biar nanti dibimbing, dikurasi oleh Pak Ridwan Kamil," ujarnya.

Presiden berharap dengan adanya konsultasi itu, nantinya konsep seluruh

peletakan batu pertama, groundbreaking Nusantara Superblock secara resmi saya nyatakan dimulai, terima kasih," kata Presiden.

Nusantara Superblock berlokasi di Kawasan Inti Pusat Pemerintah 1A. Luas area 7,2 hektare di depan tugu Tik Nal, kawasan sumbu kebangsaan. Nilai proyek Nusantara Superblock itu

ing, sebetulnya juga sama saja," kata Jokowi.

Jokowi merasa senang dengan perkembangan pembangunan IKN saat ini. Menurut dia, pembangunan di IKN memang harus dipantau dan diperiksa setiap bulan.

"Ini yang saya bilang, setelah (investor) yang satu masuk, yang lain pasti



pembangunan di IKN akan sama, yakni mengacu kepada kawasan dan bangunan hijau.

"Dan ini kita harapkan nanti dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, khususnya di Balikpapan dan bisa membuka kesempatan kerja, lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat kita," jelasnya.

Dia mengatakan Nusantara Superblock betul-betul akan menjadi sebuah daya tarik dan menjadikan IKN ibu kota negara berkelas dunia yang berbeda dengan ibu kota di negara-negara lain.

"Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirohmanirrahim pada siang hari ini

mencapai Rp5 triliun.

Nusantara Superblock yang merupakan konsorsium itu terdiri dari pusat perbelanjaan, apartemen, dan tiga hotel berbintang. Pusat perbelanjaan di Nusantara Superblock itu mencakup luas 55.733 meter persegi.

Presiden juga mengatakan investor dalam negeri sudah banyak berinvestasi dalam pembangunan IKN, di mana beberapa di antaranya sudah bermitra dengan pemodal asing.

"Selama yang di domestik masih berbondong-bondong, saya kira, tapi juga sebetulnya yang investor dalam negeri pun sebetulnya itu pun sudah partner-an sama yang asing. Satu, dua, saya tahu sudah partner-an dengan as-

berbondong-bondong, yang di belakang akan berbondong-bondong lagi, dengan ini (sektor) yang berbeda-beda, ada hotel, ada mal, ada sport center, ada rumah sakit, tetapi memang progres setiap bulan harus dicek, dilihat," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengapresiasi adanya investor lokal dari Kalimantan Timur yang berinvestasi di IKN. Dengan demikian, investor dalam negeri di IKN tidak hanya berasal dari Jakarta atau Pulau Jawa.

Dalam kesempatan itu, Jokowi turut memberikan apresiasi kepada investor asal Kalimantan Timur, PT Wulandari Bangun Laksana, yang berpartisipasi dalam pembangunan IKN. PT Wu-

landari Bangun Laksana menjadi perusahaan daerah pertama yang menanamkan modal di IKN.

"Kami bangga sebagai investor lokal bisa berpartisipasi dalam pembangunan IKN," kata Direktur Operasional PT Wualndari Bangun Laksana, Tjia Daniel Wirawan.

Daniel mengaku tidak pernah men-

dung apartemen, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan pusat hiburan.

Di IKN, perusahaan itu membangun kompleks serupa sebagaimana Balikpapan Superblock, yakni pusat perbelanjaan hingga hunian seperti hotel hingga apartemen di lahan seluas 7,5 hektare dengan nama Nusantara Superblock.

jaan," katanya.

Kemudian, pembangunan tahap kedua dengan luas 3,7 hektare akan dibangun enam menara apartment dan dua menara perkantoran.

Sebagai perusahaan lokal Kaltim, Wulandari Bangun Laksana juga mempekerjakan tenaga kerja lokal dengan perkiraan hingga ribuan tenaga kerja.



yangka IKN pindah di Penajam Paser Utara masih berdekatan dengan Kota Balikpapan. "Saat tahu IKN ada di Kaltim, kami berkomitmen tidak hanya menjadi penonton, tapi juga harus turut berkontribusi," katanya.

Perusahaan yang berbasis di Kota Balikpapan itu semula adalah pengembang properti yang didirikan di Jakarta pada 1994 dengan nama Dwipagriya Lestari. Perusahaan itu berganti nama pada 2002 dan mulai beroperasi secara komersil pada 2005 dengan berbasis di Kota Balikpapan.

Wulandari Bangun Laksana memiliki Balikpapan Superblock sebagai kawasan terpadu di Balikpapan. Kawasan itu terdiri dari kondominium, ge-

"Untuk konsepnya berbeda (dengan Balikpapan Superblock). Meskipun tidak seluas di Balikpapan, tapi memiliki konsep yang berkesinambungan dengan menerapkan 'green building' sesuai konsep pembangunan IKN yang ramah lingkungan," ujarnya.

Pembangunan Nusantara Superblock ditargetkan rampung pada 2025. Ada dua tahapan pembangunan yaitu lahan seluas 3,8 hektare yang terdiri dari pusat perbelanjaan Pentacity, serta satu hotel bintang lima Grand Jatra Hotel Nusantara dan satu hotel bintang empat Pentacity Hotel Nusantara untuk tahap pertama.

"Target selesai pembangunan pada 2024, khusus untuk pusat perbelan-

"Kami memperkirakan penyerapan hingga 2.500 tenaga kerja baru. Karena kami investor lokal, penyerapan tenaga kerja lokal lebih kami maksimalkan," kata Daniel.

Infrastruktur Lain

Selain Nusantara Superblock, Presiden Jokowi juga melakukan peletakan batu pertama sejumlah proyek infrastruktur dan meninjau perkembangan pembangunan di IKN. Setibanya di IKN, Presiden melaksanakan groundbreaking Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ibu Kota Nusantara.

Kunjungan kerja Presiden Jokowi kali ini akan menjadi gelombang keem-

pat groundbreaking sejumlah proyek infrastruktur di IKN. Presiden Jokowi antara lain sudah meninjau dan meresmikan pembangunan Istana Presiden dan Wakil Presiden, rumah tapak menteri, hunian aparatur sipil negara (ASN) dan TNI/Polri, kompleks perkantoran Bank Indonesia (BI), persemadian Mentawir, pembangunan Kantor BPJS Ketenagakerjaan, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), serta pembangunan Sumbu Kebangsaan tahap I yang akan menjadi ruang terbuka di KIPP IKN.

Selain itu, juga pembangunan pusat latihan PSSI yang didukung FIFA, serta infrastruktur pendukung seperti pembangunan jalan tol penghubung Balikpapan ke IKN, pembangunan bandar udara IKN, pembangunan RS Hermina Mayapada Hospital Nusantara, pembangunan RS Hermina Nusantara, pembangunan sekolah bertaraf internasional JIS, revitalisasi SD Negeri 020 Sepaku, hingga pembangunan hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan.

Pemerintah memperkirakan pembangunan infrastruktur di IKN memerlukan anggaran sebesar Rp466 triliun. Menurut Presiden, anggaran itu sekitar 20 persen dibiayai oleh APBN, sedan-

gkan 80 persen lainnya diberikan kepada dunia usaha atau swasta melalui skema public private partnership (PPP) atau kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Pemerintah Indonesia juga membuka pintu bagi investor asing yang ingin berinvestasi di IKN.

Setelah RSUP tersebut, Jokowi mengatakan ada tiga rumah sakit swasta lain yang mengantre untuk diresmikan pembangunannya. "Saya nggak tahu di Ibu Kota Nusantara ini kok berbondong-bondong orang mendirikan rumah sakit," kata Jokowi.

Namun demikian, dengan banyaknya rumah sakit di IKN, Jokowi berharap tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat karena bisa dilakukan di dalam negeri, termasuk di IKN.

"Ini nanti mestinya, kalau sudah jadi semuanya, tidak ada lagi masyarakat kita yang pergi ke Malaysia, Singapura, Jepang, ke Amerika untuk kesehatannya. Kami harapkan semuanya nanti bisa dilakukan di Indonesia, di Ibu Kota Nusantara khususnya," harapnya.

RSUP di IKN akan berkonsentrasi untuk penyakit jantung dan stroke. Sebelum HUT ke-79 RI, pada 17 Agustus 2024, ditargetkan empat rumah sakit di

IKN selesai dibangun, yaitu sebuah rumah sakit vertikal dan tiga rumah sakit swasta. Pemerintah, melalui Kementerian Kesehatan, akan memenuhi tenaga-tenaga kesehatan untuk rumah-rumah sakit di IKN tersebut.

Presiden Jokowi juga meninjau proyek pembangunan Hotel Nusantara di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Hotel yang dibangun oleh PT Agung Sedayu Group itu mencatat progres pengerjaan 34,50 persen hingga saat ini.

Hotel Nusantara itu mencakup luas 20.164 meter persegi dengan tinggi bangunan mencapai 43,10 meter. Bangunan yang terdiri dari sembilan lantai itu memiliki jumlah kamar 191 unit yang terbagi enam tipe kamar.

Masing-masing tipe kamar adalah Premier Twin 61 unit, Premier King 102 unit, Junior Suite 14 unit, Executive Suite 12 unit, Disable Room 1 unit, dan President Suite 1 unit. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah melakukan peletakan batu pertama proyek Hotel Nusantara pada 21 September 2023.

Pemasangan atap bangunan (topping off) hotel bintang lima itu ditarget-



kan selesai pada kuartal pertama 2024 dengan target penyelesaian seluruh bangunan sebelum Agustus 2024.

Hotel itu merupakan hasil investasi konsorsium yang terdiri dari sembilan perusahaan swasta dalam negeri senilai Rp20 triliun. Hotel Nusantara berlokasi di kawasan area khusus pengembangan bisnis dan jasa (mixed-use) di sekitar Titik Nol IKN.

Kepala Negara mengatakan investor lokal di IKN menjadi lokomotif investasi besar, termasuk untuk pembangunan Hotel Nusantara.

Ramah Lingkungan

Presiden Jokowi menegaskan semua bangunan yang akan dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) harus merupakan green building guna mendukung prinsip infrastruktur hijau yang ramah lingkungan dalam pengembangan ibu kota baru Indonesia tersebut.

"Ke depannya memang selalu saya tekankan kepada siapa pun yang membangun di Ibu Kota Nusantara (agar) gedungnya harus gedung hijau, kemudian lingkungannya harus hijau, kawasannya pun harus menjadi kawasan hijau," kata Jokowi.

Guna mendukung proses penghijauan di IKN, Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya kali ini juga diagenda untuk melaksanakan penanaman pohon di sejumlah lokasi, antara lain di area Sumbu Kebangsaan hingga lokasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Hari ini kita akan lakukan penghutanan kembali (reforestasi), melakukan penanaman pohon-pohon endemik agar IKN ini menjadi kawasan yang sangat hijau, yang di negara mana pun tidak dijumpai ibu kota yang se hijau Nusantara ini," tutur dia.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengungkapkan prinsip bangunan gedung hijau (BGH) dan bangunan gedung cerdas (BGC) diterapkan pada proyek pembangunan gedung-gedung pemerintahan di IKN.

Kementerian PUPR terus meningkatkan penerapan infrastruktur hijau di Indonesia, yang berperan penting un-

tuk memastikan pembangunan yang dilakukan tetap dapat menjaga aspek fisik lingkungan dan biocapacity.

Dengan demikian mampu melestarikan natural system dengan tetap memperhatikan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang pada muaranya menaikkan kualitas hidup masyarakat.

sana semestinya jauh dari penyakit stroke maupun jantung.

"Kalau kita melihat kehijauan di sini oksigennya banyak, mestinya pikirannya senang, (sakit) strokenya menjauh, menurut saya (sakit) jantungnya juga menjauh," kata Jokowi.

RSUP di IKN, kata Jokowi, akan



Dibangun secara bertahap hingga 2045 dengan mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia, IKN Nusantara akan menunjukkan keunggulan bangsa Indonesia untuk mewujudkan kota pintar yang modern dan berkelanjutan, serta berstandar internasional.

Presiden juga mengatakan IKN akan menjadi kota hijau dengan kaya oksigen, sehingga orang yang tinggal di

berkonsentrasi pada pelayanan untuk pasien penderita stroke dan sakit jantung. Sejak awal, lanjut Jokowi, pembangunan IKN dirancang sebagai kota hijau dengan gedung-gedung yang selaras lingkungan. Pemerintah juga akan melakukan penghutanan kembali di IKN. Selain itu, Pemerintah bakal membuat aturan bahwa hanya kendaraan listrik yang boleh beroperasi di IKN. ●



Garin Yudha Primaditya

BERANI MENANTANG DIRI SENDIRI

Garin Yudha Primaditya, seorang pemilik warung sederhana dengan nama Warung Mbok Mar, memutuskan untuk mencoba peruntungannya di dunia politik sebagai calon anggota legislatif DPRD Samarinda melalui Partai Gerindra.

Dengan usia 27 tahun, Garin memiliki UMKM yang cukup sukses di Jalan KH Agus Salim, Samarinda, yang dikenal dengan berbagai menu lezat seperti ayam kremes, ayam goreng, bebek kremes, nila goreng, dan iga bakar.

Garin, yang berani menantang dirinya sendiri, memilih untuk mengembangkan karir bisnisnya dengan aspirasi politiknya. Melalui Partai Gerindra, ia berharap dapat mengimplementasikan ide-ide segar untuk perubahan di Kota Samarinda.

Tidak hanya sukses dalam dunia bisnis, pada tahun 2021, Garin terpilih sebagai pemimpin baru organisasi kepemudaan Partai Gerindra, Tunas

Indonesia Raya (Tidar) Samarinda. Melalui kepemimpinan di Tidar, ia secara konsisten membangun potensi anak muda dalam berwirausaha.

Garin optimis menyoroti potensi kreatif generasi muda Samarinda, khususnya di pasar kreatif, dia percaya bahwa pemuda setempat, berbeda dengan pemuda di organisasi formal, memiliki potensi yang belum tergali di industri kreatif, khususnya di bidang musik.

"Sedangkan anak-anak disini memang beda, jadi industri kreatifnya yang harus dimajukan," ujar Garin.

Garin menyampaikan keyakinan-

nya bahwa ciri khas pemuda Samarinda perlu dikembangkannya industri kreatif mereka. Ia mencontohkan Tito Sumarley, seniman gravitasi yang karya-karyanya menopang keuangannya.

Garin menyarankan agar pimpinan Samarinda Muda aktif mendukung kreator dan seniman lokal guna menumbuhkan potensi kreatif tersebut.

Saat ditanya mengenai pilihan industri kreatif, Garin menjelaskan bahwa industri kreatif merupakan pintu gerbang yang paling tepat untuk mengeksplorasi seluruh aspek komunitas anak muda.

"Industri kreatif merupakan pintu gerbang yang paling tepat untuk mengeksplorasi seluruh aspek komunitas anak muda," sambungnya.

Garin menegaskan kembali bahwa Samarinda Muda bukan miliknya atau milik orang tertentu itu adalah komunitas untuk semua pemuda di Samarinda. Ia berharap masyarakat bisa bertahan dalam jangka panjang, tidak hanya satu atau dua tahun saja.

Garin berbagi pengalaman di mana ia memiliki kesempatan bersentuhan langsung dengan pemimpin partai dan politisi, yang semakin memperluas pandangannya terhadap politik.

Pengaruh politikus Gerindra, seperti Fuad Fakhruddin, yang menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, sangat membimbing dan menginspirasi Garin dalam perjalanan politiknya.

"Sosok politikus Gerindra, Fuad Fakhruddin sangat membimbing dan menginspirasi saya dalam perjalanan politik saya," ungkapnya.

Dalam perjalanannya menuju pencalonan legislatif, Garin tidak hanya mempertaruhkan karir bisnisnya tetapi juga mendukung pendidikan anak muda tentang dunia politik. Baginya, politik bukanlah sesuatu yang menakutkan dan kotor seperti yang mungkin dipikirkan oleh banyak orang.



Garin mengajak masyarakat untuk melihat politik sebagai alat untuk membawa perubahan positif.

"Politik adalah seni meyakinkan dan seni beretika, saya berharap dapat memberikan kontribusi dalam membentuk jiwa wirausaha di kalangan masyarakat, terutama anak muda Samarinda," jelasnya.

Meskipun dihadapkan pada tantangan besar, terutama dalam hal finansial, Garin tetap gigih dan bersemangat untuk memperjuangkan impian dan tujuannya. Baginya, tantangan finansial tidak membuatnya menyerah, dan manajemen yang baik menjadi kunci kesuksesan.

Garin juga menciptakan representasi kesederhanaan melalui aksinya saat mendaftar sebagai calon legislatif di KPU Samarinda.

Menggunakan vespa jadul bersama simpatisan Partai Gerindra, Garin ingin menunjukkan bahwa seorang pemuda harus sederhana dan siap berjuang. Ia menekankan pentingnya memiliki mental baja, karena menurutnya, kemenangan atau kekalahan adalah bagian biasa dari perjalanan tersebut.

Dengan semangat dan tekadnya, Garin Yudha Praditya tidak hanya menjadi pengusaha sukses di dunia bisnis, tetapi juga mewakili harapan pemuda yang berani berjuang untuk perubahan melalui jalur politik.

Garin yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Samarinda Muda, mendorong generasi Z untuk menganut idealisme politik menjelang pemilu 2024.

Dalam upaya meningkatkan peran Generasi Z menjelang pemilu mendatang, Garin berupaya menyediakan wadah bagi generasi muda untuk berdiskusi dengan politisi berpengalaman.

"Menurut saya, untuk meningkatkan peran Generasi Z, kita harus menggunakan pendekatan soft-selling; pendekatan hard-selling tidak akan berhasil," kata Garin.

Dirinya juga merangkul generasi muda dalam meningkatkan partisipasinya menjelang perhelatan demokrasi. Melalui koneksi Garin dengan para politisi, ia bertujuan untuk membuka saluran pendidikan politik di kalangan pemuda Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda.

"Jangan jadi pemuda pelit, seratus ribu lima tahun kedepan," ulasnya.

Garin konsisten menekankan kepada

Ini menandai tahun pertamanya memasuki sistem untuk membawa perubahan di Samarinda.

"Kalaupun saya tidak terpilih menjadi caleg, tidak apa-apa. Yang penting pemuda di Samarinda bisa menjadi agen perubahan di masa depan," pungkas Garin.

Garin juga resmi ditunjuk sebagai nahkoda baru organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (Tidar) Samarinda.

Garin mendapat surat keputusan (SK) penunjukkan sebagai ketua Tidar Samarinda langsung dari Ketua Umum Tidar Rahayu Saraswati di Jakarta.

Rahayu Saraswati berharap usai mendapat SK Tidar Samarinda, Garin bisa menjadi ujung tombak perjuangan pemuda pemudi di Samarinda.

"Semoga Tidar Samarinda bisa menjadi teladan, jadi pemimpin di bidangnya masing-masing, juga jadi wadah perjuangan untuk pemuda-pemudi di Samarinda," katanya.

Dengan keberadaan Tidar Samarinda, Rahayu Saraswati juga berpesan kepada Garin agar bisa memperjuangkan aspirasi pemuda-pemudi di Kota Tepian melalui para senior yang telah menjadi wakil rakyat di DPRD dan DPR RI.

"Sehingga suara pemuda-pemudi didengar. Tidar Samarinda juga bisa berkontribusi nyata untuk pembangunan Samarinda," sebutnya.

Selain itu, dia juga kepengurusan Tidar Samarinda bisa menjadi contoh untuk wilayah kabupaten dan kota lain di Kaltim.

"Tidar itu harus jadi bagian dari solusi permasalahan yang dihadapi, di mana saja berada," tuturnya.

Organisasi tersebut melalui Tidar bertujuan untuk memanfaatkan potensi kewirausahaan generasi muda. Dia meyakini dengan menyalurkan upaya di bidang ekonomi, generasi muda Samarinda akan lebih terpacu untuk mengeluarkan kapasitas kreatifnya. •IRY



pemuda di Samarinda untuk menolak tawaran murahan dari politisi yang terlibat politik uang. Menurutnya, pemuda Samarinda harus menjaga idealisme politik saat memilih calon legislatif pada pemilu 2024.

"Saya selalu memberikan pemahaman kepada pemilih muda, jangan tergiur dengan uang politik. Dikasih Rp 100 ribu sehari hanya untuk memilih calon legislatif lima tahun ke depan itu terlalu murah," ujar Garin.

Garin terdaftar sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Samarinda mewakili Daerah Pemilihan Sungai Kunjang melalui Partai Gerindra.

Nur Sigit Nugroho

MUDA HARAPAN BARU JOGJA

Nur Sigit Nugroho tokoh muda pengurus Muhammadiyah di Yogyakarta, mantap mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta pada Pemilu 2024.

Nur Sigit mencalonkan diri melalui Partai Amanat Nasional (PAN) di Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Wirobrajan, Ngampilan, Gondokusuman, dan Pakualaman.

Dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Resmi yang dikeluarkan KPU Kota Yogyakarta, Sigit menempati posisi ke-5 sebagai calon PAN di Dapil 2 Kota Yogyakarta.

Sigit mengusung slogan “Muda Harapan Baru Jogja” yang mencerminkan visi dan misi yang ingin diwujudkan jika terpilih menjadi Anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 2024-2029.

Nur Sigit lahir di Yogyakarta pada 22 Maret 1985, Sigit sudah dekat dengan organisasi Muhammadiyah sejak kecil.

Ayahnya, H Sutarno adalah seorang aktivis di Muhammadiyah Wirobrajan, pelopor SD Muhammadiyah Purwodiningratan dan kemudian menjabat sebagai Kepala SD Muhammadiyah Notoprajan.

Sutarno juga aktif sebagai anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) di Wirobrajan. Sedangkan ibunya, Hj Sriyati, aktif sebagai anggota Aisyiyah di Wirobrajan.

Sigit menikah dengan Mutiara Nur Zulaikha dan dikaruniai seorang putri bernama Nur Aqila Vania Farannisa. Bersama keluarga kecilnya, Sigit tinggal di Gang Ontorejo Wirobrajan WB 2 No 126, Yogyakarta.

Kecintaan dan kesetiaan Sigit

kepada Muhammadiyah tidak hanya dibentuk oleh keluarga dan lingkungannya tetapi juga oleh perjalanan pendidikannya.

Ia bersekolah di SD Muhammadiyah Wirobrajan 3 Yogyakarta untuk sekolah dasar dan melanjutkan ke SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Setelah lulus SMP, Sigit melanjutkan pendidikan SMA di SMA Islam 1 Sleman. Selanjutnya melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Kualitas kepemimpinan Nur Sigit Nugroho muncul pada masa sekolahnya. Ia aktif terlibat dalam organisasi otonom Muhammadiyah, seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) semasa SMP.

Semasa menjadi mahasiswa, Sigit tetap aktif di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Setelah ayahnya pensiun, Sigit mengambil alih jabatan sebagai pejabat di Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) di Wirobrajan.

Sigit banyak terlibat dalam kegiatan organisasi dan politik. Beliau menjabat sebagai Staf Ahli Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Afnan Hadikusumo pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Sejak tahun 2021 beliau menjabat sebagai Staf

Ahli Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (DPR RI).

Sebagai generasi muda yang terampil untuk berkontribusi positif bagi bangsa, khususnya bagi masyarakat Kota Yogyakarta, Sigit bertekad maju sebagai Caleg DPRD untuk mewujudkan cita-cita dan harapannya.

Nur Sigit Nugroho, SE, Caleg untuk Dapil 2 Kota Yogyakarta dengan visi menjadi wakil masyarakat Kota Yogyakarta yang profesional, jujur,

amanah, dan transparan dalam menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Lalu, Sigit memiliki misi advokasi Yogyakarta sebagai kota kaya budaya dengan sumber daya manusia berkualitas, unggul di bidang pendidikan, pariwisata, dan ekonomi kre-



atif.

Mewujudkan Yogyakarta yang berdaya saing dalam bidang perekonomian, memperkuat dan memberdayakan sektor UMKM, serta mendorong penciptaan lapangan kerja yang mendukung generasi milenial.

Advokasi hak kelompok rentan untuk mendapatkan haknya di bidang hukum, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik.

Nur Sigit Nugroho menegaskan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 menjadi wadah penting bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam menentukan arah masa depan bangsa.

"Dalam pemilu 2024, baik pemilu legislatif, pemilu presiden, maupun pemilu daerah, mayoritas pemilihnya adalah generasi muda. Nah, di sinilah letak relevansi semangat Sumpah Pemuda agar generasi muda masa kini ikut serta memilih pemimpin, mengingat visi untuk maju, bangsa dan negara," katanya.

Sigit menjelaskan, generasi muda Indonesia yang visioner merupakan modal utama dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045, dimana Indonesia diproyeksikan menjadi bangsa maju.

"Pemilu 2024 dapat menjadi landasan awal penyiapan pemimpin menyambut Indonesia Emas. Di harapkan pemimpin yang muncul dari proses demokrasi ini memiliki visi ke depan, mampu menerjemahkan dan mewujudkan aspirasi generasi muda," tambahnya.

Sigit yang menduduki peringkat 5 dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yogyakarta, menegaskan, generasi muda

Yogyakarta yang dikenal sebagai Kota Pelajar sudah selayaknya menunjukkan diri sebagai pemilih cerdas

pada pemilu 2024.

Menurut Sigit, Daerah Pemilihan 2 Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Wirobrajan, Ngampilan, Gondokusuman, dan Pakualaman memiliki potensi generasi muda kreatif dan inovatif yang patut dikembangkan dan difasilitasi lebih lanjut.

"Anak-anak muda di Dapil 2 Yogyakarta banyak yang mempunyai kelebihan, namun belum terfasilitasi secara memadai. Misalnya dalam memajukan industri kreatif, startup, dan UKM. Wawasan dan ilmunya. Saya yakin pemuda visioner adalah harapan baru Jogja di masa depan," sambungnya.

Nur Sigit menegaskan komitmennya untuk mengatasi kesulitan dalam mencari pekerjaan yang dihadapi oleh generasi Milenial dan Generasi Z (Gen Z) di Kota Yogyakarta.

"Dalam berinteraksi dengan masyarakat, saya sering mendengar aspirasi dari generasi Milenial yang menyatakan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Oleh karena itu, jika terpilih, fokus utama saya akan menjadi bagaimana menciptakan lapangan kerja

bagi generasi Milenial dan Gen Z di kota Yogyakarta, melalui program inkubator usaha," ujar calon tersebut pada Kamis (14/12/2023).

Menurut Sigit, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Februari 2023 mencapai 3,58

persen. Di Kota Yogyakarta, TPT masih tinggi, yakni sekitar 7,18 persen.

Tingkat pengangguran tertinggi terjadi di kalangan lulusan universitas sebesar 4,91%, diikuti oleh lulusan SMA sebesar 4,54%, SMK sebesar 3,93%, dan lulusan Diploma I/II/III sebesar 3,04%.

"Artinya, masih banyak generasi muda yang belum mendapatkan pekerjaan. Dalam situasi ini, mencari pekerjaan tidaklah mudah. Persaingan di pasar kerja semakin ketat, sehingga dibutuhkan keahlian dan keterampilan yang memadai," ungkapnya.

Sigit berkomitmen untuk fokus pada penurunan TPT dengan menggalakkan program inkubator usaha khusus untuk generasi Milenial dan Gen Z, jika terpilih sebagai anggota DPRD Kota Yogyakarta.

"Hingga saat ini, belum terlihat peran yang signifikan dari pemerintah kota atau DPRD dalam mendukung inkubator usaha, yang bertujuan memberikan fasilitas kepada generasi muda untuk memulai dan mengembangkan bisnis. Untuk mewujudkan program ini, tentu diperlukan kebijakan anggaran, dan DPRD dapat memainkan peran penting dalam hal ini," jelasnya.

Sigit menekankan bahwa ada dua langkah yang harus diambil untuk mengatasi pengangguran di Kota Yogyakarta.

Pertama, meningkatkan kapasitas dan keterampilan pencari kerja agar siap bersaing di pasar tenaga kerja lokal maupun nasional. Langkah ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, dengan memberikan pelatihan dan dukungan fasilitas, serta memastikan hak-hak tenaga kerja terjamin.

Kedua, Sigit berencana mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pelaku usaha dengan membentuk inkubator usaha UMKM. Peningkatan akses pencari kerja terhadap kewirausahaan dan pengembangan UMKM akan menjadi fokus utama, dengan mengejar pemantapan iklim investasi dan usaha di Kota Yogyakarta.

"Diperlukan langkah konkret untuk memberikan akses pasar dan dukungan modal yang cukup kepada para wirausahawan, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan," tutupnya. • IRY



278,8

Gunawan Effendi

Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) sudah banyak mendominasi aktivitas manusia. Bahkan TIK tak terelakkan untuk menjamin ketahanan pangan dan energi.

Apa buktinya? Banyak. Salah satunya jumlah ponsel aktif di Indonesia. Survei perusahaan TIK Google, Think Tech, Rise of Foldables: The Next Big Thing in Smartphone mengungkapkan jumlah ponsel aktif di Indonesia tak kurang dari 354 juta unit. Itu data per 2022.

Nah, menjelang 2024, jumlah ponsel aktif tampaknya tetap lebih banyak dari jumlah penduduk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah penduduk Indonesia pada 2023, setidaknya sudah mencapai 278,8 juta jiwa.

Toh sebagai pengingat, betapapun TIK tak terelakkan dalam kehidupan sehari-hari pribadi kita masing-masing, tetap saja tuntutan kebutuhan dasar manusia tak berubah dari waktu ke waktu: pangan, air, dan energi.

Bahkan Elon Musk, pengusaha TIK yang memiliki perusahaan kendaraan elektrik Tesla, media sosial X (twitter), dan Space X dengan jaringan satelit Starlink, mengemukakan penggunaan minyak dan gas masih sangat diperlukan. Dua sumber energi ini masih dibutuhkan untuk pengembangan energi berkelanjutan ke depannya.

Untuk jangka panjang sekalipun, kata Elon Musk, industri memang harus mengurangi miliaran ton karbon yang diambil dari bumi dan dilepaskan ke atmosfer melalui pembakaran bahan bakar fosil.

Namun, pemanfaatan migas itu memang tak terelakkan. "Kita tidak boleh membenci penggunaan minyak dan gas," ungkap Elon Musk yang dikutip Reuters, Minggu, 17 Desember 2023.

Kekhawatiran mengenai perubahan iklim sebagaimana kampanye gerakan lingkungan, kata Musk, mungkin sudah berlebihan. Malah berpotensi menyebabkan kerugian bagi banyak orang.

Meski begitu, upaya mengurangi emisi karbon juga tetap

imperatif, menjadi kewajiban bersama umat manusia. Alhasil, upaya mengurangi pemanfaatan migas sudah sepantasnya berimbang dengan menemukan energi alternatif yang rendah emisi karbon. Itu di bidang energi.

Bagaimana dengan bidang pangan dan air? Pada dua bidang ini Indonesia sudah menjajaki kerja sama penggunaan jasa Starlink. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), misalnya, pernah menjajaki penggunaan Starlink untuk membantu kapal-kapal perikanan mengirimkan data tangkapan secara online melalui aplikasi E-PIT.

Namun, dalam perkembangannya, Sakti Wahyu Trenggono, mengungkapkan kerja sama itu masih dalam pembahasan lanjutan. Alasannya, perangkat Starlink itu terbilang mahal.



"Kita yang jelas sedang mendesain itu semua, tapi tidak ada hubungannya dengan Elon Musk. Iya kalo terjadi (Starlink) sekarang kan masih mahal device nya," kata Sakti Wahyu Trenggono saat ditemui usai hadir Pertemuan Nasional Pembangunan Perikanan Budidaya Berbasis Ekonomi Biru, di Jakarta, Senin, 18 Desember 2023.

Salah satunya, kata Pak Menteri, Indonesia akan meluncurkan satelit nano yang bisa terkoneksi dengan seluruh kapal-kapal pengusaha atau penangkap. Nantinya, KKP akan mewajibkan semua pengusaha di sektor perikanan memasang device agar tersambung dengan 20 nano satelit tersebut. Tujuannya, untuk memonitor seluruh kapal yang beroperasi di laut Indonesia.

"Mereka kita wajibkan pasang device, tapi kalau kapal nelayan lokal yang kecil Pemerintah yang menyediakan. Tujuannya supaya seluruh kapal yang beroperasi bisa termonitor," ungkap Trenggono.

Tak perlu disebutkan bahwa semua itu terkait dengan ketahanan pangan dan energi Indonesia sebagai negara maritim. Menjamin ketersediaan pangan untuk penduduk yang berjumlah hampir 280 juta jiwa bukanlah persoalan mudah. Salah-salah, bangsa kita dapat terpecah belah. ●



HAJATAN POLITIK JANGAN GANGGU PEMBANGUNAN

Hajatan politik terkait Pemilu 2024 tidak boleh mengganggu agenda pembangunan Indonesia.



// itu adalah siklus demokrasi yang normal yang memang sudah diatur oleh undang-undang, dan Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti mekanisme pemilihan umum memang sudah ditetapkan. Itu tidak boleh mengganggu juga berbagai agenda-agenda pembangunan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Kamis, 23 November 2023.

Dalam acara Hajatan Politik Dan Arah

Anggaran tersebut diberikan secara bertahap, yakni pada 2022 tercatat anggaran pemilu sebesar Rp3,1 triliun, pada 2023 sebesar Rp30 triliun, serta pada 2024 sebesar Rp37,4 triliun.

Alokasi tersebut digunakan antara lain untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumentasi logistik. Anggaran pemilu juga digunakan untuk pengamanan pemilu, pengawasan dana penyeleng-

dan tidak berubah hanya karena adanya faktor tahun politik,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga akan secara konsisten membangun nilai tambah dari industri serta perbaikan iklim investasi melalui regulasi, kebijakan, serta birokrasi yang lebih efektif.

“Ini adalah tema yang akan tetap berjalan karena ini adalah fondasi bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia Maju. Oleh karena itu, Kementerian



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Ekonomi Bisnis 2024, Sri Mulyani menuturkan, meskipun Indonesia menghadapi tahun politik, namun agenda pembangunan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur harus tetap diprioritaskan dan dilaksanakan demi mewujudkan ekonomi Indonesia yang maju.

Oleh karenanya, semua pihak perlu menjaga agar pemilu dapat berlangsung dengan kondusif dan agenda pembangunan Indonesia tetap berjalan dengan optimal dan mencapai target.

Total alokasi anggaran untuk pemilu dari 2022-2024 sebesar Rp70,6 triliun.

garaan pemilu, serta penanganan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, diseminasi informasi, sosialisasi dan peliputan terkait pemilu.

Sri Mulyani juga menjelaskan, APBN akan tetap menjadi instrumen yang penting dalam membangun Indonesia saat tahun politik.

“Tahun 2024 yang disebut tahun politik, kami tetap fokus untuk bisa menyelesaikan berbagai PR untuk membangun fondasi Indonesia menuju Indonesia 2045, yaitu keinginan untuk mencapai high income country. Karena masalah fundamental tidak bergerak

Keuangan akan melakukan berbagai langkah-langkah yang sifatnya jangka pendek, biasanya stabilisasi. Namun kita tidak juga menegasikan atau memberikan perhatian yang sangat tinggi untuk tetap membangun fondasi-fondasi tersebut,” ucapnya.

Sri Mulyani menyebut pada tahun-tahun ini justru sejumlah legislasi untuk mewujudkan reformasi fundamental berbagai bidang baru akan mulai berlaku.

“Jadi meskipun disebut tahun politik, kita tetap banyak pekerjaan yang sifatnya fondasi yang perlu terus

diperkuat,” ucapnya.

Pada APBN 2024, pemerintah memberikan anggaran khusus sektor kesehatan sebesar Rp186 triliun, pendidikan sebesar Rp660 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp493 triliun, ketahanan pangan sebesar Rp108 triliun, ketahanan energi sebesar Rp444 triliun, hingga infrastruktur sebesar Rp422 triliun.

Menkeu menyebutkan dalam APBN 2024 anggaran pendidikan sebesar Rp660 triliun atau sebesar 20 persen terhadap merupakan langkan pemerintah untuk melahirkan sumber daya manusia yang unggul menuju Indonesia sebagai negara maju.

“Anggaran pendidikan Rp660 triliun terus anda duduk saja seolah-olah entitlement to get something, enggak juga, karena mental entitlement merasa berhak saja, hak saya apa? Itu pasti tidak akan membuat kalian sukses dan negara Indonesia sukses. Mental entitlement adalah menganggap bahwa negara have to do something for me and i just wait, enggak juga. Tapi tetap harus memperjuangkan,” kata Sri Mulyani dalam acaea Indonesia Millennial and Gen-Z Summit, Jumat, 24 November 2023.

Untuk itu, Menkeu pun berpesan kepada generasi Z bahwa mereka memiliki kesempatan dan tantangan untuk membekali diri sendiri.

“Oleh karena itu salah satunya adalah membentuk dengan dana abadi pendidikan. Dana abadi di dalam APBN kita itu sudah mencapai Rp133 triliun, yang merupakan sebuah dana yang dipakai untuk generasi relatif muda untuk meraih mimpi-mimpinya,” ungkapnya.

Salah satunya yakni untuk membiayai LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), yang didalamnya terdapat dana abadi penelitian, dana abadi kebudayaan dan dana abadi perguruan tinggi.

“Karena kita semuanya tahu kalau Indonesia enggak akan masuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi, kalau kita tidak investasi in human capital. Kalau anggarannya ada berarti persoalannya ‘How to use it properly’. Apakah melalui berbagai macam investasi di bidang konten kurikulumnya, fasilitas pendidikan, atau dalam bentuk

scholarship, apa bentuk-bentuk yang lain semuanya legitimate,” jelasnya.

Sri Mulyani pun membeberkan, hingga saat ini dana abadi pendidikan telah mampu menyekolahkan lebih dari 42 ribu penerima beasiswa dan belum termasuk peneliti.

“Jadi anda punya impian, negara punya resources tidak berarti anda nungguin kapan negara datang untuk saya

“Ini merupakan langkah-langkah yang kita lakukan dalam konteks pelaksanaan APBN 2023 dan 2024, tujuannya agar ekonomi terus terjaga stabilitasnya dan momentum tidak mengalami pelemahan,” ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual, mengatakan selama masa pemilu, perputaran uang dan belanja pemerintah



Head of Research DBS Group Research, Maynard Arif



Founder Center of Reform on Economics (Core), Hendri Saparini

you fight for that, you fight this opportunity,” tegasnya.

Dari sisi fiskal, pemerintah juga telah memberikan insentif pajak berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah pembelian rumah hingga Rp2 miliar sampai Juni 2024 dan 50 persen pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah hingga akhir 2024.

cenderung meningkat, sehingga memberikan stimulus di sektor konsumsi. Setelah pemilu, pasar modal dan pasar obligasi pun bereaksi bullish atau positif.

“Selalu indeks harga saham maupun yield obligasi kita membaik setelah pemilu. Tapi kalau untuk kurs mata uang rupiah kita kadang menguat kadang melemah setelah pemilu, ini lebih

dipengaruhi kelihatannya untuk rupiah itu faktor eksternal dibandingkan faktor pemilu,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa, menyatakan, partai politik beserta calon presiden dan wakil presiden harus memahami perencanaan pembangunan nasional sesuai amanat Visi Indonesia Emas 2045.

Perencanaan tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Pan-

Politik, di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023.

Dia menekankan parpol dan capres/cawapres harus memastikan pemilihan prioritas program selaras dengan koridor-koridor pembangunan, sehingga program bersifat konkret dan deliverable. Hal ini mengingat RPJPN berbentuk undang-undang yang mengikat seluruh anak bangsa.

Tumbuhkan Ekonomi

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Febrio Ka-

Febrio menuturkan, karena rangkaian kegiatan terkait Pemilu sudah dimulai pada akhir tahun ini, maka dampaknya akan mulai terlihat, baik tahun ini dan pada 2024.

Dia mengatakan, pemerintah menetapkan anggaran Pemilu pada 2023 sebesar Rp11,52 triliun dari belanja pemerintah, sementara untuk 2024 adalah sebesar 15,87 triliun. “Tentu ini berdampak langsung bagi belanja pemerintah dan juga aktivitas ekonomi di masyarakat, juga termasuk aktivitas dari kampanye ini, ada banyak sekali



Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual

jang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025-2029.

“Jadi nanti presiden terpilih itu akan menerbitkan Perpres (Peraturan Presiden) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk tahun 2025 ke 2029, yang didasarkan tentu dari pentahapan di RPJPN 2025-2045,” ujarnya dalam acara Sosialisasi RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 kepada Partai

caribu, menjelaskan, penyelenggaraan Pemilu 2024 diyakini akan memberikan efek dorongan bagi pertumbuhan ekonomi domestik, baik untuk tahun ini maupun tahun depan. Efek dorongan tersebut tercermin dari belanja pemerintah yang meningkat, khususnya terkait Pemilu.

“Secara tidak langsung maupun secara langsung ini juga mempengaruhi konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi di masyarakat,” katanya, Minggu, 26 November 2023.

caleg baik dari DPR pusat maupun DPRD provinsi kabupaten dan kota,” jelasnya.

Menurut perhitungannya, rangkaian persiapan Pemilu pada 2023 akan memberikan kontribusi sebesar 0,2 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada tahun depan, efek dorongan dari Pemilu ini diperkirakan lebih tinggi, yaitu sebesar 0,25 persen.

Pada kesempatan berbeda, Head of Research DBS Group Research, Maynard Arif, mengatakan, dana kampanye

dan belanja pemilu akan memberikan domino effect ke sektor konsumsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2023.

"Jadi pemilu dari sisi ekonomi ini memiliki dampak yang cukup positif ya, sektor konsumsi di kuartal IV bisa terdongkrak," katanya.

Dari sisi investasi, dia mengatakan, investor asing memang masih cenderung wait and see, tapi masih ada potensi investor asing akan masuk ke Indonesia.

Founder Center of Reform on Economics (Core), Hendri Saparini, menyebutkan, tahun politik bakal mendongkrak konsumsi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dengan target 5,2 persen pada 2024. Gelontoran dana pada putaran Pemilu 2024 ditaksir tembus ratusan triliun rupiah. Dia melihat adanya Pemilu akan memberikan tambahan belanja sekitar Rp294,5 triliun.

"Kalau menurut kami sekitar Rp294,5 triliun, yakni dari yang privat, caleg, capres itu sekitar Rp258 triliun, dan 2024 akan ada tambahan Rp36,5 triliun dari APBN," ujar Hendri dalam Core Economic Outlook 2024

di Perpus-takaan Nasional RI, Selasa, 12 Desember 2023.

Menu-rut nya, meskipun pengeluaran tersebut hanya akan memberikan sedikit pengaruh terhadap ekonomi, namun jelas tetap menggerakkan ekonomi Tanah Air.

Hendri menyampaikan, nilai pengelu-

aran tersebut setara dengan 4,2 persen dari total konsumsi rumah tangga. Sebagaimana diketahui, menurut pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, melihat memang terdapat sejumlah bisnis yang berpeluang besar mengeruk omzet semasa perhelatan politik berlangsung. Meski terdapat peluang, sektor bisnis tersebut hanya memiliki peningkatan yang kecil kepada APBN.

"Misalnya jasa konsultasi politik 1,8 persen dari APBN, atribut dan merchandise pemilu 1,1 persen, akomodasi makanan dan minuman cuma 2,5 persen, transportasi 6 persen, iklan dan lain-lain cuma 4 persen. Ini sangat kecil," jelasnya.

Shinta memaparkan, sektor-sektor tersebut terhadap pembentukan APBN tidak signifikan. Terlebih, pengeluaran aktivitas ekonomi pemilu terekam dalam konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga (LNPRT) tersebut tidak bisa menjadi tumpuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada 2024.

Karena itu, pemerintah tetap harus mengandalkan sektor utama, yakni industri pengolahan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat per kuartal III/2023, leading sektor ekonomi Indonesia, yakni industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 18,75 persen, pertanian 13,57 persen, perdagangan 12,96 persen, pertambangan 10,18 persen, dan konstruksi sebesar

9,86 persen.

"Proyeksi 2024, kami tetap tidak dapat mengandalkan pemilu. Leading sektor yang paling penting ini masih menguasai 10 persen PDB tahun depan," lanjutnya.

Sementara itu, Kementerian Keuangan menyediakan anggaran untuk Pemilu 2024 sejumlah Rp71,3 triliun yang terbagi ke dalam tiga tahun anggaran. Alokasi tersebut naik sekitar 57,3 persen dibanding anggaran Pemilu 2019 yakni senilai Rp45,3 triliun.



Selalu indeks harga saham maupun yield obligasi kita membaik setelah pemilu. Tapi kalau untuk kurs mata uang rupiah kita kadang melemah setelah pemilu, ini lebih dipengaruhi kelihatannya untuk rupiah itu faktor eksternal dibandingkan faktor pemilu.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Abdurrohman, mengungkapkan dampak langsung Pemilu terjadi melalui peningkatan belanja negara dalam APBN yang dialokasikan untuk pelaksanaan pesta demokrasi. Sementara itu, dampak tidak langsung terjadi melalui tambahan pendapatan masyarakat dan lembaga non-profit rumah tangga (LNPRT) sebagai akibat dari kegiatan kampanye dan pelaksanaan Pemilu.

"Analisis kami, berdasarkan statistik historis dan perkiraan kondisi ekonomi ke depan, pelaksanaan anggaran tersebut mampu mendorong kenaikan PDB sebesar 0,08-0,11 persen," ujarnya. •



Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Abdurrohman



Capres Nomor Urut 03, Ganjar Pranowo

CAPRES YAKINKAN DUNIA USAHA

Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo telah menyusun Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 yang diharapkan bisa jadi panduan rekomendasi kebijakan bagi calon presiden dalam kepemimpinan lima tahun ke depan.

Ketua Umum Apindo, Shinta W Kamdani, mengungkapkan, peta jalan itu disusun sebagai wujud peran organisasi tersebut dalam menjalankan advokasi atas sejumlah kebijakan strategis untuk mengawal kebijakan dan program kerja dalam kepemimpinan nasional yang baru.

"Penyusunan Roadmap Perekonomian Apindo kali ini dilakukan pada titik perubahan penting bagi Indonesia menjelang transisi kepemimpinan dengan mengidentifikasi kendala, menyampaikan rekomendasi perubahan kebijakan, kelembagaan dan tata kelola untuk lima tahun ke depan," kata Shinta dalam Dialog Apindo Capres 2024 di Jakarta, Senin, 11 Desember 2023.

Shinta mengungkapkan, Apindo telah secara konsisten menyusun Roadmap Perekonomian sejak 2004 sebagai kontribusi dunia usaha bagi

kepemimpinan nasional.

Peta jalan juga dimaksudkan untuk mengawal transformasi ekonomi yang fundamental bagi Indonesia dalam mengatasi berbagai kendala pertumbuhan ekonomi, khususnya di tengah situasi global yang menantang, dengan menitikberatkan pada investasi yang dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan diversifikasi sumber pertumbuhan.

Shinta menambahkan, Indonesia masih menghadapi tantangan ekonomi makro dan krisis multidimensi, di mana kinerja perekonomian Indonesia cukup baik, namun belum memadai untuk menunjang iklim bisnis yang inklusif serta berkelanjutan.

Hal ini menyebabkan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045 masih menghadapi sejumlah kendala untuk akselerasi pencapaian target.



Capres Nomor Urut 01, Anies Baswedan

“Karena itu, Roadmap Perekonomian Apindo juga menjadi semacam panduan bagi pemerintahan baru dalam agenda transformasi perekonomian, penciptaan sense keberlanjutan, serta reformasi struktural secara sektoral dan lintas sektoral. Sekaligus sebagai respons dunia usaha terhadap dinamika dan tren ekonomi serta bisnis global,” tambah Shinta.

Ketua Dewan Pakar Apindo, Mari Elka Pangestu, menerangkan, ada lima prioritas kebijakan dalam peta jalan tersebut. Pertama, perbaikan kepastian hukum dan kebijakan serta kelembagaan, dan koordinasi dalam implementasi kebijakan. Kedua, kebijakan terkait peran teknologi dan SDM untuk mendukung produktivitas yang diperlukan untuk transformasi ekonomi.

Ketiga, kebijakan industri, perdagangan, investasi dan persaingan yang sehat (level playing field). Keempat, adopsi konsep berkelanjutan yang mengharuskan perusahaan memenuhi standar ESG (Environment, Social and Governance) untuk mengembangkan industri hijau.

“Kelima, perbaikan infrastruktur terkait transportasi, konektivitas dan logistik; transisi sektor energi, dan prasarana digital yang efisien dan efektif,” ungkap koordinator penyusunan Roadmap Perekonomian Apindo itu.

Roadmap Perekonomian Indonesia 2024-2029 disusun berbasis masukan dunia usaha, antara lain lewat survei dunia usaha dilakukan sepanjang Juli-Agustus 2023 di seluruh Indonesia, untuk semua skala usaha, dari anggota dan non anggota Apindo, dengan melibatkan hampir 2.000 responden.

Peta jalan itu juga merangkum hasil FGD dan matriks kebijakan untuk tujuh agenda lintas sektor dan kebijakan sektor serta merangkum masukan dari Dewan Pakar Apindo, sejumlah narasumber dan mitra kerja sama, seperti Bank Dunia.

Kebijakan Capres

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, mengaku menerima masukan dari Apindo guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. “Kita tahu ini barang tidak mu-

dah, ini sesuatu yang mesti kita siapkan serius, maka tadi saya minta bantuan Apindo,” kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, masukan yang disampaikan oleh Apindo adalah membenarkan permasalahan penegakan hukum di Indonesia.

“Yang muncul dari kawan-kawan Apindo adalah tolong dong kami juga mau bekerja tetapi benarkan itu, soal penegakan hukum,” sambungnya.

Menurut Ganjar, jika penegakan hukum bisa benar-benar tegak, maka Indonesia bisa mencontoh beberapa negara yang menerapkan tata kelola pemerintahan dengan baik. Salah satunya adalah Singapura. Lalu, jika seluruh aspek good governance telah berjalan dengan baik, maka investasi semakin banyak dan pertumbuhan ekonomi semakin baik.

“Kemudian banyak orang mau berinvestasi dan sebagainya, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa cukup bagus. Ini yang menjadi masukan hari ini dari Apindo,” kata dia.

Ganjar menegaskan, target pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen ditar-

getkan oleh dirinya bersama Mahfud agar Indonesia dapat lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah atau middle-income trap.

Selain itu, Ganjar juga menyiapkan tiga strategi untuk meningkatkan investasi asing (foreign direct investment/FDI). Pertama, memberikan kepastian hukum bagi para investor agar meningkatkan aliran modal dari luar negeri ke Indonesia.

Kedua, melakukan perbaikan regulasi dari birokrasi guna menarik pemodal asing. Selain itu, regulasi juga dipastikan disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

"Ada tiga hal yang pertama adalah memastikan regulasinya benar dan itu disusun karena partisipasi. Ada rasa yang diungkapkan oleh masyarakat," kata Ganjar.

Strategi ketiga, kata Ganjar, akan memperbaiki sistem kelembagaan dengan mencari aktor yang kredibel untuk ditugaskan di bidangnya.

"Mencari aktor. Aktor ini kita seleksi dengan kepentingan apapun seringkali bisa bengkak. Maka tugas saya adalah memastikan bagaimana aktor yang bisa duduk di dalam jabatan untuk membawa amanah yang luar biasa itu kredibel. Tanpa itu tidak bisa, itu diganti," ujarnya.

Yang dimaksud aktor kredibel, menurutnya, yaitu seseorang yang memiliki integritas untuk melaksanakan tugas dengan profesional. Selain itu, kredibel diartikan sebagai seseorang yang mampu menjalankan tugasnya di birokrasi dengan tepat.

"Kredibel itu adalah ketika mengurus izin, begitu ditulis ini dua hari, selesai dua hari. Kredibel berikutnya adalah dia orang yang punya integritas. Disogok dia nolak, bukan dia justru mengkreasi sogokan. Dan yang terakhir ketika dia sudah tau semua, dia sangat profesional," jelasnya.

Ganjar juga berkomitmen untuk memperkuat aspek hukum guna memastikan ekonomi Indonesia tumbuh di atas 7 persen. Apalagi, aspek perizinan dalam birokrasi masih menjadi permasalahan di dunia usaha

Indonesia saat ini.

"High cost selalu muncul karena mulai dari awal kita sudah menghadapi kesulitan itu," ujarnya.

Menurutnya, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), pungutan liar (pungli) serta praktik mafia hukum menjadi salah satu aspek yang menghambat pertumbuhan ekonomi.

Ganjar menjelaskan industrialisasi juga menjadi kunci bagi Indonesia untuk mampu mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen. Nantinya, industrialisasi akan menarik investasi, kemudian investasi akan membuka peluang lapangan kerja di Indonesia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyampaikan akan menciptakan 17 juta lapangan kerja, mendorong buruh naik kelas, serta meningkatkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) 4 kali lipat.

"Dari investasi membuka lapangan kerja, dan tugas kami adalah mempersiapkan SDM yang unggul, termasuk di dalamnya kami mempersiapkan suatu program yang bagaimana caranya kelompok miskin bisa melompat, kelompok perempuan bisa melompat, penyandang disabilitas bisa

melompat dengan pendidikan, jadi jangan ditawarkan pendidikan ini," terangnya.

Ganjar menambahkan, dirinya telah mempunyai kandidat-kandidat yang akan mengisi kursi menteri untuk mengurus ekonomi maupun hukum jika terpilih nanti. Walaupun demikian, Ganjar mengaku belum menentukan nama-nama yang akan mengisi kursi menteri yang mengatur ekonomi maupun hukum.

Ganjar memastikan kabinet dalam pemerintahannya nanti adalah kabinet zaken atau kabinet yang diisi oleh para ahli sesuai dengan bidangnya. "Dan tentu saja zaken kabinet atau kabinet ahli itu memang penting, khususnya untuk ekonomi," sambungnya.

Ganjar juga menyatakan akan memfokuskan pada program-program pelatihan masyarakat guna meningkatkan angka produktivitas Indonesia. "Melalui pelatihan itu untuk fitting terhadap kondisi existing saat ini. Upskilling. Kita latih agar mereka bisa fit dengan kondisi hari ini," kata Ganjar.

Selain itu, Ganjar menilai hal tersebut perlu didukung penuh oleh pemerintah melalui beberapa kebijakan. Dirinya memberikan contoh Kawasan Industri Khusus (KEK) Kendal yang telah menampung banyak siswa pendidikan vokasi. Menurutnya, telah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing dan produktif, namun juga diperlukan peran dari para pengusaha untuk mempersiapkan spesifikasi talenta yang dibutuhkan.

Sementara itu, calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, menegaskan peran dunia usaha atau entrepreneur sebagai mitra untuk meningkatkan kesejahteraan di Indonesia. Entrepreneur adalah penggerak mesin kemajuan di Indonesia, sehingga perlu didukung dan difasilitasi pemerintah.

Ketua Umum Apindo,
Shinta W Kamdani

"Pemerintah harus bisa memfasilitasi sehingga apa yang kita tuju akan tercapai," imbuhnya.

Anies mengungkapkan tujuan Indonesia di masa depan adalah menuju kemakmuran. Namun, ia menegaskan bahwa kemakmuran yang ingin dicapai itu tidak hanya terbatas di wilayah tertentu dan di sektor tertentu.

"PR kita jadi satu kemakmuran. Tapi jangsan yang makmur di wilayah tertentu dan sektor tertentu. Di visi misi kami, ada dua dimensi, yaitu dimensi sektoral dan teritorial, tidak simetris pendekatannya sama," tuturnya.

Anies juga menjelaskan ingin memberikan ruang yang lebih luas bagi pihak swasta untuk bisa turut membangun Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mendukung swasta, utamanya yang melakukan aktivitas produktif, bisa mendapatkan insentif pajak yang sepadan.

"Aktivitas produktif dikenai pajak yang harus proporsional sehingga tidak menjadi disinsentif produktif. Lalu kegiatan konsumtif, apalagi yang sifatnya mewah itu mendapat pajak yang lebih tinggi. Karena sifatnya fairness (keadilan)," tutur Anies.

Ia juga berencana untuk membuat clearing house atas aturan-aturan yang selama ini dikeluhkan dan dianggap dunia usaha tidak konsisten dalam mendukung keberlanjutan usaha. Nantinya, Anies akan mengundang para pelaku usaha untuk bisa memberikan masukan dan menunjukkan aturan-aturan yang dianggap inkonsisten.

"Karena yang paling tahu itu mereka yang merasakan," katanya.

Anies juga menyebutkan kepastian hukum menjadi kunci utama untuk mengembalikan kepercayaan investor dalam menanamkan modalnya di Indonesia.

"Kita membutuhkan investasi, baik FDI (foreign direct investment), surat utang, saham, obligasi dan lainnya kalau kita mau mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 5,5-6,5 persen. Tapi kita berha-

dapan dengan kenyataan bahwa investor asing itu paham kondisi kita, jadi kita nggak bisa bohong," kata Anies.

Anies menuturkan, masalah inkonsistensi kebijakan, birokrasi yang rumit, kekakuan dan ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah, praktik korupsi yang masih terjadi hingga infrastruktur pendukung masih menjadi masalah daya tarik investasi Indonesia.

"Jadi saya rasa kita harus mulai dengan mengakui bahwa kita punya

berasal dari pemimpin tertinggi. Namun, urusan kepastian hukum tidak boleh sekadar komitmen di level pusat, melainkan harus pula ada panduan nasionalnya untuk bisa diterapkan di level bawah.

"Kepastian hukum itu mulai dari paling atas. Adanya komitmen untuk memberikan kepastian hukum itu akan menular ke bawah. Kalau dari atas tidak ada pesan kepastian hukum, akan sulit sekali dijalankan," katanya.



masalah, lalu kita melakukan koreksi. Jangan ditutup-tutupi karena yang kita mau bangun dengan investor itu bukan peningkatan investasinya, tapi trust level. Indonesia harus

mengembalikan trust level kepada dunia, bukan semata investasi," katanya.

Anies juga mengungkapkan sejumlah strategi untuk bisa memperbaiki iklim investasi di Indonesia, di antaranya dengan

melakukan benchmarking dengan negara-negara dengan skala ekonomi yang setara, menciptakan iklim kepastian hukum, hingga keseriusan memberantas korupsi.

Ia juga menegaskan prinsip untuk memberikan kepastian hukum harus

Anies pun berjanji akan mendorong reindustrialisasi berkelanjutan menyusul tren deindustrialisasi yang menurutnya tengah terjadi dalam beberapa tahun belakangan.

"Kita merasakan ada tren deindustrialisasi selama beberapa tahun ini datanya menunjukkan deindustrialisasi porsi industri dalam perekonomian kita menurun secara signifikan," katanya.

Anies menyebutkan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB pada 2014 mencapai 29 persen, namun kemudian angka menurun menjadi 16 persen pada 2022. "Jadi makanya kita ingin mendorong reindustrialisasi berkelanjutan," imbuhnya.

Anies mengungkapkan sejumlah agenda strategis untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan transparan sekaligus mendorong reindustrialisasi. Agenda strategis itu antara lain menghadirkan kepastian hukum, kemudahan perizinan dan konsistensi kebijakan. ●



**Ketua Dewan Pakar
Apindo, Mari Elka
Pangestu**

OPTIMISTIS EKONOMI TUMBUH 5,2 PERSEN

Pemilu 2024 bisa menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu contohnya adalah belanja pemerintah yang meningkat saat momen pemilu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu, mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengucurkan Rp11,25 triliun tahun ini untuk tahap persiapan. Lalu, ada Rp15,87 triliun yang digelontorkan untuk pelaksanaan Pemilu 2024.

"Tentu ini berdampak langsung bagi belanja pemerintah dan aktivitas ekonomi di masyarakat. Juga termasuk bagaimana aktivitas dari kampanye,

berkontestasi di Pemilu 2024, baik DPR maupun DPRD.

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kemenkeu, Abdurrohman, menggunakan basis daftar caleg tetap (DCT) Pemilu 2019 untuk menghitung modal ini. Rinciannya, ada 580 kursi DPR, 2.372 DPRD provinsi, dan 17.510 DPRD kabupaten/kota.

Abdurrohman mengatakan, kursi DPR diperebutkan sekitar 8.037 caleg. Sedangkan, total caleg yang memperebutkan kursi DPRD tingkat I dan II

melayani rumah tangga (LNPR) di 2023 4,72 persen naiknya dan di 2024 6,57 persen," tambahnya.

Ia menyebut sumbangsih duit caleg tersebut bisa mengompensasi risiko pelemahan ekonomi global. Abdurrohman optimistis produk domestik bruto (PDB) Indonesia akan berada di angka 5,1 persen pada 2023 dan 5,2 persen di tahun depan.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, mengatakan, Indonesia masih berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada 2024. Satu di antara kunci tercapainya angka pertumbuhan tersebut yakni pada konsumsi masyarakat.

"Jadi untuk pertumbuhan 2024, Kementerian Keuangan itu masih melihat potensi kita tumbuh di sekitar 5,2 persen. Kunci dari Indonesia kalau mau tumbuh di angka 5,2 persen itu adalah di konsumsi. Konsumsi kita harus bisa di atas 5 persen. Malah kalau bisa di atas 5,2 persen, sehingga konsumsinya itu yang menjadi penggerak," ungkap Wamenkeu di Jakarta, Selasa, 19 Desember 2023.

Kata dia, konsumsi adalah penyumbang proporsi yang tinggi dalam produk domestik bruto Indonesia. Dia menilai tahun 2024 potensi konsumsi masih terlihat dari gerak ekonomi masyarakat dan gerak ekonomi rumah tangga, terlebih dengan adanya rangkaian kampanye Pemilu mendatang.

Selain itu, Suahasil juga mengharapkan penyelenggaraan pemilu dapat memberikan keyakinan kepada investor, sehingga mendorong angka investasi.

"Kita termasuk negara yang cukup matang menurut saya melakukan Pemilu. Jadi moga-moga dunia usaha bisa terus melihat dan tidak menunda keputusan investasinya," kata



Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara

ini ada banyak sekali caleg, baik dari DPR pusat maupun DPRD provinsi dan kabupaten/kota," terang Febrio dalam Konferensi Pers APBN KITA secara virtual, Jumat, 24 November 2023.

"Secara keseluruhan estimasi pemilu untuk 2023 kurang lebih 0,2 persen dari pertumbuhan ekonomi 2023 dan untuk 2024 sekitar 0,25 persen," prediksi Febrio.

Kemenkeu sebelumnya sempat menghitung modal caleg yang akan

mencapai 258.631 orang pada Pemilu 2019 lalu.

"Ini kalau kita asumsikan jumlah caleg tetap. Asumsi pengeluaran caleg pusat Rp1 miliar. Kemarin saya lihat di TV beberapa caleg ada bilang Rp5 miliar, Rp3 miliar, tapi kita rata-ratakan Rp1 miliar. Kemudian, caleg DPRD Rp200 juta per orang. Ini rata-rata saja, asumsi moderat," ungkap Abdurrohman.

"Jadi, dari situ (modal caleg) total dampak ke lembaga nonprofit yang

Suahasil.

Suahasil menjelaskan, potensi berikutnya dari pertumbuhan ekonomi berasal dari terjaganya inflasi. Inflasi Indonesia yang relatif moderat di bawah 3 persen menjadi modal utama menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga secara keseluruhan.

"Kita akan terus jaga. Tentu memang banyak yang bertanggung jawab di sini, bukan hanya pemerintah. Tapi di pemerintah juga banyak sekali soal infrastruktur, soal produksi pertanian, barang-barang pangan, lalu kemudian juga tentu teman-teman di Pemerintah Daerah. Moga-moga kita jaga bersama dan dengan demikian kita bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2024," terangnya.

Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Andry Asmoro, memproyeksikan realisasi investasi secara kumulatif akan tetap kuat pada pemilu 2024, sejalan dengan target Presiden Jokowi sebesar Rp1.650 triliun.

Asmo melihat seiring pertumbuhan investasi yang akan tetap terjaga, dirinya tidak menampik adanya tren penurunan investasi di tahun pemilu.

"Selama ini, kami lihat di tahun politik investasi turun. Namun kalau kami breakdown, investasi yang turun adalah asing," ungkapnya dalam Media Gathering Perkembangan Ekonomi Global dan Indonesia 2023 secara daring, Selasa, 19 Desember 2023.

Dalam paparannya, rata-rata pertumbuhan foreign direct investment (FDI) menjelang tahun pemilu cukup tinggi, yakni sebesar 25,3 persen secara tahunan. Sementara FDI yang masuk pada tahun pemilu (2004, 2009, 2014, dan

2019), rata-rata terkontraksi 6,6 persen dibandingkan tahun sebelum pemilu.

Berbeda dengan investasi asing, investasi domestik baik menjelang tahun pemilu maupun pada tahun pemilu terus tumbuh positif. Asmo menjelaskan rata-rata pertumbuhan investasi domestik menjelang tahun pemilu sebesar 28,6 persen. Sementara pada tahun pemilu, mampu tumbuh namun melambat di angka 25,3 persen.

"Pemerintah perlu berupaya lebih untuk menjaga siklus penurunan investasi asing di tahun pemilu tidak lagi berulang. Paling tidak, penurunan investasi asing tidak terlalu dalam, sehingga investasi dapat tumbuh relatif stabil pada 2024," jelasnya.

Asmo juga menjelaskan, uang beredar dalam arti luas (M2) diproyeksikan akan meningkat cukup tinggi pada Pemilu 2024. Selama empat bulan sebelum pemilu dan satu bulan setelah pemilu, tren M2 sejak Pemilu 2004 selalu meningkat.

"Pada 2014 Rp165,5 triliun, 2019 segitu (Rp189,7 triliun) dan ini naik Rp20-30 triliun. Tahun ini (Pemilu 2024) bisa naik lebih kencang," ungkapnya.

Asmo memaparkan M2 dalam Pemilu 2004 meningkat Rp14,8 triliun. Sementara pada pemilu 2009, M2 meningkat Rp82,7 triliun. Kemudian, pada pemilihan presiden pada 2014, posisi M2 meningkat hingga Rp165,5 triliun, sementara pada 2019 naik hingga Rp189,7 triliun. Artinya, bila sesuai dengan proyeksi Asmo, uang beredar pada pemilu 2024 akan naik lebih tinggi dari sebelumnya, akan tembus setidaknya di angka Rp219,7 triliun.

Untuk itu, Asmo berharap peredaran uang yang semakin tumbuh dapat mendorong aktivitas masyarakat untuk belanja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. "Bayangkan kami menghadapi the longest and the largest election di Indonesia, diharapkan uang beredar lebih tinggi lagi, ini political driven untuk konsumsi," lanjutnya.

Melihat data Bank Indonesia (BI) per Oktober 2023 atau empat bulan sebelum Pemilu 2024, posisi M2 pada Oktober 2023 tercatat sebesar Rp8.505,4 triliun atau tumbuh 3,4 persen secara tahunan (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 6,0 persen yoy.

Utamanya, pertumbuhan didorong oleh pertumbuhan uang kuasi sebesar 7,8 persen yoy. Uang kuasi dengan pangsa 44,5 persen dari M2, tercatat sebesar Rp3.787,3 triliun, terutama dik kontribusi oleh simpanan berjangka yang tumbuh sebesar 6,4 persen yoy pada Oktober 2023.

Ekonom Utama Departemen Riset Ekonomi dan Kerja sama Regional Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB), Arief Ramayandi, menyebutkan momen pemilu akan mendorong perekonomian Indonesia tumbuh 5 persen pada 2024.

Pasalnya, terdapat peningkatan belanja pemerintah untuk Pemilu 2024 yakni sebesar 57,3 persen menjadi Rp71,3 triliun dari Pemilu 2019 yang sebesar Rp45,3 triliun.

"Apalagi kalau ada dua putaran sampai bulan Oktober, ini akan mendorong konsumsi masyarakat," ujar Arief.

Adapun ADB mempertahankan



Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), Andry Asmoro

proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 sebesar 5 persen dalam Asian Development Outlook (ADO) Desember 2023. Perkiraan tersebut didukung oleh prospek permintaan domestik yang kuat.

Arief memperkirakan konsumsi rumah tangga akan tetap kuat pada tahun depan, yang didukung oleh rendahnya inflasi. Pada 2024, ADB

terlalu bagus, jadi kita tidak bisa mengharapkan kondisi eksternal," imbuhnya.

Selain itu, arus modal asing ke pasar keuangan domestik kemungkinan tidak akan terlalu besar pada 2024, mengingat tingginya tingkat suku bunga secara global. Namun harapannya, Bank Sentral Amerika Serikat (AS), The Fed, akan mulai menurunkan

bersamaan," kata Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Zamroni Salim.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, ujar Zamroni, tingkat konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit rumah tangga mulai meningkat enam bulan sebelum pemilu hingga saat pemilu berlangsung. Hal itu mengindikasikan pelaksanaan pesta demokrasi dapat mendorong tingkat konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit rumah tangga.

"Kalau dari aspek industri, kemudian dari sisi pengeluaran lainnya itu tidak banyak memberikan perubahan termasuk dalam urusan inflasi," kata Zamroni.

Dia mengungkapkan, saat yang sama menjelang pemilu ada kecenderungan pemerintah untuk menahan kenaikan harga bahan bakar minyak, meski ada kenaikan harga minyak dunia.

Tidak jarang setelah pemilu dikompensasi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak pada awal pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih.

Kendati dampak ekonomi terbatas akibat pemilu sebelumnya, tahun depan potensi dampak ekonomi akan lebih besar dirasakan dari pemilu-pemilu sebelumnya imbas pelaksanaan pemilu serentak yang baru pertama kali diterapkan di Indonesia. Atas dasar itu, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 mendatang diperkirakan akan tetap tumbuh positif.

"Kalau dari aspek industri, kemudian dari sisi pengeluaran lainnya, itu tidak banyak memberikan perubahan termasuk dalam urusan inflasi," papar Zamroni.

Jika Pemilu 2024 berlangsung selama dua putaran, maka pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga dan lembaga non-profit rumah tangga bisa menjadi salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan.

Meski demikian, Zamroni berharap Pemilu 2024 hanya berlangsung satu putaran agar tidak membebani keuangan negara dan tidak berdampak terhadap iklim bisnis di dalam negeri. ●



Kepala Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan BRIN, Zamroni Salim

memprediksikan inflasi domestik terjaga pada level 3 persen.

Sementara itu, investasi pada tahun depan juga akan meningkat karena perbaikan permintaan dalam negeri mendorong ekspansi manufaktur. Berbagai proyek-proyek dalam Program Strategis Nasional (PSN) dan pembangunan Ibu Kota Baru pun dipercepat untuk memenuhi target pada 2024, sehingga akan mendorong investasi.

Namun untuk ekspor, dirinya tidak melihat komponen tersebut akan menjadi pendukung utama pertumbuhan ekonomi tahun depan, seperti saat masa-masa COVID-19.

"Ke depan permintaan global tidak

an suku bunga pada pertengahan tahun depan.

Apabila hal tersebut telah dilakukan, sebagian besar bank sentral di seluruh dunia, termasuk Bank Indonesia, juga akan mulai menurunkan suku bunganya secara bertahap, sehingga pertumbuhan kredit dalam negeri akan kembali normal.

"Hal ini hanya bersifat material, pertumbuhan kredit baru akan terwujud setelah tahun 2024," ucap Arief.

Sementara itu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan Pemilu 2024 berpotensi mendorong pertumbuhan

konsumsi rumah tangga dan lembaga non-profit rumah tangga secara signifikan.

"Pemilu 2024 berpotensi memiliki dampak yang lebih besar dari pemilu sebelumnya, akibat penyelenggaraan pesta demokrasi dilakukan secara



Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu, Febrio Kacaribu

nfo indonesia

www.infoindonesia.id

Network

INFO PASANG
ZULFAHMI
+62 813 8019 6507
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat Sumsel

Koran Cetak Info Indonesia



JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id

 www.infoindonesia.id

 facebook @infoindonesia.id  twitter : @_infoindonesia

 Instagram @info_indonesia.id  YouTube : infoindonesiatv



inovasi **UNTUK** NEGERI
info indonesia

<https://infoindonesia.id>

EDISI #38 DESEMBER 2023



JOKOWI JADI REBUTAN PARTAI